Laporan Tahunan
KOMNAS HAM RI
Perwakilan Papua

2019



Tim Penyusun
Laporan Tahunan Komnas HAM RI Perwakilan Papua 2019

Penanggung Jawab	: Frits B. Ramandey
Ketua Tim	: Melchior S. Weruin
Anggota	: Heru Yulianto Nur Prasetyo
	Yorgen Numberi
	Ronald S Rumbiak
	Yohana Tukayo
	Yudha Aprilianto
	Christine Mansawan
	Livand Breemer
	Nareki Kogoya
Desain Buku	: Melchior S Weruin
Desain Sampul	: Heru Yulianto Nurprasetyo
Ukuran Buku	: 245 mm x 172 mm
Sumber Foto	: Koleksi Komnas HAM RI Perwakilan Papua

Diterbitkan oleh:
Komnas HAM RI Perwakilan Papua
Jl. Soa Siu Dok V Bawah – Jayapura, Papua
Telp/Faks (0967) 521 592
email: perwakilan_papua@komnasham.go.id
Kode Pos 99115

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Ketua Komnas HAM RI
dan semua Staf Komnas HAM Perwakilan Papua
serta berbagai pihak yang telah mendukung
dalam penyediaan data, informasi
yang digunakan di dalam Laporan Tahunan
Komnas HAM RI Perwakilan Papua 2019

SAMBUTAN KETUA KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA UNTUK LAPORAN TAHUNAN KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PAPUA 2019

Papua versus Indonesia: Mencari Solusi Damai dan Bermartabat

Setiap masyarakat memiliki *social imaginary*-nya sendiri, tentang apa yang mereka impikan sebagai masa depan yang adil, makmur dan penuh kedamaian serta kebahagiaan. Namun, seringkali harapan indah itu terhalangi karena yang hadir malah *social misery*, kesengsaraan sosial yang dirasakan bersama-sama. Tentu saja, imajinasi sosial yang berisi harapan mau pun sebaliknya kesengsaraan sosial, keduanya adalah pandangan subjektif masyarakat itu di dalam mendefinisikan hidup mereka. Subjektifitas adalah titik penting bagi mereka untuk menjelaskan siapa dan bagaimana mereka memberikan penilaian terhadap nasib mereka. Subjektifitas itu bisa menyempit atau meluas, akan sangat bergantung pada interaksi budaya satu masyarakat dengan yang lainnya. Interaksi yang terbuka dan saling menerima, akan memperlebar dan melenturkan subjektifitas. Dia akan bersosialisasi ke dalam kolektifitas masyarakat yang kian meluas, bisa melebihi batas etnis dan ras tertentu. Bangunan kolektifitas itu pula yang kemudian menjadi titik awal terbentuknya identitas antar ras-etnis, yang kemudian kita kenal dengan istilah bangsa atau bahkan negara-bangsa (nation-state).

Masyarakat Papua juga mengalami persoalan dua dimensi tadi, *social imaginary* dan *social misery*. Tak mudah mendefinisikannya, apalagi secara etnis orang Papua tidak bisa dilihat sebagai suatu entitas tunggal baik secara sosio-budaya mau pun sosio-politik. Secara historis, Papua belum pernah memiliki suatu entitas politik tersendiri, yang menjadi

rujukan ideologis masyarakat Papua. Berbeda dengan masyarakat Aceh, yang ratusan tahun pernah memiliki suatu entitas politik negara yakni Kesultanan Aceh. Karena itu, kesengsaraan sosial (social misery) yang dialami masyarakat Aceh, dengan mudah dikontradiksikan dengan harapan kembali kepada kejayaan masa lalu (collective imagination). Imajinasi kejayaan masa lampau dapat segera dimunculkan kembali untuk menjawab kebutuhan masa depan, itu yang mereka sebut Aceh Merdeka. Sementara Papua, meski belum pernah memiliki pengalaman menjadi satu entitas politik, bisa jadi memiliki proyeksinya sendiri. Secara bertahap, masyarakat Papua merumuskan harapan bersama yang menyatu. Proyeksi - yang meski pun tidak sekuat Aceh - sebaliknya tetap mengalami tarikan yang sama kuatnya untuk menjadi bagian entitas Indonesia. Di situ lah letak dinamika sosial-politiknya, sekaligus gerak ideologisnya: Papua vs Indonesia. Yang pasti plihan menjadi apa pun, bukan harga mati, tapi proyeksi ideologi-politik yang terus bergerak dinamis.

Pertanyaan penting membicarakan konflik dan perlawanan Papua terhadap Indonesia adalah tentang apa faktor yang memicu perlawanan tersebut. Mengapa ada gerakan orang Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia, kesengsaraan apa yang memicu gerakan itu dan seterusnya. Puluhan tahun sudah Papua menjadi bagian dari Indonesia, selama itu pula pertentangan Jakarta dengan Papua belum juga terselesaikan. Catatan sejarah yang ditorehkan adalah catatan tentang korban dari rakyat Papua, atau sebaliknya juga dari aparat keamanan, bahkan pekerja sipil seperti kasus pembantaian buruh PT Istaka Karya. Pengungsian manusia juga berulang kali terjadi, aksi massa bahkan yang berujung kekerasan dan memakan korban sipil. Situasi ini menjadi perhatian tidak saja di Papua, di Jakarta tetapi juga di internasional.

Kondisi objektif Papua baik kondisi alam, kondisi sumber daya manusia, infra struktur dan faktor-faktor lainnya menjadi tantangan serius untuk meningkatkan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia Papua merupakan yang paling rendah di Indonesia. Hal ini menunjukkan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat tertinggal jauh dibandingkan daerah lain di Indonesia. Akselesari pembangunan tidak sepenuhnya dinikmati Orang Asli Papua, maka kesenjangan sosial-ekonomi dengan pendatang menjadi tantangan lain tidak saja di bidang sosial-ekonomi, tetapi seringkali ikut memanaskan konflik politik. Kompleksitas itu lah yang dihadapi semua pihak di dalam mempercepat capaian *social imaginary* rakyat Papua.

Buku laporan ini menjelaskan catatan perkembangan tahun 2019, yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dengan apa yang berkembang puluhan tahun selama Papua menjadi Indonesia. Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua menerima begitu banyak aduan, sekaligus melakukan pemantauan dan penanganan berbagai kasus satu tahun terakhir. Tak kalah pentingnya adalah laporan tentang kasus demonstrasi yang berujung kekerasan di berbagai kota di Papua yang dipicu tindakan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya. Sampai saat ini masih ada puluhan orang sipil, sebagian mahasiswa yang ditahan dan diadili. Persidangan sudah mulai berlangsung dan dibutuhkan juga pemastian standar hukum yang berbasis hak asasi manusia kepada mereka. Sebagian dari mereka dapat dikategorikan Human Rights Defender dan dengan begitu sesungguhnya tak semestinya diadili karena yang mereka lakukan adalah memperjuangkan hak asasi manusia yang memang merupakan isu serius di tanah Papua. Sistem peradilan kita mestinya mampu juga menangkap isu hak asasi seperti ini dan memberikan keputusan yang adil kepada mereka yang kita sebut sebagai Human Rights Defender tersebut.

Tentu saja Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua harus memainkan peran strategis yang tidak mudah. Kantor Perwakilan berada di tengah dinamika persoalan yang kompleks dan rumit. Berbagai pengaduan diterima dan mesti ditindaklanjuti dengan seksama. Sejalan dengan mandat Komnas HAM maka tugas dan fungsi pemantauan, pengkajian, pendidikan dan penyuluhan mau pun mediasi harus dilakukan, meski situasi politik dan keamanan sering tidak kondusif. Namun, komunikasi dan koordinasi yang efektif berhasil dilakukan, baik ke pihak pemerintah, aparat keamanan bahkan juga TNI, tetapi tak kalah intensif dengan lembaga kemasyarakatan (adat dan agama), perguruan tinggi, termasuk dengan kelompok perlawanan. Komnas HAM diterima sebagai pihak yang secara kredibel berada di tengah dan menjembatani semua pihak. Itu lah tugas kemanusiaan dengan standar dan norma hak asasi manusia yang menjadi pegangannya.

Saya mempersilahkan membaca laporan ini dan berharap kritik dan masukan bukan saja atas laporan yang dituliskan, tetapi terhadap kiprah dan capaian di lapangan yang dihasilkan selama ini. Tujuannya tiada lain, Komnas HAM bisa berkontribusi lebih tinggi lagi terhadap upaya penyelesaian berbagai masalah di Papua, terutama masalah hak asasi manusia, bagaimana mencegah kekerasan terus berlangsung, mendorong upaya dialog dan damai untuk negeri Papua yang lebih sejahtera dan aman.

Jakarta, 2 April 2020

Ahmad Taufan Damanik
Ketua

KATA PENGANTAR

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Komnas HAM RI Perwakilan Papua dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dalam konteks ini, keberadaan Komnas HAM Perwakilan Papua diharapkan dapat memberikan dampak bagi upaya pemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penegakkan HAM di Tanah Papua.

Pasal 97 UU Nomor 39 Tahun 1999 mengamanatkan bahwa Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya serta kondisi HAM dan kasus-kasus yang ditanganinya. Sejalan dengan amanat ini, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menerbitkan Laporan Tahunan 2019. Laporan tahunan ini merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban dan trasparansi kepada masyarakat di Tanah Papua.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Komnas HAM Papua menerima beragam pertanyaan dan kritikan. Pertanyaan maupun kritik itu didasarkan pada penilaian atas rentetan peristiwa di Papua belakangan ini yang patut diduga terjadi pelanggaran HAM, termasuk dugaan pelanggaran ham masa lalu yang belum diselesaikan oleh Komnas HAM.

Kami menyadari bahwa pemenuhan dan penegakan HAM adalah sebuah jalan panjang yang harus diupayakan terus menerus. Hingga saat ini, Komnas HAM Papua terus bekerja sesuai kewenangannya. Namun harus disadari bahwa pemenuhan dan penegakkan HAM di Papua, tidak bisa dilakukan Komnas HAM semata. Meredam konflik kekerasan sosial yang berujung pada tidak terpenuhinya hak sipil maupun ekosob di Tanah Papua menjadi tanggung jawab negara. Dalam konteks HAM, negara menjadi pihak utama yang harus menampakkan perannya dalam upaya penghormatan, perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan penegakkan HAM.

Harapannya, semua pihak yang menerima dan membaca laporan ini, terutama, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Gubernur Papua, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, Gubernur Papua

Barat, Majelis Rakyat Papua Barat serta stakeholder terkait lainnya ikut mengupayakan pemajuan, pemenuhan dan penegakkan HAM dalam bingkai otonomi khusus untuk menatap masa depan HAM di Tanah Papua yang lebih bermartabat.

Kiranya segala kekurangan atau kelemahan dilihat sebagai suatu tantangan yang harus diperbaiki di masa mendatang dengan terus berupaya memberi dukungan dan solusi sebagai kontribusi nyata dalam usaha mewujudkan pemenuhan dan penegakkan HAM di Tanah Papua. Dukungan itu menjadi semangat bagi Komnas HAM Papua untuk terus berupaya mendorong partisipasi semua unsur agar mengambil bagian dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM, sehingga bisa tercapai kondisi HAM di Papua yang lebih baik secara berkesinambungan.

Jayapura, Februari 2020

Komnas HAM RI Perwakilan Papua
Kepala

Frits B Ramandey, S.Sos, MH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
UCAPAN TERIMA KASIH ii
SAMBUTAN (Ketua Komnas HAM) iii
KATA PENGANTAR (Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua) iv
DAFTAR ISI v

I. SITUASI HAK ASASI MANUSIA DI TANAH PAPUA PADA 2019
A. Kondisi Hak Sipil dan Politik 1
B. Kondisi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya 2

II. RASISME – TANAH PAPUA MEMBARA
A Akar Masalah .....
B. Respon Masyarakat Papua .....
C. Upaya Komnas HAM .....

III. PERSOALAN NDUGA BELUM SELESAI
A. Kondisi HAM di Ndugga saat ini .....
B. Upaya Komnas HAM .....

IV. CAPAIAN STRATEGIS KOMNAS HAM PAPUA
A. Pemantauan .....
B. Penyuluhan .....
C. Pramediasi .....

V. PELAYANAN PENGADUAN
A. Pelayanan Pengaduan 2019 .....
B. Matriks Pelayanan Pengaduan .....
C. Matriks Pelayanan Pengaduan Pro Aktif .....

VI. PENUTUP
A. Rekomendasi .....
B. Catatan Penutup .....
C. Profil Komnas HAM Papua .....

I
SITUASI HAK ASASI MANUSIA DI TANAH PAPUA PADA 2019

Papua tanah damai adalah seruan untuk menjadikan Papua sebagai tanah penuh kedamaian. Namun seruan ini tidak berlaku selama 2019. Papua bukan tanah damai! Pernyataan ini didasarkan pada peristiwa yang terjadi sepanjang 2019. Beragam kekerasan silih berganti. Kepanikan warga sipil diantara dentuman senjata masih sering terjadi. Dua kelompok saling mempertontonkan kekerasannya sebagai simbol kehebatan masing-masing. Yang satu atas nama idelogi papua merdeka, yang lainnya menegaskan harga mati bagi NKRI. Masing-masing bertahan pada "harga mati." Tidak ada tawar menawar di sana.

Papua bukan tanah damai adalah pernyataan yang menggambarkan kondisi HAM pada 2019. Berawal dari Nduga, dimana puluhan orang dibantai dan ribuan lainnya mengungsi. Peristiwa ini menyebabkan tidak terpenuhinya atau terganggunya semua lini kehidupan, terutama, pemenuhan hak atas rasa aman, layanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan publik tidak berjalan normal. Hak atas sandang, pangan dan papan terabaikan. Para pengungsi menolak bantuan dari pemerintah. Diduga ada campur tangan dari kelompok-kelompok tertentu yang mempengaruhi sikap para pengungsi.

Di penghujung tahun, isu rasisme merebak di Surabaya. Warga Papua tersulut amarahnya. Tanah Papua membara. Terjadi gelombang aksi protes yang pada umumnya berakhir anarkis. Sebagian besar mahasiswa Papua "pulang kampung." Puluhan nyawa melayang sia-sia. Ribuan lainnya mengungsi. Kondisi ini menjadi perhatian nasional bahkan masyarakat internasional.

Pasca peristiwa ini, demi alasan keamanan sebanyak 6 ribu personil keamanan dikirim ke Tanah Papua. Kebijakan keamanan ini mendapat respon beragam dari masyarakat. Ada pro dan kontra. Namun harus diakui bahwa kehadiran aparat mampu meredam kerusuhan yang lebih luas. Penegakan hukum dilakukan untuk menjamin kepastian hukum. Sementara di sisi lain, penegakan hukum bagi pelaku rasisme terasa lambat.

Mencermati kondisi HAM di Papua, melalui berbagai peristiwa, Komnas HAM Papua memetakan dalam dua tema untuk dijabarkan yakni kondisi Hak Sipil dan Politik dan kondisi hak ekonomi, sosial dan budaya.

A. Hak Sipil dan Politik

Ada dua peristiwa yang memicu terganggunya kondisi pemenuhan hak sipil dan politik sepanjang 2019, yakni:

Pertama; kekerasan 2 Desember 2018 di Nduga yang mewariskan konflik di sepanjang 2019. Berawal dari pembantaian 31 pekerja PT. Istaka Karya. Negara meresponnya melalui pendekatan keamanan. Ribuan aparat keamanan dikirim ke Nduga untuk mengejar para pelaku yang diduga Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya. Kontak senjata antara TNI/Polri dan KKB mengakibatkan puluhan ribu masyarakat Nduga lari menyelamatkan diri ke hutan. Dalam kontak senjata tersebut diduga sejumlah warga sipil meninggal dunia.

Kehadiran aparat keamanan dalam rangka pemulihan kondisi Nduga ternyata menimbulkan gejolak baru. Ribuan warga sipil di beberapa distrik mengungsi besar-besaran ke wilayah-wilayah terdekat seperti Wamena, Lany Jaya, Timika dan wilayah lainnya.

Kedua; isu rasime di Surabaya. Awalnya, para mahasiswa Papua penghuni asrama Kamasan diduga melecehkan bendera merah putih. Tiang bendera patah, benderanya jatuh ke parit. Tidak terima dengan kondisi ini, puluhan warga bersama beberapa oknum aparat mendatangi asrama mahasiswa Papua lalu menggedor pintu pagar, seraya mengeluarkan kata-kata kasar bernada rasis dan diskriminatif. Sikap warga dan beberapa oknum aparat ini memicu reaksi para penghuni asrama. Tak lama massa dari beberapa ormas datang memberikan perlawanan.

Akhirnya polisi masuk secara paksa setelah upaya negosiasi menemui jalan buntu. Sebanyak 43 mahasiswa dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dimintai keterangan.

Tak lama berselang, di media sosial ramai tersebar kabar mengenai tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua. Spontan masyarakat Papua menyatakan protes. Aksi protes mendapat simpati luas dari berbagai kalangan masyarakat. Namun patut disayangkan, berbagai gelombang aksi protes ini berakhir anarkis.

Kapolri Tito Karnavian menyebut, pasca peristiwa ini ribuan pasukan dikirim untuk mengantisipasi meluasnya aksi demontrasi anarkis. Ribuan pasukan tersebut disebar ke Papua dan Papua Barat.

Pembantaian di Nduga dan isu rasis di Surabaya bagai energi yang menghangatkan konflik sepanjang 2019. Dua peristiwa ini menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit, hilangnya rasa aman dan terganggunya hubungan sosial masyarakat Papua di beberapa tempat.

Komnas HAM Papua mencatat bahwa selain dua peristiwa utama tersebut, ada beragam peristiwa lain yang menandakan kelamnya kondisi HAM di Papua. Aksi kekerasan bersenjata di wilayah Pegunungan Tengah masih terus berulang. Saling serang antara anggota TNI/Polri dan KKB menjadi tontonan berulang. Penembakan warga sipil, misalnya di Deiyai, Asmat dan Puncak Jaya. Semuanya berlangsung secara sporadis dan sadis. Sejumlah nyawa tak berdosa hilang, baik warga sipil, anggota TNI/Polri maupun KKB.

Terhadap berbagai aksi kekerasan bersenjata di Papua, Polda Papua menetapkan sejumlah daerah yang menjadi sasaran dilakukan operasi penegakan hukum, yaitu Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, dan Timika. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa serangan yang dilakukan oleh KKB telah merenggut banyak nyawa manusia tidak berdosa dan mengganggu upaya pembangunan serta mengancam kedaulatan NKRI.

Polda Papua dan Papua Barat mencacat bahwa sepanjang 2019, terjadi aksi kekerasan menggunakan senjata api sebanyak 23 kali. Aksi ini menyebabkan 11 orang warga sipil dan 10 anggota TNI/Polri meninggal dunia. Korban luka terdiri dari 5 orang warga sipil dan 11 orang anggota TNI/Polri. Sedangkan terkait aksi unjuk rasa soal rasisme menyebabkan 44 orang warga sipil dan 2 orang anggota TNI/Polri meningal dunia. Korban luka-luka terdiri dari 22 orang TNI/Polri dan 109 orang warga sipil. Belum termasuk kerugian material.

Komnas HAM Papua mengendus adanya peredaran senjata api yang dikuasai pihak KKB di wilayah Papua dan Papua Barat sebanyak 100 pucuk, belum termasuk senjata rakitan yang diperkirakan berjumlah 150 pucuk. Selain itu diduga ada oknum anggota TNI terlibat dalam penjualan amunisi.

Kendati demikian, meskipun beresiko, Komnas HAM Papua terus berupaya melakukan pendekatan dengan sejumlah pimpinan TPN/OPM – oleh Polda Papua disebut KKB agar tidak melakukan aksi-aksi bersenjata yang memicu balasan dari aparat keamanan. Sebaliknya Komnas HAM, dalam berbagai rekomendasinya meminta agar pihak keamanan sebagai representasi negara dalam upaya penegakkan hukum maupun berbagai kebijakan mengedepankan pendekatan berbasis HAM. Nilai-nilai dan prinsip HAM mesti dijunjung tinggi.

Komnas HAM Papua dalam berbagai kesempatan meminta Polda Papua dan Kodam XVII Cenderawasih agar mengutamakan pendekatan persuasif dalam penanganan masalah keamanan. Pihak keamanan harus merespon dengan cepat dengan cara yang humanis terhadap setiap

gejala yang berpotensi menimbulkan konflik sosial yang meluas.

Sepanjang 2019, tak ada kemajuan berarti dalam penegakkan HAM. Masyarakat Papua semakin tidak percaya terhadap upaya pemerintah dalam menuntaskan kasus HAM berat. Penilaian ini didasarkan pada fakta bahwa sampai saat ini, belum ada satu pun kasus di Papua yang diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan HAM. Kasus Paniai Berdarah masih dalam penyelidikan Komnas HAM, berkas penyelidikan Wamena Berdarah dan Wasior Berdarah masih mengendap di Jaksa Agung. Kondisi ini memicu sebagian aktivis HAM maupun masyarakat Papua menyerukan agar dilakukan penyelesaian di tingkat internasional karena menilai bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki *good will* dan *political will* maupun komitmen yang kuat dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM berat di Papua.

Dalam kaitan dengan itu, UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 45-46 mengamanatkan agar dibentuk Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai wadah untuk penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu di Papua. Menyikapi hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang digagas oleh salah satu anggotanya, John Gobay dan Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Cristian Warinussy terus menyuarakan mengenai penting dan mendesaknya pembentukan Pengadilan HAM dan KKR.

Gagasan mengenai Pengadilan HAM dan KKR telah disusun dalam sebuah *draft* Perdasus yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk diteruskan kepada Pemerintah RI. Amanat UU Otsus ini jika tidak diikuti dengan pembentukan peraturan pelaksanaan maka akan menyulitkan dalam penerapannya. Oleh karena itu diharapkan Pemerintah RI memberi respon cepat terhadap upaya penegakkan HAM di Tanah Papua.

Thaha Alhamid, Sekertaris Jenderal Presedium Dewan Papua (PDP), menyatakan bahwa orang Papua akan menjadi orang Indonesia tulen jikalau semua persoalan mengenai pelurusan sejarah integrasi Papua ke Indonesia dan pelanggaran HAM di Tanah Papua sejak orde lama sampai reformasi diselesaikan dengan baik dan bermartabat. Kalau tidak, Papua akan menjadi bahan perbincangan masyarakat internasional dan bukan tidak mungkin kondisi ini akan menarik Papua keluar dari Indonesia.

Sepanjang 2019, terkait kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum belum menunjukan perkembangan yang menggembirakan. Beberapa aksi demonstrasi dibatasi pihak keamanan dengan

pertimbangan mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Polda Papua menilai bahwa ada kelompok tertentu yang cenderung dalam aksinya berakhir anarkis atau mengganggu ketertiban umum.

Misalnya, beberapa aksi demo yang dilakukan KNPB. Pihak keamanan memandang bahwa kelompok ini cenderung mengganggu ketertiban umum sehingga harus dilokalisir dan tidak mendapat ruang untuk menyampaikan aspirasinya. Atau beberapa aksi oleh mahasiswa yang dibubarkan secara paksa karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

Hal ini harus dipahami bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum itu memiliki mekanisme formal yang harus ditaati, tidak bisa dipahami sebagai sesuatu hak yang bisa dilakukan secara bebas, apalagi sampai mengganggu hak orang lain dalam lingkup ketertiban umum.

Sepanjang 2019, terkait toleransi antarumat beragama, Komnas HAM Papua mencatat sebuah peristiwa yang berpotensi menimbulkan gejolak antarumat beragama yakni peristiwa di Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Atas peristiwa ini, Polda Papua menetapkan Jafar Umar Thalib (JUT) bersama 6 pengikutnya sebagai tersangka dalam kasus pengancaman disertai pengrusakan rumah warga.

JUT merupakan Panglima Laskar Jihad Indonesia dan pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Ihya As-Sunnah. Sebelumnya JUT mendapat penolakan dari masyarakat dan pemerintah Keerom karena keberadaanya dipandang mengancam persatuan antarumat beragama.

Menyikapi kondisi ini, Forkompimda Provinsi Papua dan Kota Jayapura meminta Komnas HAM Papua melakukan upaya rekonsiliasi antar warga, selain upaya penegakan hukum oleh Polda Papua. Hal ini dilakukan secara cepat dan tepat untuk menghindari reaksi yang meluas dari warga.

Berbagai potret mengenai kondisi hak sipil dan politik di Papua sepanjang 2019, menunjukkan bahwa pemenuhan hak sipil dan politik di Papua belum membaik. Karenanya dibutuhkan *good will* negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban utama dalam urusan perlindungan, penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan penegakkan HAM di Tanah Papua.

B. Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

Banyak pihak selama ini berpikir bahwa HAM maupun pelanggaran HAM itu hanya menyangkut urusan hak-hak sipil dan politik semata,

misalnya terkait penembakan atau peristiwa yang melibatkan aparat negara yang menyebabkan warga sipil meninggal dunia atau luka-luka. Seiring perkembangan zaman, isu HAM dan pelanggaran HAM itu telah melingkupi banyak hal termasuk mencakup tugas dan kewajiban negara dalam upaya pemenuhan hak warga negara di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam kaitan dengan upaya pemenuhan HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya pemerintah telah menetapkan UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang telah diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.

Sebagaimana dikemukakan dalam UU No. 21 Tahun 2001, Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua.

Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.

Kebijakan Otsus didukung dengan alokasi anggaran yang sangat besar. Selain itu dalam konteks afirmasi, terkait keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam struktur pemerintahan mengalami perubahan yang cukup menjanjikan. Saat ini, pimpinan atau kepala daerah di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten di Papua dan Papua Barat hampir

semuanya adalah OAP. Bahkan, prosentase pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) OAP mulai meningkat.

Keberadaan pemimpin OAP secara nyata di dalam penyelenggaraan pemerintahan mengandung filosofi bahwa OAPlah yang paling tahu karakter, kondisi, suasana bathin dan arah pembangunan sesuai kebutuhan masa kini. Pemimpin OAP yang duduk dalam struktur pemerintahan selain memiliki kewenangan juga lebih mengenal masyarakat dan alam semestanya. Oleh karena itu kehadiran para pemimpin OAP di panggung pemerintahan dipandang penting untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Namun dalam kenyataannya, Otsus bagi Papua yang mulai berlaku sejak 2001 dan kini memasuki tahun ke 19 masih menjadi polemik. Otsus belum mampu menjawab permasalahan mendasar.

Di era kepemimpinan Lukas Enembe, Pemerintah Provinsi Papua, sudah beberapa kali menyodorkan RUU Otsus Plus sebagai pengganti UU Otsus. Pada intinya, Pemerintah Provinsi Papua menginginkan agar Pemerintah Indonesia memberikan wewenang yang lebih berkaitan dengan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA). Rakyat Papua mestinya sejahtera di atas kelimpahan SDAnya. Hingga kini, RUU Otsus Plus belum mendapat respon dari pemerintah Indonesia. Akibatnya dalam beberapa kesempatan Gubernur Papua secara terang-terangan menyatakan akan mengembalikan Otsus.

Bagi masyarakat akar rumput, keberadaan Otsus dirasa hanya menjadi milik segelintir orang yang berada pada lingkaran kekuasaan saja. Masih banyak keluhan soal buruknya pelayanan publik, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Sampai saat ini, amanat Otsus belum semuanya dijabarkan secara jelas dan terperinci melalui aturan-aturan teknis – kalaupun sudah ada belum berjalan efektif. Kondisi ini menimbulkan hak-hak warga negara terutama OAP dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya belum dipenuhi secara baik dan terukur. Kelalaian pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga negara sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam bidang pendidikan, sejauh ini, pemerintah provinsi diikuti pemerintah kota dan kabupaten di Papua dan Papua Barat masih berorientasi pada kebijakan bantuan studi dan bea siswa bagi pelajar atau mahasiswa di dalam dan luar negeri. Hal ini patut diapresiasi karena melalui kebijakan ini telah menghasilkan sejumlah anak Papua yang lulus dengan prestasi yang cukup membanggakan dan menjadi aset Papua di masa depan. Namun harus diingat bahwa pembangunan sektor

pendidikan tidak hanya soal pembiayaan studi untuk sebuah prestasi semata.

Komnas HAM Papua menemukan banyak persoalan yang dihadapi warga, misalnya, gedung dan fasilitas pendidikan yang belum memadai, pemalangan sekolah akibat belum dibayarkan ganti rugi atas tanah, penyebaran guru yang belum merata di setiap wilayah, honor para guru kontrak yang tidak dibayarkan, para guru PNS yang tidak melaksanakan tugasnya, tingkat buta aksara masih tinggi, layanan pendidikan bagi anak-anak usia dini belum memadai, anak-anak usia sekolah yang tidak mendapat layanan pendidikan, akses terhadap layanan dan informasi pendidikan yang relatif rendah dan berbagai persoalan lainya. Bahkan pada beberapa daerah, ada anggota Polisi dan TNI yang terpaksa harus mengajar di sekolah-sekolah karena ketiadaan guru.

Sama halnya dengan pendidikan, pemenuhan hak kesehatan belum menunjukan kemajuan yang menggembirakan, misalnya, gedung dan fasilitas kesehatan yang belum memadai, kekurangan tenaga dokter dan petugas medis, perawat, bidan di beberapa daerah, penyebaran tenaga kesehatan yang belum ditata secara baik, distribusi obat-obatan yang belum merata di setiap daerah, angka kematian yang cukup tinggi, sebaran penduduk dan pelayanan kesehatan yang tidak merata, akses terhadap layanan dan informasi kesehatan yang relatif rendah, masyarakat belum memiliki pola hidup sehat seperti mengatur jarak kelahiran, sanitasi lingkungan, asupan gizi yang berimbang, serta persoalan lainnya.

Selain beberapa persoalan di atas, ada juga permasalahan yang cukup mengkhawatirkan yakni penyebaran penyakit HIV/AIDS . Kondisi penyebaran HIV/AIDS di Indonesia seperti dilaporkan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI, pada 27 Agustus 2019, menunjukkan bahwa terjadi kenaikan jumlah kasus HIV yang dilaporkan sejak 2005 sampai dengan 2019. Papua menempati urutan keempat dengan jumlah penderita sebanyak 34.473 orang.

Maka, dapat dikatakan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan di Papua, masih menjadi masalah besar yang patut mendapat perhatian semua pihak. Perlu digagas strategi atau terobosan baru dalam menanggulangi masalah tersebut untuk meyempurnakan kekurangan atau kelemahan dari berbagai kebijakan yang sudah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya.

Komnas HAM Papua memandang bahwa sistem perencanaan pembangunan di Papua dan Papua Barat belum menunjukan penerapan prinsip-prinsip HAM atau pembangunan berbasis HAM. Hampir semua dokumen perencanaan pembangunan mengacu pada program atau janji para kepala daerah saat kampanye. Kondisi ini turut mempengaruhi perencanaan pembangunan di tingkat SKPD yang tidak berbasis pada kebutuhan masyarakat selain mengacu pada keinginan para gubernur dan para bupati dan wali kota. Di sisi lain, pada hampir semua wilayah, para aparat kampung belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola dana kampung atau dana desa. Para aparat kampung tidak dibekali secara matang mengenai perencanaan dan pengelolaan dana tersebut.

Sementara itu, isu hak ulayat masyarakat adat atas tanahnya masih terus bergejolak. Penyerobotan tanah, ganti rugi yang tidak memadai adalah sebagian persoalan klasik yang diadukan kepada Komnas HAM Papua, seperti yang terjadi di Keerom dan Merauke. Masyarakat pemilik hak ulayat kesulitan menghadapi persoalan ini karena para pelaku bisnis telah menjalin kerja sama dengan para kepala daerah tanpa adanya kesepakatan dengan para pemilik hak ulayat. Dalam kasus-kasus tertentu para pelaku bisnis cenderung meminta dukungan dari aparat keamanan. Kerap kali terjadi benturan antara masyarakat pemilik hak ulayat dengan aparat keamanan.

Berkaitan dengan perlindungan hak-hak pekerja dan hak atas pekerjaan, Komnas HAM Papua menemukan bahwa belum ada jaminan yang cukup terhadap hak-hak para pekerja, misalnya soal upah yang layak sesuai Upah Minimum Regional, dan pembentukan Serikat Buruh sebagai wadah bagi para pekerja untuk memperjuangkan hak para pekerja. Pasal 23 UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus mengamanatkan bahwa masyarakat asli Papua mempunyai keutamaan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan pendidikannya.

Namun realitas menunjukkan bahwa masih banyak generasi muda Papua usia produktif yang belum mendapat pekerjaan secara layak sesuai dengan keahliannya. Keberadaan berbagai perusahan multi nasional maupun dunia bisnis lainnya di Papua belum mampu menjawab tantangan penyerapan tenaga kerja OAP. Selain itu prinsip HAM dalam dunia bisnis belum dilaksanakan sepenuhnya oleh manajemen perusahan. Secara khusus, Prinsip Sukarela sangat penting untuk memandu perusahaan dalam melakukan penilaian risiko HAM secara

II
RASISME – TANAH PAPUA MEMBARA

A. Akar Masalah

Pertengahan Agustus 2019, menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia ke 74, pikiran dan perhatian seluruh orang Papua dihebohkan dengan isu rasisme di Surabaya. Peristiwa ini tepatnya terjadi pada Jumat, 16 Agustus 2019. Sekitar pukul 15.20 WIB sejumlah oknum anggota TNI, Polri, Satpol PP dan beberapa ormas reaksioner mendatangi Asrama Mahasiswa Papua Surabaya di Jalan Kalasan No. 10.

Kedatangan sejumlah aparat negara bersama anggota ormas reaksioner ke asrama mahasiswa Papua karena menduga anak-anak mahasiswa Papua melakukan pengrusakan bendera merah putih dengan cara mematahkan salah satu tiang dan membuang benderanya ke dalam parit. Tiang-tiang bendera ini dipasang di sepanjang jalan menjelang perayaan 17 Agustus 2019. Para mahasiswa Papua dituduh melecehkan simbol negara-bendera merah putih. Kabar pengrusakan tiang bendera merah putih di depan asrama mahasiswa Papua, Surabaya, Jawa Timur mendadak viral di media sosial.

Awalnya seorang oknum anggota TNI menggedor pintu gerbang asrama sambil melontarkan kata-kata bernada rasis. Tidak lama kemudian, puluhan orang yang diduga berasal dari ormas, ikut mengepung asrama. Aksi pengepungan yang diiringi pelemparan batu, teriakan bernada rasis terus terjadi.

Ketegangan mulai mereda ketika pihak kepolisian memutuskan untuk masuk ke dalam asrama, dengan terlebih dulu menembakan gas air mata. Sedikitnya 43 mahasiswa dibawa ke Polres untuk diperiksa. Pemeriksaan dilakukan sampai malam. Setelah itu para mahasiswa diantar kembali ke asrama. Dalam penangkapan dan pemeriksaan ini beberapa mahasiswa mengalami luka.

Sebelumnya, di Kota Malang, pada 15 Agustus 2019 sekelompok mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) menggelar demo untuk memperingati 57 tahun Perjanjian New York. Demo ini berakhir ricuh karena massa AMP dan FRI-WP merasa dihalang-halangi atau tidak diberikan ruang oleh pihak kepolisian

setempat sehingga massa marah dan bertindak anarkis.

Menanggapi peristiwa ini, Wakil Walikota Malang dalam pernyataannya menyampaikan opsi untuk memulangkan oknum mahasiswa Papua yang melakukan aksi anarkis.

Ujaran rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan rencana pemulangan oknum mahasiswa Papua dari Malang menjadi *viral* di media sosial. Banyak pihak mengecam dan mengutuk tindakan tersebut. Kemarahan di media sosial merambat ke dunia nyata. Masyarakat di Tanah Papua dan kota-kota lainnya di Indonesia menyatakan protes melalui aksi demonstrasi secara bergantian. Tanah Papua kembali membara. Letupan kemarahan itu menelan banyak korban jiwa manusia tak berdosa.

Komnas HAM Papua memandang bahwa gelombang demonstrasi besar-besaran di Tanah Papua dan kota lainnya, disebabkan pada empat hal mendasar, yakni: pertama; tuduhan yang dialamatkan kepada mahasiswa Papua sebagai pelaku pengrusakan bendera merah putih tanpa didukung alat bukti yang memadai. Kedua; ujaran bernada rasis yang dilontarkan oleh massa terhadap mahasiswa Papua. Ketiga; adanya penangkapan dan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan terhadap mahasiswa Papua. Keempat; pernyataan Wakil Walikota Malang yang berniat memulangkan oknum mahasiswa Papua yang berlaku anarkis saat demonstrasi.

Empat hal pokok inilah yang menjadi akar permasalahan dan memicu lahirnya gerakan bersama oleh mahasiswa maupun masyarakat dari berbagai kalangan di Tanah Papua dalam bentuk unjuk rasa.

B. Respon Masyarakat Papua

Dua hari setelah perayaan peringatan kemerdekaan Indonesia ke 74, masyarakat Papua yang dimotori oleh mahasiswa dan beberapa elemen pemuda dan masyarakat dari berbagai kalangan melakukan demonstrasi di beberapa kota di Tanah Papua maupun tempat lainnya.

Aksi demonstrasi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap ujaran bernada rasis, penangkapan sejumlah mahasiswa asal Papua oleh aparat yang disertai dengan dugaan tindakan kekerasan dan pernyataan Wakil Walikota Malang yang berniat memulangkan oknum mahasiswa Papua yang bertindak anarkis saat melakukan demo.

Awalnya demonstrasi dilakukan secara damai. Namun hampir

semua aksi massa berakhir anarkis. Tragis. Pembakaran, penjarahan pengrusakan dan pembunuhan mewarnai aksi massa tersebut.

Komnas HAM Perwakilan Papua mencatat sejumlah peristiwa yang terjadi sebagai bentuk reaksi masyarakat di Tanah Papua maupun di tempat lainnya, diantaranya:

1. Aksi Demo di Kota Jayapura

Warga Kota Jayapura yang tergabung dalam beberapa elemen massa yang terdiri mahasiswa, pemuda dan masyarakat melakukan aksi demontrasi sebagai ungkapan kemarahan, kecaman dan protes atas ujaran rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Aksi demo dilakukan sebanyak dua kali.

Aksi demo pertama dilakukan pada 19 Agustus 2019. Aksi ini dimotori oleh KNPI, mahasiswa dan kelompok pemuda lainnya termasuk Komite Nasional Papua Barat (KNPB) serta masyarakat umum dari berbagai kalangan.

Massa berkumpul di beberapa titik seperti, Expo, Perumnas III Waena, Lingkaran Abepura dan tempat lainnya sebelum melakukan *long march* menuju kawasan kota dengan titik akhir di kantor Gubernur Papua. Diperkirakan massa mencapai ribuan orang.

Setibanya di Kantor Gubernur, massa melakukan orasi dan menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutannya. Pada intinya massa mengutuk keras tindakan bernada rasis tersebut. Selain itu massa meminta agar pelakunya segera ditangkap dan diadili sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Selanjutnya massa menyerahkan salinan pernyataan sikap dan tuntutannya kepada Gubernur dan Ketua DPRP yang juga hadir saat itu. Sekitar pukul 18.30 massa diminta membubarkan diri dengan aman.

Aksi demontrasi kedua, dilakukan pada 29 Agustus 2019. Beberapa hari sebelumnya tersebar informasi melalui media sosial maupun selebaran yang dibagi-bagi bahwa akan diadakan aksi demo besar-besaran di Kota Jayapura.

Aksi ini dimotori oleh gabungan mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa di Jayapura dan mahasiswa dari kota studi lainnya yang telah kembali ke Jayapura (mahasiswa eksodus) serta kelompok pemuda lainnya termasuk KNPB serta masyarakat dari berbagai kalangan. Jumlah massanya mencapai ribuan orang, lebih banyak dari aksi demontrasi pertama.

Mulanya massa berkumpul di titik-titik tertentu seperti, Sentani, Waena, Lingkaran Abepura dan titik-titik lainnya. Lalu massa

melakukan *long march* menuju Kantor Gubernur Papua. Aksi ini membuat suasana Kota Jayapura mencekam, sejumlah toko atau tempat jualan maupun beberapa perkantoran yang berada di pinggir jalan tutup.

Entah apa pemicunya, massa yang melakukan *long march* itu tiba-tiba menjadi beringas. Pembakaran, penjarahan dan pengrusakan terjadi sepanjang jalan yang dilewati massa. Bangunan milik pemerintah, tempat usaha rumah toko (ruko) milik warga, rumah pribadi warga maupun kendaraan dirusak atau pun dibakar. Situasi ini tidak bisa dikendalikan oleh aparat. Kota Jayapura mencekam. Bahkan nyaris terjadi ketegangan vertikal antara Orang Asli Papua dan warga pendatang.

Massa menduduki Kantor Gubernur Papua selama tiga hari. Tuntutan atau pernyataan sikap massa bukan hanya soal respon terhadap isu rasis semata tetapi juga tuntutan ke ranah politik yakni isu Papua Merdeka.

2. Aksi Demo di Kota Sorong

Di Kota Sorong aksi demonstrasi dilakukan selama 3 hari yakni 19 – 21 Agustus 2019. Massa yang tergabung dalam Kelompok Solidaritas Masyarakat Se-Sorong Raya Peduli Mahasiswa Malang dan Surabaya melakukan aksi demontrasi sebagai bentuk kecaman dan protes atas ujaran rasis.

Aksi demo ini semula berjalan dengan damai. Namun situasi berubah secara tiba-tiba. Massa pengunjuk rasa memblokir beberapa ruas jalan protokol dan membakar ban bekas. Situasi ini tidak bisa dikendalikan oleh aparat keamanan.

Selain memblokir jalan, massa juga melakukan pengrusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas milik pemerintah maupun milik warga misalnya, Kantor DPRD, Kantor Disdukcapil, Bandara Domini Eduard Osok (DEO), dan sejumlah ruko di pinggir jalan. Aktivitas penerbangan di bandara DEO sempat dihentikan karena alasan keamanan. Dalam waktu bersamaan Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kota Sorong dibakar dan sejumlah warga binaan melarikan diri. Demi alasan keamanan, pelayanan pemerintahan di Kota Sorong dihentikan sementara.

3. Aksi Demo di Manokwari

Di Manokwari, aksi demo menentang rasis dilakukan pada Senin, 19 Agustus 2019. Aksi demo ini dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat umum dari berbagai kalangan yang dikoordinir oleh BEM Universitas Negeri Papua (UNIPA), BEM Kampus lainnya di Manokwari, Parlemen Jalanan (Parjal) Manokwari, Kelompok-Kelompok Sayap Kiri, KNPI dan beberapa kelompok pemuda lainnya.

Aksi ini dilakukan secara bersama sebagai bentuk protes dan kecaman terhadap pelaku ujaran rasis dan meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk memberi respon cepat terhadap aksi penyerangan dan tindakan rasisme terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

Awalnya aksi massa ini berjalan aman dan terkendali tetapi kemudian menjadi kacau. Massa memblokir sejumlah ruas jalan yaitu Jalan Yos Sudarso, Jalan Merdeka, Jalan Trikora, Jalan Esau Sesa, Jalan Condro Negoro, Jalan Swafen Perkebunan, Jalan Gunung Salju Amban dan Jalan Brawijaya. Massa menebang pohon untuk memblokir jalan serta membakar ban. Selain itu massa juga melakukan pengrusakan dan membakar sejumlah bangunan. Hal ini membuat situasi Kota Manokwari lumpuh dari segala aktivitas.

Pasca aksi tersebut situasi kota Manokwari lengah. Hampir seluruh aktivitas pemerintahan, persekolahan, perekonomian, bisnis maupun aktivitas warga masyarakat lainnya tidak berjalan. Masyarakat baru memulai aktivitasnya pada hari kedua setelah aksi. Namun sejumlah pertokoan dan pasar masih ditutup. Sebagian warga merasa kuatir adanya aksi susulan.

4. Aksi Demo di Deiyai

Di Deiyai aksi demonstrasi menentang rasisme dilakukan oleh massa yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Rasisme Kabupaten Deiyai. Aksi demo dilakukan sebanyak dua kali yakni 26 Agustus dan 28 Agustus 2019. Ribuan massa turun ke jalan dan memadati halaman Kantor Bupati Deiyai untuk menyatakan protes terhadap ujaran rasisme yang dilontarkan kepada mahasiswa Papua di Surabaya.

Pada 26 Agustus aksi demonstrasi dilakukan secara serempak di Paniai, Deiyai dan Dogiyai. Aksi demo ini berakhir aman. Khusus di Deiyai diwarnai pengibaran bendera bintang kejora.

Pada 28 Agustus, aksi demonstrasi berakhir ricuh. Saat itu massa berkumpul di halaman Kantor Bupati. Massa menuntut Bupati, Ketua DPRD ikut menandatangani petisi. Dalam waktu singkat massa semakin banyak datang dari berbagai penjuru. Massa melakukan *waita*

mengitari halaman kantor.

Entah apa penyebabnya, tiba-tiba terjadi bentrokan antara massa dan aparat yang diduga berawal dari halaman belakang kantor Bupati. Akibatnya, lima orang meninggal dunia, yaitu empat orang warga sipil dan satu orang anggota TNI, serta puluhan lainnya luka-luka. Selain itu 10 pucuk senjata milik aparat TNI berhasil dirampas massa.

5. Aksi Demo di Fak-Fak

Di Fak-Fak, aksi demonstrasi menentang ujaran rasisme dilakukan sebanyak dua kali yakni, pada 20 – 21 Agustus 2019. Pada 20 Agustus 2019, aksi demo berjalan dan berakhir dengan aman. Sedangkan pada 21 Agustus, aksi demo berakhir ricuh.

Pada 21 Agustus 2019, massa yang terdiri dari masyarakat dari berbagai kalangan mengawali demonstrasi dengan melempar fasilitas umum di sepanjang jalan yang dilalui. Sesaat kemudian, muncul masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih yang terdiri dari warga pendatang. Bentrokan pun tak terhindarkan.

Akibatnya, sejumlah gedung pemerintah dan fasilitas umum rusak parah seperti gedung pasar Thumburuni, Gedung Dewan Adat, Kantor Perindo, Kantor Pegadaian, Bank Papua, Bank Mega, dan lain-lain.

6. Aksi Demo di Nabire

Di Nabire massa melakukan aksi demonstrasi pada 22 Agustus 2019. Sekitar pukul 07.00 massa mulai berkumpul di beberapa titik dan melakukan *long march* menuju kantor DPRD Nabire dan berakhir sekitar pukul 14.00.

Dalam unjuk rasa ini sempat terjadi kericuhan. Pengunjuk rasa melempari petugas yang mengamankan jalannya demonstrasi. Amukan massa ini mengakibatkan kaca bagian depan gedung DPRD Kabupaten Nabire mengalami kerusakan. Pihak kepolisian berusaha meredam dengan tembakan gas air mata. Aparat keamanan berhasil mengendalikan situasi sehingga kericuhan tidak semakin meluas. Aksi unjuk rasa ini menyebabkan sejumlah perkantoran, sekolah dan toko libur.

Setelah menyampaikan tuntutannya, massa membubarkan diri secara damai. Tidak ada korban jiwa. Selain itu tidak ada pengunjuk rasa yang ditahan.

7. Aksi Demo di Mimika

Di Timika demonstrasi menentang rasisme dilakukan pada 21 Agustus 2019. Massa yang tergabung dalam kelompok Solidaritas Masyarakat Papua Kota Timika Anti Rasisme terdiri dari berbagai kalangan. Awalnya massa melakukan *long march* dari jalan Trikora, Kwamki Baru menuju Tugu Perdamaian Timika Indah. Massa terus berdatangan dan berkumpul di Timika Indah.

Selanjutnya massa bergerak menuju kantor DPRD Mimika dengan pengawalan ketat dari pihak keamanan. Saat tiba di halaman kantor DPRD Mimika, jumlah massa semakin bertamba banyak mencapai ribuan orang.

Kelompok massa ini diterima oleh para anggota DPRD Mimika dan sejumlah pejabat di Kota Timika. Massa terus melakukan orasi dan menyampaikan tuntutannya. Tiba-tiba ada lemparan ke arah para pejabat. Diduga massa kecewa dan marah karena terlalu lama menunggu kehadiran Ketua DPRD dan Bupati Mimika. Situasi menjadi ricuh. Massa melempari kantor DPRD, sejumlah kendaraan milik TNI dan Polri termasuk mobil pemadam kebakaran. Selain itu massa juga melempari sejumlah fasilitas umum di depan kantor DPRD.

Untuk mencegah kericuhan yang lebih luas, pihak keamanan membubarkan massa secara paksa. Massa yang dipaksa mundur tersebut melanjutkan aksinya dengan melakukan pengrusakan pada beberapa kantor diantaranya, Hotel Grand Mozza, KPPN, BPJS Ketenagakerjaan dan sejumlah kios dan pertokoan.

Dalam aksi ini, pihak kepolisian mengamankan 45 orang untuk dimintai keterangan.

8. Aksi Demo di Wamena

Aksi demonstrasi di Wamena, dilakukan pada 23 September 2019. Aksi massa ini tercacat sebagai aksi yang paling brutal.

Diduga berawal dari ucapan kata bernada rasis oleh seorang guru di SMA PGRI Wamena kepada salah seorang muridnya. Dugaan ujaran rasis ini ditanggapi oleh sejumlah orang yang datang ke sekolah dan meminta agar guru yang bersangkutan diproses sesuai dengan hukum.

Tak lama berselang, sekelompok massa tersebut melakukan pengrusakan di areal sekolah. Para guru memberi saran agar masalah ini diselesaikan di Polres Wamena. Saat hendak ke Polres, sekelompok

massa tadi meminta semua siswa turun ke jalan. Massa bertamba banyak di sepanjang jalan.

Dalam perjalanan massa mulai melakukan tindakan brutal. Massa melakukan pengrusakan, pembakaran, penjarahan dan penganiayaan. Kepulan asap dimana-mana. Sejumlah fasilitas pemerintahan, rumah tinggal warga dan tempat usaha warga dibakar. Sementara warga yang lainnya berusaha menyelamatkan diri.

Aksi massa ini menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak, kerusakan fasilitas umum yang cukup parah dan terjadi gelombang pengungsian besar-besaran. Wamena bagaikan kota mati.

9. Aksi Demo di Jakarta

Sejumlah mahasiswa Papua di Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme melakukan unjuk rasa pada 22 Agustus 2019.

Massa menggelar orasi di seberang Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara. Massa meminta Presiden Jokowi memastikan proses hukum terhadap para pelakunya. Rasisme tidak sekedar diselesaikan dengan saling memaafkan saja tetapi harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum pula.

Aksi saling dorong sempat terjadi antara aparat keamanan dan demonstran, sebelum mereka diijinkan berjalan menuju depan istana untuk melanjutkan unjuk rasa.

Setelah itu massa bergerak menuju Taman Pandang Istana dan melanjutkan orasinya di sana. Selain berorasi massa kemudian melepaskan bajunya dan melakukan tarian bersama yang pada intinya menyampaikan pesan perlawanan terhadap rasisme.

10. Aksi Demo di Makassar

Kerusuhan di sejumlah daerah di Papua mempengaruhi situasi di daerah lain termasuk di Makassar.

Para mahasiswa asal Papua yang bermukim di asrama, Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar melakukan perlawanan saat sejumlah aktivis ormas mendatangi asrama. Pada malam itu, aksi saling lempar batu terjadi selama kurang lebih 30 menit. Polisi akhirnya berhasil meredakan aksi tersebut.

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menjelaskan bahwa keributan itu disebabkan oleh masalah sepele. Ada

kesalahpahaman antara mahasiswa Papua dan warga. Sebenarnya maksud warga mendatangi asrama mahasiswa Papua adalah ingin menyatakan dukungan bagi mereka dan menjamin keamanan dan keselamatan mereka di Kota Makassar. Namun kedatangan warga ini tidak diterima bahkan diusir oleh para mahasiswa Papua. Situasi sempat memanas namun bisa dikendalikan oleh pihak keamanan.

11. Aksi Demo di Kupang

Di Kota Kupang, Provinsi NTT, aksi demo dilakukan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas untuk Papua-Kupang (KASPA-KUPANG NTT). Mereka menggelar aksinya pada 24 dan 25 Agustus 2019 di depan Mapolda NTT. Aksi demo ini dilakukan sebagai bentuk kecaman terhadap tindakan persekusi, represif dan ujaran rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Aksi demo semula berjalan aman, namun diwarnai ketegangan antara Kapolres Kota Kupang dengan koordinator demo maupun peserta lainnya. Hal ini dipicu oleh adanya peserta demo yang membawa atribut bendera bintang kejora dan adanya pernyataan soal referendum. Polres Kota Kupang menilai bahwa orasi-orasi yang disampaikan maupun atribut yang digunakan sudah melenceng dari kesepakatan awal sesuai dengan isi Surat Pemberitahuan yang diterima. Namun pada akhirnya aksi tersebut bisa berjalan baik dan berakhir dengan aman.

12. Eksodus Mahasiswa Papua

Ujaran kebencian bernada rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, penangkapan sejumlah mahasiswa disertai dugaan adanya kekerasan, pernyataan Wakil Walikota Malang yang berniat memulangkan oknum mahasiswa Papua yang ditanggapi oleh masyarakat Papua dengan melakukan berbagai aksi demo yang berakhir anarkis menyebabkan situasi keamanan di Papua menjadi sangat terganggu.

Menanggapi hal ini, dalam suatu kesempatan, ketika hadir dalam acara *Mata Najwa*, dalam edisi *Nyala Papua*, Gubernur Papua, Lukas Enembe membuat sebuah pernyataan yang mencengangkan banyak pihak. Gubernur Papua secara gamblang menyampaikan opsi pemulangan mahasiswa Papua apabila tidak ada jaminan keamanan bagi mereka di kota studinya.

Setelah pernyataan Gubernur Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) menyikapinya melalui sebuah keputusan yang dituangkan

dalam Maklumat MRP Nomor 05/MRP/2019, tertanggal 21 Agustus 2019 tentang Seruan Kepada Mahasiswa Papua di Semua Kota Studi Pada Wilayah Negara Kesatuan Republik Indoensia Untuk Kembali ke Tanah Papua.

Dalam Maklumat MRP tersebut menyatakan bahwa terkait dengan tindakan rasisme, kekerasan dan persekusi yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri, Ormas dan kelompok masyarakat terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, malang, Semarang dan Makasar, maka MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua yang bertanggungjawab menjaga jati diri dan identitas orang asli Papua, dengan ini menyerukan kepada mahasiswa papua bila tidak ada jaminan keamanan dan kenyamanan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan aparatur TNI/Polri di setiap kota studi maka diserukan para mahasiswa untuk dapat kembali melanjutkan dan menyelesaikan studinya di Tanah Papua.

Pernyataan Gubernur Papua diikuti Maklumat MRP menjadi angin segar bagi para mahasiswa Papua di beberapa kota studi. Belakangan para mahasiwa yang dimotori oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan eksodus besar-besaran ke berbagai kota di Tanah Papua. Jumlahnya mencapai ribuan. Belum ada data yang akurat namun jumlahnya diperkirakan 3000 orang. Kebanyakan mahasiswa eksodus tersebut memilih untuk tinggal sementara di Kota Jayapura.

C. Upaya Komnas HAM

Menanggapi peristiwa di Surabaya dalam dugaan ujaran rasial dan penangkapan sewenang-wenang terhadap sejumlah mahasiswa Papua Komnas HAM RI membentuk Tim untuk melakukan pemantauan berdasarkan amanat UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Sementara itu Komnas HAM Papua juga melakukan berbagai upaya dalam kaitan dengan merespon peristiwa di Surabaya yang berujung pada aksi-aksi demonstrasi di Tanah Papua terutama melakukan upaya pemantauan dan mediasi. Adapun upaya yang dilakukan oleh Komnas HAM RI yaitu:

1). *Komnas HAM Pusat*

Komnas HAM RI menerima Pengaduan dari Yayasan Lokataru dan beberapa perwakilan masyarakat Papua di Jakarta pada 20 Agustus 2019. Pada pokoknya, mahasiswa mengadukan

peristiwa kekerasan dan ujaran rasisme yang terjadi di asrama mahasiswa papua, di Surabaya, pada Jumat 16 Agustus 2019. Peristiwa ini diduga dipicu oleh informasi patahnya tiang bendera di depan asrama mahasiswa Papua dan diduga pelakunya adalah penghuni asrama tersebut.

Menindaklanjuti aduan tersebut, Komnas HAM RI melakukan pemantauan lapangan pada 25–27 Agustus 2019 dan meminta keterangan pada sejumlah pihak, sebagai berikut:

1. Meminta Keterangan dari LBH Surabaya

Pertemuan dengan LBH Surabaya, dilakukan pada Minggu, 25 Agustus 2019. Dalam pertemuan diperoleh beberapa keterangan sebagai berikut;

Bahwa peristiwa yang terjadi di asrama Papua, Jalan Kalasan, Surabaya, pada 16-17 Agustus 2019, tidak bisa dilepaskan dari rangkaian peristiwa kerusuhan massa Papua yang terjadi di Malang pada 14-15 Agustus 2019.

Peristiwa kerusuhan di Malang bermula dari sekelompok pemuda Papua yang hendak melakukan unjuk rasa terkait peringatan penandatanganan *New York Agreement* pada 15 Agustus 2019. Namun aksi tersebut dihalau oleh aparat kepolisian. Pihak kepolisian melakukan pembubaran paksa terhadap aksi sekelompok massa Papua saat itu, karena diduga mereka melakukan aksi tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak keamanan. Namun menurut pendamping mahasiswa, bahwa mereka telah menyampaikan pemberitahuan untuk melakukan aksi namun namun tetap tidak mendapatkan izin dari aparat keamanan.

Bahwa Peristiwa di Malang adalah isu soal pemulangan mahasiswa Papua, sementara peristiwa di Surabaya adalah isu soal rasis yang dilakukan oleh oknum aparat.

Bahwa permasalahan pengepungan asrama oleh ormas-ormas tertentu di asrama mahasiswa Papua tidak hanya terjadi pada 2019 saja, 2018 lalu juga terjadi pengepungan yang diperkirakan dalam jumlah massa yang lebih banyak dari 2019.

Berdasarkan permintaan keterangan dari para saksi, dan hasil olah TKP diperoleh informasi terkait kronologis peristiwa yang menyebutkan bahwa peristiwa ini bermula dari adanya himbauan dari pihak Kecamatan Tambaksari kepada warga untuk mengibarkan bendera merah putih termasuk juga kepada

penghuni asrama mahasiswa Papua. Selanjutnya pada 15 Agustus 2019 aparat kecamatan dan Satpol PP berinisiatif untuk memasang bendera di depan asrama. Namun setelah malam hari posisi benderanya sudah berubah.

Esok paginya 16 Agustus 2019, bendera tersebut dipasang kembali ke posisi semula dan dicor. Selanjutnya pada siang hari beberapa anggota Satpol PP menemukan bendera tersebut sudah berada diselokkan air dalam kondisi tiangnya bengkok.

Informasi ini menyebar begitu cepat. Dalam waktu singkat beberapa anggota Satpol PP bersama anggota TNI sudah berada di sekitaran asrama mahasiswa Papua.

Pada awalnya, 17 Agustus siang, ada 15 mahasiswa berada di dalam asrama. Dani, salah satu anggota LBH Surabaya bersama beberapa orang berhasil masuk. Polisi memperbolehkan Dani masuk namun menolak negosiasi dengan alasan menunggu arahan pimpinan.

Kemudian, berdasarkan laporan masyarakat pihak kepolisan Polrestabes Surabaya mendatangi asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya. Pada saat itu pihak kepolisian hendak menemui mahasiswa dan meminta keterangan terkait dugaan pengrusakan tiang bendera tersebut. Proses negosiasi terus dilakukan namun mahasiswa Papua tetap bertahan di dalam asrama dan menolak untuk dimintai keterangan.

Bahwa kemudian, pihak kepolisian melakukan tindakan paksa memasuki asrama dengan membuka paksa pintu gerbang asrama dan menembakan gas air mata dan peluru karet. Sementara di dalam asrama para mahasiswa sudah menyiapkan perlawananan kepada aparat. Dalam proses penangkapan itu sejumlah mahasiswa mengalami luka-luka.

Dalam keterangannya, pendamping menyampaikan bahwa, telah menemukan beberapa selongsong peluru karet yang diduga digunakan oleh aparat keamanan pada saat penggrebekan asrama mahasiswa dan melakukan pengeledahan serta penyitaan terhadap beberapa barang milik mahasiswa.

Awalnya, jumlah mahasiswa yang berada di asrama tersebut sebanyak 15 orang, namun pada saat penangkapan jumlahnya bertambah menjadi 43 orang. Tidak semuanya berstatus mahasiswa.

Bahwa setelah anggota polisi berhasil menduduki asrama, mereka langsung membawa semua penghuninya sebanyak 43 orang ke Polrestabes Surabaya untuk dimintai keterangan dalam status sebagai saksi atas kasus dugaan pengrusakan terhadap simbol negara/bendera.

Para penghuni asrama dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dimintai keterangan, bukan untuk diamankan. Ada 42 orang yang dimintai keterangan, 1 orang tidak dimintai keterangan karena diduga mengalami gangguan mental. Semua pemeriksaan mengarah pada pengrusakan bendera.

LBH Surabaya turut mendampingi mahasiswa Papua pada saat dilakukan pemeriksaan. Hampir semua mahasiswa dalam keterangannya menyatakan tidak tahu menahu mengenai pelaku pengerusakan bendera.

Berdasarkan informasi yang diperoleh LBH Surabaya, bahwa ada seorang tukang parkir yang melihat seseorang yang mirip seperti mahasiswa Papua telah melakukan pengrusakan tiang bendera. Saksi tersebut juga sudah diperiksa oleh pihak kepolisian.

Pada saat itu, Tim Komnas HAM ingin bertemu mahasiswa Papua. Namun para mahasiswa menolak bertemu pemerintah maupun lembaga lainnya. Komunikasi hanya bisa dilakukan melalui tim pendamping dan pihak tertentu. Para mahasiswa juga menolak bantuan dari pihak luar. Bahkan mereka yang terluka belum mendapatkan perawatan lanjutan karena adanya penolakan tersebut.

2. Meminta Keterangan dari Walikota Surabaya

Senin, 27 Agustus 2019, bertempat di Kantor Walikota Surabaya, Komnas HAM RI melakukan pertemuan bersama Muspida Kota Surabaya yang dipimpin langsung oleh Walikota Surabaya, Ibu Tri Rismaharini. Hadir pula utusan dari pihak Kodim, Danramil, Wakapolrestabes Surabaya dan jajarannya.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut; bahwa peristiwa yang terjadi di Asrama Mahasiswa Papua, di Jalan Kalasan, Surabaya, bukan kali pertama, sudah ada beberapa peristiwa sebelumnya terkait gangguan ketertiban umum dan penolakan pengibaran bendera merah putih oleh mahasiswa.

Bahwa terjadinya perubahan gaya interaksi dan pola

komunikasi yang dimiliki oleh para penghuni asrama saat ini, disebabkan karena setiap tahun ada penghuni baru yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi.

Para penghuni asrama sudah mulai menunjukkan perubahan sejak 2018 sampai saat ini. Mereka lebih cenderung tertutup dan sering melakukan aktivitas-aktivitas yang bernuansa politik.

Secara garis besar organisasi mahasiswa papua yang ada di Jawa Timur terbagi atas 3 kelompok, yakni IKBP, IPMA dan AMP. Organisasi yang terakhir ini diduga berafiliasi dengan gerakan Papua Merdeka. Sebagian besar mahasiswa penghuni Asrama di Jalan Kalasan tergabung dalam organisasi tersebut. Diduga para penghuni asrama saat ini lebih banyak berafiliasi dengan pergerakan-pergerakan Papua Merdeka seperti organisasi AMP.

Dugaan tersebut diperkuat dengan berbagai kegiatan yang sering dilaksanakan di asrama tersebut dalam bentuk diskusi-diskusi yang dihadiri oleh perserta asing. Ada dugaan bahwa para mahasiswa di Jalan Kalasan didanai dari asing dan digerakan dari luar negeri. Setiap akhir pekan mereka melakukan acara, misalnya bernyanyi bersama dan kegiatan-kegiatan lainnya sampai larut malam dan cukup mengganggu ketertiban warga di sekitar.

Pernah ada satu event kegiatan tersebut dihadiri oleh peserta dari Australia yakni Sdr. Harman Ronda Amy dan Sdr. Veronika Kumen yang saat ini berdomisili di Singapura.

Bahwa terkait pelibatan warga negara Australia dalam berbagai kegiatan politik perjuangan kemerdekaan Papua, Walikota Surabaya telah melayangkan surat keberatan kepada Kementerian Luar Negeri agar mengusut tuntas status Izin Tinggal yang bersangkutan di Indonesia.

Bahwa Pemkot Surabaya telah melayangkan surat Kepada Gubernur Papua agar memantau permasalahan tersebut dan melakukan pengawasan kepada mahasiswa Papua di Surabaya dan mengembalikan fungsi asrama mahasiswa sesuai peruntukannya. Selain itu sebagian besar penghuni asrama mahasiswa Papua sudah tidak berstatus mahasiswa atau sudah berhenti mengikuti perkuliahan.

Bahwa secara keseluruhan tercatat ada sekitar 700 sampai 1000 warga Papua yang menetap di Jawa Timur,

termasuk di Kota Surabaya. Selama ini mereka dapat hidup berdampingan secara damai, nyaris tidak adanya gesekan yang signifikan. Hal itu tidak terlepas dari berbagai upaya pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang mengajak dan melibatkan warga Papua agar ikut aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial dan budaya yang secara rutin setiap tahun diselenggarakan.

Secara garis besar ada dua motivasi warga Papua menetap di Surabaya diantaranya karena alasan untuk melanjutkan pendidikan dan untuk mencari pekerjaan. Pemkot Surabaya aktif memberdayakan warga Papua yang tinggal di Surabaya untuk peningkatan perekonomiannya.

Bahwa selama ini, Pemkot Surabaya juga memberikan perhatian khusus guna merangkul para mahasiswa yang berada di Asrama tersebut, melalui Kelurahan setempat. Pemkot Surabaya juga sering memberikan bantuan makanan, fasilitas tempat untuk berbagai aktifitas mahasiswa.

Dalam pertemuan ini, Walikota Surabaya secara langsung meminta Wakapolrestabes Surabaya untuk mengusut akun-akun media sosial yang provokatif dan menyebarkan berita hoaks. Salah satunya akun *Twitter* Surabaya Melawan.

3. Meminta Keterangan Kapolda Jawa Timur dan jajarannya

Pada 26 Agustus 2019, Komnas HAM RI melakukan pertemuan dengan Kapolda Jawa Timur dan jajarannya. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kapolrestabes Surabaya. Adapun keterangan-keterangan yang diperoleh sebagai berikut:

Bahwa pihak kepolisian dalam pengamanan terhadap penghuni asrama Papua sudah sesuai prosedur yang berlaku. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, sudah didahului dengan melakukan upaya-upaya negosiasi agar mereka mau memberikan keterangan sebagai saksi guna menemukan informasi terkait pelaku perusakan tiang bendera yang terjadi pada 16 Agustus 2019. Namun upaya negosiasi tidak berhasil, sehingga aparat keamanan membuka paksa pintu gerbang asrama.

Pada awalnya polisi hanya membutuhkan keterangan 15 orang mahasiswa Papua yang menjadi penghuni asrama, namun pihak mahasiswa Papua menginginkan mereka semua sebanyak

43 orang diperiksa. Pada akhirnya 43 mahasiswa dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dimintai keterangan. Para mahasiswa dibawa pada 17 Agustus 2019. Pada hari yang sama tepatnya pada malam hari para mahasiswa dikembalikan ke asramanya.

Bahwa terkait pemeriksaan terhadap para penghuni asrama dalam hubungannya dengan insiden pengrusakan bendera, pihak kepolisian menyatakan telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang berlaku yakni adanya Surat Perintah Pengeledahan yang didasarkan pada laporan masyarakat tentang dugaan pengrusakan tiang bendera. Selain itu pada saat diperiksa para mahasiswa didampingi oleh kuasa hukum yakni LBH Surabaya.

Bahwa Polda Jawa Timur telah membentuk tim bagi upaya penegakan hukum atas peristiwa pengrusakan bendera dan tindakan rasial.

Bahwa tim tersebut dibagi ke dalam dua gugus tugas, pertama tim yang menginvestigasi kasus insiden pengrusakan bendera yang dipimpin oleh Kapolrestabes Surabaya dan tim kedua memeriksa kasus dugaan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian berbasis diskriminasi rasial dibawa tanggung jawab Direskrimsus Polda Jatim.

Bahwa sampai saat ini masing-masing tim sedang melaksanakan proses pemeriksaan. Terkait kasus pengrusakan bendera sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 62 orang saksi. Dari 62 saksi ada 2 saksi yang mengakui bahwa telah melihat orang yang melakukan perusakan bendera, namun ciri-ciri fisiknya mereka tidak ingat dengan pasti. Dari 62 saksi yang diperiksa 42 orang di antaranya adalah saksi dari penghuni asrama, sisanya adalah masyarakat umum.

Sedangkan terhadap kasus *hoaks* dan ujaran kebencian, kepolisian telah menetapkan 9 orang saksi yang akan diperiksa, meliputi saksi pelapor dari anggota Polrestabes Surabaya dan Polsek Gubeng yang bertugas, Camat Tambaksari, anggota Satpol PP, a.n Sdr. Muhammad, Sdr. Syamsul Arifin termasuk korlap Tri Susanti. Sudah dilakukan patroli *cyber* untuk mengusut kasus tersebut.

Kepolisian juga sedang mengungkap siapa yang mengucapkan kalimat rasis kepada penghuni asrama Papua, sudah ada bukti rekaman video dan sedang diteliti oleh tim

Cyber guna pembuktian secara *scientific*.

Saat ini kepolisian sudah mengamankan barang bukti, diantaranya rekaman video dan juga HP dari Sdri. Tri Susanti, Sdr. Arifin dan Kasatpol PP.

Kapolda Jawa Timur menyatakan ada beberapa barang bukti yang belum disampaikan kepada publik, yaitu ditemukannya molotov dan anak panah. Hal ini untuk menghindari potensi aksi dari Ormas dan warga sekitar.

Pada saat melakukan penggebrekan ke asrama mahasiswa, aparat mengunakan alat-alat pengamanan juga mengunakan gas air mata serta peluru karet. Hal itu dilakukan atas peritimbangan bahwa ada dugaan kuat bahwa mahasiswa memiliki dan menyimpan bom molotov dan akan melakukan perlawanan dengan mengunakan beberapa senjata tajam seperti anak panah dan senjata lainnya.

Bahwa terkait dugaan tindak rasial yang diduga terjadi pada saat pengepungan asrama pada 16 Agustus 2019, Polda berkomitmen mengusut tuntas.

Kapolda mengharapkan peran aktif para pihak termasuk Komnas HAM melalui jaringan yang dimiliki sehingga dapat membantu kerja-kerja kepolisian guna mengungkap kasus ini khususnya upaya penegakan hukum terkait insiden pengrusakan bendera karena sampai saat ini para mahasiswa khususnya penghuni asrama di Jalan Kalasan lebih banyak menutup diri dan masih memilih bertahan di dalam asramanya. Mereka tidak mau ditemui oleh berbagai pihak. Hal tersebut menyulitkan proses pengungkapan siapa pelakunya, karena saksi dari masyarakat umum tidak dapat memastikan ciri-ciri pelakunya. Selain itu perlu didorong adanya upaya untuk saling memaafkan guna mengembalikan kondisi ini menjadi kondusif.

Berdasarkan data, fakta dan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, Komnas HAM RI menemukan hal-hal sebagai berikut:

Pertama; keberadaan beberapa oknum anggota TNI dari Koramil Tambak Sari pada saat pengepungan asrama mahasiswa pada 16 Agustus 2019 menyalahi aturan dan perlu dipertanyakan latar belakang dan dasar hukumnya. Dalam penegakan hukum terkait dugaan penistaan simbol-simbol negara menjadi kewenangan pihak kepolisian bukan aparat keamanan TNI.

Kedua; bahwa pada saat peristiwa pengepungan asrama mahasiswa Papua, kepolisian telah melakukan upaya pembubaran massa Ormas, bernegosiasi dan meminta perwakilan ormas membuat Laporan Polisi atas kasus dugaan pengerusakan simbol negara guna mencegah tindakan-tindakan anarkisme;

Ketiga; berdasarkan pengamatan melalui video yang diterima oleh Komnas HAM, bahwa pada saat pengepungan asrama ada dugaan keterlibatan oknum anggota TNI bersama-sama masa sipil turut serta melakukan ujaran kebencian dengan mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing, monyet dan lainnya yang ditujukan untuk memanggil para mahasiswa penghuni asrama tersebut.

Keempat; Komnas HAM menilai tindakan pelaku ujaran kebencian dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi ras dan etnis berupa **siar kebencian** atau ***hate speech***. Sebagaimana diatur di dalam UU No.40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, tepatnya di dalam Pasal 4 huruf (b), angka (2), bahwa "Tindakan diskriminasi ras dan etnis untuk menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis berupa perbuatan berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain." Sementara batasan mengenai ras berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No.40/2008 adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik fisik dan garis keturunan, dan etnis merupakan penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai kebiasaan, adat istiadat, norma, bahasa, sejarah, geografis dan hubungan kekerabatan;

Kelima; Komnas HAM menilai bahwa posisi penutur *hate speech* yang mana isi dan bentuk ujaran yang dilakukan dilakukan secara langsung dan mampu memprovokasi massa. Tindakan tersebut sudah memenuhi unsur tindakan diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, angka (2) UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pengahapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; Keenam; bahwa penangkapan dan pemeriksaan oleh kepolisian terhadap para mahasiswa dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang dibuktikan dengan adanya Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Pengeledahan berdasarkan persetujuan RT/RW

setempat. Selain itu sebelum dilakukan upaya paksa kepolisian juga telah melukukan beberapa tahap negosiasi dengan para mahasiswa namun gagal. Oleh karena itu, dugaan bahwa kepolisian telah melakukan penangkapan secara sewenang-wenang tidak benar-benar terjadi.

Ketujuh; bahwa Komnas HAM RI mengalami kesulitan dalam pembuktian secara menyeluruh karena pihak mahasiswa penghuni asrama masih enggan untuk bertemu. Keterangan tersebut sangat dibutuhkan oleh tim guna mengungkap dugaan tindakan diskriminasi rasial dan upaya penanganan oleh aparat penegak hukum.

Kedelapan; kepolisian Polda Jawa Timur telah melakukan upaya penegakkan hukum terkait kasus dugaan pengerusakan bendera merah putih, kasus dugaan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian berbasis rasial yang berbasis pada KUHP, UU ITE dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Atas temuan tersebut, Komnas HAM RI menyimpulkan bahwa:

Pertama; telah terjadi praktik ujaran kebencian rasial yang bertendensi diskriminasi ras dan etnis yang diduga dilakukan oleh oknum TNI bersama-sama beberapa orang masyarakat sipil pada saat pengepungan asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, pada 16 Agustus 2019.

Kedua; bahwa penangkapan dan pemeriksaan yang dilakukan Polrestabes Surabaya terhadap 43 mahasiswa Papua, pada 17 Agustus 2019 telah sesuai prosedur yang berlaku.

2). Komnas HAM Papua

Tanpa diduga sebelumnya, ternyata ujaran rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya menjadi topik hangat dan menimbulkan reaksi yang cukup mengganggu keamanan dan ketertiban umum di Tanah Papua maupun secara nasional bahkan menjadi perhatian dunia internasional. Menyikapi peristiwa ini Komnas HAM Papua telah melakukan berbagai upaya berdasarkan kewenangannya, yakni:

1. Melakukan Pemantauan di Kota Jayapura

Di kota Jayapura aksi demonstrasi dilakukan sebanyak

dua kali. Komnas HAM Papua melakukan pemantauan berdasarkan amanat UU Nomor 39 Tahun 1999 dan upaya negosiasi.

Pada 19 Agustus 2019 aksi demo pertama yang dilakukan sejumlah massa yang dimotori oleh KNPI, mahasiswa dan kelompok pemuda lainnya termasuk Komite Nasional Papua Barat serta masyarakat umum dari berbagai kalangan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap ujaran bernada rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. M

Sebelum melakukan *long march* ke kantor Gubernur, massa berkumpul di beberapa titik di Kota Jayapura, seperti Expo, Waena dan Abepura. Ketika berada di depan Hotel Metastar, Waena, Komnas HAM Papua melakukan negosiasi dengan beberapa koordinator aksi. Komnas HAM Papua meminta agar atribut bendera bintang kejora dan bendera KNPB dilepas. Negosiasi cukup alot, hingga akhirnya massa bersedia melepas atribut tersebut.



Aksi orasi massa di depan Kantor Gubernur pada 19 Agustus yang berlangsung secara damai

Setibanya di Kantor Gubernur, massa melakukan orasi dan menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutannya. Diperkirakan massa mencapai ribuan orang. Pada intinya massa mengutuk keras ujaran kebencian bernada rasis tersebut. Selain itu massa meminta agar pelakunya segera ditangkap dan diadili sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Selanjutnya

massa menyerahkan salinan pernyataan sikap dan tuntutannya kepada Gubernur dan Ketua DPRP yang juga hadir saat itu. Sekitar pukul 18.30 massa pun membubarkan diri dengan aman.

Pada 29 Agustus 2019 massa kembali melakukan aksi demonstrasi. Beberapa hari sebelumnya sudah beredar informasi melalui media sosial maupun selebaran yang dibagi-bagi bahwa akan diadakan aksi demo besar-besaran di Kota Jayapura. Komnas HAM Papua tidak bisa melakukan upaya lain selain hanya memantau, karena situasi saat itu sangat mencekam.

Aksi ini dimotori oleh gabungan mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa di Jayapura dan mahasiswa dari kota studi lainnya yang telah kembali ke Jayapura (mahasiswa eksodus) serta kelompok pemuda lainnya termasuk Komite Nasional Papua Barat serta masyarakat dari berbagai kalangan. Jumlah massanya lebih banyak dari aksi demontrasi pertama. Awalnya massa berkumpul di beberapa titik seperti, Sentani, Waena, Abepura dan titik-titik lainnya. Lalu massa melakukan *long march* menuju Kantor Gubernur Papua. Aksi ini membuat suasana Kota Jayapura mencekam, sejumlah toko maupun beberapa perkantoran yang berada di pinggir jalan tutup.

Entah apa pemicunya, massa yang melakukan *long marc* itu tiba-tiba beringas sehingga aksi demonstrasi tersebut berubah menjadi anarkis. Situasi ini tidak bisa dikendalikan oleh aparat. Pembakaran, penjarahan dan pengrusakan terjadi di sepanjang jalan yang dilewati massa. Bangunan milik pemerintah, tempat usaha rumah toko (ruko) milik warga, rumah pribadi warga maupun kendaraan dirusak atau pun dibakar. Kota Jayapura mencekam. Bahkan nyaris terjadi ketegangan vertikal antara Orang Asli Papua dan warga pendatang.



Kantor MRP yang ikut dibakar saat demo ricuh 29 Agustus 2019



Kantor Komnas HAM Papua yang ikut di rusak dan dijarah saat demo kedua yang berujung ricuh

Massa menduduki Kantor Gubernur Papua selama tiga hari. Tuntutan atau pernyataan sikap massa bukan hanya soal respon terhadap rasis semata tetapi sudah berkembang ke tuntutan yang lain yakni Papua Merdeka. Pemerintah Daerah bersama Muspida termasuk Komnas HAM Papua terus berupaya melakukan negosiasi agar massa membubarkan diri. Akhirnya massa membubarkan diri secara bertahap.

2 Melakukan Pemantauan di Kota Sorong

Menanggapi aksi demo di Kota Sorong, Komnas HAM Papua melakukan pemantauan berdasarkan amanat UU Nomor 39 Tahun 1999. Komnas HAM Papua telah bertemu sejumlah pihak untuk meminta keterangan dan meninjau lokasinya.

1) Pertemuan dengan Kapolres Kota Sorong

Tim Komnas HAM Papua bertemu Kapolres Kota Sorong di Kantor Polres Kota Sorong pada 22 Agustus 2019. Komnas HAM Papua ingin mengetahui sejauh mana skema pengamanan dan tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Polres Kota Sorong terhadap pelaksanaan aksi massa tersebut.

Dalam pertemuan tersebut Kapolres Kota Sorong, AKBP Mario Siregar, menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa pada, 18 Agustus 2019 sudah beredar informasi di

Kota Sorong tentang rencana aksi massa yang dilakukan oleh Kelompok Solidaritas Masyarakat Se-Sorong Raya Peduli Mahasiswa Malang dan Surabaya pada Senin, 19 Agustus 2019. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap ujaran rasis dan kekerasan yang dialami oleh beberapa mahasiswa Papua di Surabaya. Informasi ini dikemas dalam bentuk himbauan atau ajakan untuk melakukan aksi demo yang disebar melalui media sosial seperti *Facebook*, *WhatsApp* group dll.

Menyikapi informasi ini, Kepolisian Resort Kota Sorong menyiapkan skema pengamanan sesuai dengan protap dan berharap agar aksi massa ini bisa berjalan dengan aman, lancar dan damai.



Pertemuan dengan Kapolres Kota Sorong AKBP Mario Siregar, SIK dan Asops Kapolri Irjen Pol Martuani Sormin

Senin, 19 Agustus, sekitar pukul 12.00 massa sudah berkumpul di beberapa titik. Sekitar pukul 14.00 massa mulai mulai melakukan *long march* melewati jalan utama, Jl. Ahmad Yani.

Massa memblokir ruas jalan utama dan membakar ban bekas di sepanjang jalan. Selain itu beberapa perkantoran dirusaki dengan cara dilempar dan dibakar seperti, Kantor DPRD, Kantor Lapas dan Kantor Disdukcapil. Selanjutnya massa melakukan pelemparan di area bandara Domine Eduard Osok. Massa juga membakar salah satu toko butik (Toko Batik Papua Ilham) yang

berada tepat di pinggir jalan utama, samping Rumah Makan Wong Solo dan sejumlah kendaraan roda dua maupun roda empat.

Dalam aksi massa tersebut, Solidaritas Masyarakat Se-Sorong Raya Peduli Mahasiswa Malang dan Surabaya menyampaikan sembilan point tuntutan yang dibacakan di halaman Kantor Walikota Sorong di hadapan Walikota dan unsur muspida yang lainnya. Ada pun sembilan point tuntutan yang disampaikan tersebut yakni:

Pertama; Sejak tahun 1963-2019, Indonesia memperingati HUT kemerdekaan yang ke 74 tahun, bangsa Indonesia menyatakan secara terbuka kepada orang Papua bahwa orang Papua adalah monyet sehingga kami orang Papua keluar dari bangsa Indonesia dan berdiri sebagai suatu bangsa,

Kedua; Pemerintah Republik Indonesia segera pulangkan mahasiswa Papua dari tanah Jawa ke Tanah Papua dan pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat segera pulangkan rakyat Indonesia baik legal maupun ilegal dari Tanah Papua,

Ketiga; Mendesak Presiden Republik Indonesia mewakili segenap bangsa Indonesia segera meminta maaf kepada rakyat bangsa Papua,

Keempat; Pemerintah segera bubarkan ormas Banser dari negara Republik Indonesia,

Kelima; Negara Republik Indonesia segera tarik militer organik dan non organik dari tanah Papua,

Keenam; Biarkan monyet hidup sendiri di bangsanya sendiri,

Ketuju; Kami minta Presiden Joko Widodo segera memecat oknum anggota TNI yang mengeluarkan statement kalimat monyet terhadap mahasiswa Papua,

Kedelapan; Berikan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri (*the right of self the determination for West Papua*) kepada rakyat Papua,

Kesembilan; Apabila pemerintah Indonesia tidak mengindahkan pernyataan kami lalu melakukan hal yang sama maka kami akan duduki seluruh orang Papua dari Sorong sampai Samarai dan dengan paksa mengusir pemerintah Indonesia dari tanah Papua.

Ketika massa berada di kantor walikota, saat bertemu dengan Pemda Kota Sorong, massa sempat melakukan lemparan ke arah Walikota Sorong. Situasi saat itu cukup mengkhawatirkan sehingga aparat keamanan menembakan gas air mata untuk menghalau lemparan dan tindakan-tindakan anarkis lainnya. Setelah itu massa bisa dikendalikan.

Sementara ketika massa melakukan lemparan di areal bandara DEO, Kapolres langsung melaporkannya kepada Kapolda Papua Barat dan meminta petunjuk. Kapolda memberi petunjuk kepada Kapolres agar tetap melakukan upaya persuasif, tidak menggunakan senjata tajam namun tetap berupaya agar mengamankan bandara.

Aksi massa ini berlangsung selama tiga hari berturut-turut dari Senin hingga Rabu. Secara keseluruhan aksi massa ini tidak menimbulkan korban jiwa kecuali pengrusakan dan pembakaran beberapa perkantoran dan fasilitas publik. Selain itu, tidak ada satu orang pun dari massa tersebut yang ditahan oleh aparat kepolisian.

Terkait pengamanan dan pemulihan kondisi Kota Sorong secara keseluruhan Kapolres menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi situasi keamanan sudah ada penambahan pasukan sejumlah 6 SSK dari Polri. Kita berharap agar situasi Kota Sorong bisa segera kondusif sehingga masyarakat bisa beraktifitas seperti sedia kala.

2) Pertemuan dengan Kalapas Kota Sorong

Pada 23 Agustus 2019, Komnas HAM Papua mendatangi kantor Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sorong dan bertemu Kalapas, Nunus Ananto. Dalam pertemuan tersebut, Kalapas menyampaikan kronologis sebagai berikut:

Senin, 19 Agustus 2019 kira-kira pukul 15.00 sudah mulai ada pergerakan massa melakukan unjuk rasa. Sekitar pukul 16.00 menjelang penguncian blok tahanan, saya melihat dari arah samping sebelah kanan Lapas ada lemparan batu dalam jumlah yang sangat banyak dari luar, mengarah ke dalam lapas ke arah blok hunian para warga binaan dan tahanan. Para penghuni Lapas terprovokasi sehingga melakukan perlawanan dengan membalas lemparan keluar.

Dalam situasi seperti ini saya bersama staf berusaha untuk menjaga pintu utama, pintu I dan pintu III. Namun situasi semakin terdesak oleh para warga binaan dan tahanan, lalu saya mengarahkan pegawai ke pintu II agar langsung dikunci. Ternyata para penghuni lapas keluar dari blok menuju pintu III. Akhirnya Pintu III jebol. Lalu saya perintahkan semua staf jaga untuk segera mengamankan pintu I. Setelah dikunci, kami semua siaga di pintu utama. Pada saat kejadian pegawai yang bertugas berjumlah 7 orang yakni Kepala Seksi Pembinaan, Kepala Seksi Kamtib, KPLP dan beberapa pegawai. Setelah mulai ricuh pegawai Lapas yang berada di rumah dinas datang bergabung dengan kami.

Namun tiba-tiba dari arah ruangan registrasi perkantoran temboknya jebol. Padahal saat itu warga binaan baru menuju ke pintu III. Namun demikian saya tidak berani memberikan statemen apakah pagar tembok tersebut dijebol dari arah luar. Namun faktanya, runtuhan batu-batu tembok tersebut ke arah dalam Lapas.

Akhirnya para penghuni menyebar ke arah pintu perkantoran registrasi dan keluar lewat dinding tembok sebelah kanan yang sudah dijebol.

Mengenai sumber atau titik api saya tidak bisa memberikan klarifikasi, karena saat itu saya tidak melihat secara langsung, kami masih bertahan dan siaga di pintu utama. Sepintas saya melihat kepulan asap dari arah ruang registrasi, entah dari luar atau dari dalam saya tidak tau secara pasti.

Saat peristiwa ini terjadi saya terus berkoordiansi dengan pihak keamanan yakni Kapolres dan Komandan Kodim. Namun saat itu Kapolres sedang menangani massa sehingga beberapa kali panggilan telepon tidak dijawab.

Untuk saat ini aspek pengamanan sudah cukup. Kami mendapat dukungan dari Komandan Kodim Sorong dengan menempatkan 5 personil setiap harinya bergantian sesuai piket. Ada juga dukungan dari Brimob sebanyak kurang lebih 12 sampai 18 orang.

Sementara itu aspek pelayanan admnistrasi tetap aman karena kami sudah memiliki back up data yang baik. Administrasi terkait pembebasan para warga binaan tetap dilayani seperti biasa. Sejak hari pertama setelah peristiwa ini terjadi sampai sekarang sudah ada 4 orang yang dibebaskan.

Jumlah para warga binaan dan tahanan sebanyak 547 orang.

Data per hari ini (23 agustus 2019) dikurangi 4 yang dibebaskan berjumlah 543 orang. Sementara saat ini penghuni yang sudah ada sebanyak 279 orang. Sisanya sebanyak 264 belum kembali. Saat ini kami upayakan melalui Tim Terpadu bersama kepolisian. Kami telah membuka posko khusus untuk memudahkan komunikasi dengan pihak keluarga warga binaan. Kita berharap agar para warga binaan bisa kembali ke Lapas.

Selanjutnya Kalapas menyampaikan bahwa sampai saat ini belum bisa dipastikan, apakah peristiwa di lapas ini ada hubungannya dengan aksi massa di Kota Sorong atau tidak. Tetapi melihat dari situasi yang ada saat itu, kami menduga ada hubungan dengan aksi massa tersebut.

3) Pertemuan dengan Pemda Kota Sorong

Pertemuan ini berlangsung di Kantor Walikota Sorong yang di pimpin oleh Asisten II Setda Kota Sorong bersama Staf Ahli Walikota Sorong dan Kabag Humas Pemerintaan Kota Sorong.

Hal-hal yang dibahas menyangkut situasi dan kondisi pemenuhan HAM pasca unjuk rasa. Pada prinsipnya Pemda Kota Sorong sangat intens dan serius dalam menyikapi persoalan ini.

Pada kesempatan tersebut Asisten II menyampaikan bahwa aksi massa ini berlangsung selama tiga hari. Secara moral, seluruh oarang Papua merasakan apa yang terjadi di Surabaya, Malang, dan Semarang. Siapapun manusia di dunia ini apabila disebut dengan sebutan "monyet" pasti marah. Unjuk rasa ini dilakukan secara spontanitas. Hal ini perlu dipertegas agar tidak meluas ke mana-mana. Massa yang melakukan aksi unjuk rasa ini murni karena dorongan atas sikap marah terhadap ujaran rasis tersebut. Aksi massa ini menyebabkan pelayanan pemerintah di Kota Sorong dihentikan sementara.

Aksi massa pada Senin, 19 Agustus 2019 adalah aksi yang terjadi secara spontanitas karena situasi, terkait harga diri orang Papua. Aksi ini boleh dibilang demo damai karena berjalan aman sampai di halaman kantor Walikota Sorong dan bertemu walikota secara baik. Sebelum memberikan kesempatan kepada Walikota para pengunjuk rasa membacakan pernyataan sikap setelah itu menyerahkannya kepada Walikota Sorong.

Senin, 19 Agustus 2019 tidak ada palang memalang di sepanjang jalan maupun fasilitas umum. Selasa, 20 Agustus 2019 ada 2 undangan atau surat pemberitahuan bahwa ada 2 kegiatan

yaitu hari Selasa dan Rabu untuk mengajak masyarakat berkumpul kembali melakukan unjuk rasa dengan titik kumpul mulai dari Sorpus Kampung Baru sampai Kilometer 12 Kota Sorong.

Selasa 20 Agustus 2019, kondisi mulai memanas yang mengakibatkan pembakaran dan pengrusakan. Masa melanjutkan perjalanan ke Kantor Walikota Sorong dan bertemu Forkopimda Kota Sorong. Pada saat itu tidak ada pernyataan sikap.

Pada Rabu, 21 Agustus 2019, masa kembali berkumpul dan melakukan unjuk rasa tetapi terkoodinir dengan baik.

Terkait aspek kambtibmas kami berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat. Namun menyangkut penambahan pasukan, Walikota Sorong tidak memintanya. Saat ini sudah ada penambahan pasukan tetapi atas kebijakan negara untuk menjaga dan memulihkan kondisi keamanan sehingga pemenuhan HAM bisa berjalan dengan aman pula.

Walikota Kota Sorong terus berkoordinasi dengan Forkompimda dan semua pihak yang berkepentingan di Kota Sorong. Terkait pemulihan kondisi Kota Sorong, terutama terkait pengrusakan dan pembakaran, Walikota telah memberikan instruksi agar segera dilakukan pendataan terhadap aset-aset pemerintahan, fasilitas publik, objek vital atau pun tempat usaha pribadi yang rusak. Setelah diidentifikasi kami segera memperbaiki secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.

4) Meninjau beberapa lokasi

Komnas HAM Papua meninjau beberapa lokasi yang mengalami kerusakan seperti, Bandara Domini Eduard Osok (DEO), Kantor Lapas, Kantor DPRD dan Kantor Disdukcapil.

Secara keseluruan, bandara DEO mengalami kerusakan pada bagian depan, area keberangkatan, beberapa kaca hancur. Terlihat beberapa bagian jendela kaca yang hancur, sudah ditutup sementara dengan tripleks. Selain itu, pos satpam berukuran kecil yang berada di pintu keluar bandara menuju jalan raya utama juga dirusak.

Aktivitas penerbangan tetap berjalan normal seperti biasa. Namun tampak aparat keamanan lengkap dengan senjata masih

siaga di area sekitar bandara.



Kantor DPRD Kota Sorong yang dibakar oleh pendemo

Sementara itu di kantor Lapas, dapat digambarkan bahwa hampir seluruh ruang perkantoran Lapas terbakar habis. Hanya tersisa barak-barak atau sel bagi para warga binaan dan tahanan. Beberapa bagian tembok dijebol dari dalam maupun dari luar.

Saat ini sudah dilakukan upaya jangka pendek dengan cara, menutup kembali bagian tembok yang dijebol termasuk jendelanya dengan bahan seadanya. Selain itu Kalapas meminta pihak PLN untuk melakukan sambungan listrik sementara menunggu perbaikan jaringan listrik secara keseluruan.

Suplay makanan untuk kebutuhan para warga binaan dan tahanan mengalami kendala karena beras yang berada di gudang pun ikut terbakar habis. Untuk sementara, Kalapas telah berkoordinasi dengan Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat untuk mendukung pemenuhan kebutuhannya.

Karena pertimbangan keamanan, Kalapas meminta dukungan pengamanan dari TNI maupun Polri. Tampak di area Lapas beberapa anggota TNI dan Brimob lengkap dengan senjata berjaga-jaga.

Gedung DPRD Kota Sorong pun tidak luput dari amukan massa. Beberapa ruangan yang berada di lantai 1 dibakar. Diantaranya Ruangan Ketua, Ruangan Waket I, Ruangan Waket II, Ruangan Sekwan terbakar habis. Api sempat menjalar ke lantai II, beruntung saja cepat dipadamkan.

Hampir semua bagian jendela kaca di bagian depan maupun

belakang kantor lantai I dan sebagian di lantai II hancur akibat lemparan massa. Massa juga membakar satu buah mobil dan duah buah sepeda motor yang diparkir di halaman kantor DPRD.

Tidak ada satu pun pimpinan dewan atau para pegawai yang ditemui oleh Tim Komnas HAM Papua. Menurut informasi saat peristiwa terjadi, semua anggota dewan bersama Sekwan sedang berada di Jakarta. Sedangkan para pegawai tidak masuk kantor karena alasan keamanan.

Tampak bagian depan kantor DPRD Kota Sorong, anggota Brimob lengkap dengan senjata dan beberapa anggota TNI sedang berjaga-jaga.

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong yang berada di belakang kantor Walikota juga mengalami kerusakan. Hampir semua jendela kaca hancur akibat dilempar massa.

Saat Tim Komnas HAM Papua mendatangi Kantor Disdukcapil, tampak para tukang sedang melakukan perbaikan yakni menutup atau menambal lubang jendela tersebut menggunakan tripleks. Sedangkan para pegawai membersihkan pecahan-pecahan kaca.

Salah seorang pegawai menyampaikan bahwa semuanya terjadi begitu cepat. Massa yang melewati jalan di depan kantor tiba-tiba saja melakukan lemparan ke arah kantor.

3. Melakukan Pemantauan di Manokwari

Di Kota Manokwari aksi demo menentang rasis dilakukan pada Senin, 19 Agustus 2019. Massa yang terlibat dalam aksi ini terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum dari berbagai kalangan. Aksi massa ini dikoordinir oleh sejumlah organisasi diantaranya BEM Universitas Negeri Papua (UNIPA) dan juga beberapa BEM Kampus di Manokwari, Parlemen Jalanan (Parjal) Manokwari, Kelompok-kelompok Sayap Kiri, KNPI dan beberapa kelompok pemuda lainnya.

Pertemuan dan gagasan untuk pelaksanaan aksi dilakukan di Gedung Dewan Adat. Pada intinya pihak adat mendukung sepenuhnya rencana aksi damai untuk memberi dukungan terhadap mahasiswa di Surabaya dan Malang.

Aksi ini dilakukan secara bersama sebagai bentuk protes dan kecaman terhadap pelaku ujaran rasis dan meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk memberi respon cepat terhadap aksi penyerangan dan tindakan rasisme terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

Dalam rapat persiapan, disepakati bahwa tidak boleh melakukan tindakan anarkis. Alurnya, semua massa berjalan bersama-sama dan kemudian menyampaikan dan menyerahkan seruan dan pernyataan sikap kepada Pemerintah.

Awalnya aksi massa ini berjalan aman dan terkendali tetapi kemudian menjadi kacau. Massa memblokir sejumlah ruas jalan yaitu Jalan Yos Sudarso, Jalan Merdeka, Jalan Trikora, Jalan Esau Sesa, Jalan Condro Negoro, Jalan Swafen Perkebunan, Jalan Gunung Salju Amban dan Jalan Brawijaya. Pemblokiran jalan protokol dilakukan dengan menebang pohon serta membakar ban. Selain itu massa juga melakukan pengrusakan dan membakar sejumlah Ruko (rumah toko) serta membakar beberapa gedung Pemerintahan. Hal ini membuat situasi Kota Manokwari lumpuh.



Kantor lama Gubernur Papua Barat yang dibakar

Menurut keterangan Parlemen Jalanan Masyarakat Papua Barat, aksi yang dilakukan pada 19 Agustus 2019 sudah direncanakan dari semalam dan hasil rapat langsung di upload di *Facebook* dan di share di komunitas grup-grup *whatssap*. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa tidak ada aksi tambahan selain aksi damai. Namun faktanya berbeda, hal ini disebabkan

karena massa emosi melihat *drone* yang melintas-lintas di atas kepala mereka. Massa marah dan menjadi anarkis lalu membakar beberapa bangunan dan merusak serta melempari kaca-kaca dengan batu. Massa juga menjarah beberapa pertokoan.

Dalam aksinya massa menyampaikan dua pokok pernyataan sikap yaitu:

Pertama; Permintaan maaf secara terbuka oleh pihak-pihak yang diduga mengintimidasi Mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang termasuk kepada Wakil Walikota Malang untuk mencabut pernyataan memulangkan Mahasiswa Papua di Malang.

Kedua; Permintaan maaf atas sebutan monyet yang dilontarkan oleh sejumlah oknum anggota Ormas saat penggrebekan di Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya.

Mempertimbangkan aspek keamanan dan ketertiban umum maka Forkompimda Provinsi Papua Barat segera berupaya melakukan negosiasi dengan massa diantaranya Pangdam XVIII Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau, Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak dan Wakil Gubernur Mohamad Lakatoni. Namun upaya negosiasi tersebut belum menemui kata sepakat. Massa melempari aparat kemanan dengan batu, kayu dan botol minuman. Aparat merespon dengan tembakan peringatan dan tembakan gas air mata. Dua orang warga sipil diduga terkena serpihan tembakan.



Kegiatan pemantauan kondisi gedung yang terbakar

Akhirnya situasi berhasil diredam karena massa bersedia bertemu dengan Wakil Gubernur untuk menyampaikan aspirasinya dan meminta agar aspirasi tersebut diteruskan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Pasca aksi tersebut situasi kota Manokwari lengah. Hampir seluruh aktivitas pemerintahan, persekolahan, perekonomian, bisnis maupun aktivitas warga masyarakat lainnya tidak berjalan. Masyarakat baru memulai aktivitasnya pada hari kedua setelah aksi. Namun sejumlah pertokoan dan pasar masih ditutup. Sebagian warga merasa kuatir adanya aksi susulan.

Demi alasan keamanan, terjadi penambahan pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) dari Kepolisian dan juga TNI dalam rangka pengamanan keadaan pasca aksi demo.

4. Melakukan Pemantauan di Fak-Fak

Aksi demonstrasi menentang ujaran rasisme juga terjadi di Kabupaten Fakfak. Aksi demonstrasi dilakukan sebanyak dua kali yakni, pada 20 dan 21 Agustus 2019. Pada 20 Agustus 2019, aksi demo berjalan dan berakhir dengan aman. Sedangkan pada 21 Agustus, aksi demo berakhir ricuh.

Menanggapi aksi demo di Kota Sorong, Komnas HAM Papua melakukan pemantauan berdasarkan amanat UU Nomor 39 Tahun 1999. Komnas HAM Papua bertemu sejumlah pihak untuk meminta keterangan.

1) Bertemu Kapolres Fak-Fak

Pada 23 September 2019, Komnas HAM Papua bertemu dengan pihak Kepolisian Resort Fak-Fak untuk memintai keterangan. Polres Fak-Fak melalui Kasat Reskim telah menyampaikan sejumlah informasi kepada Komnas HAM Papua. Dalam keterangannya, Kasat Reskrim menyampaikan bahwa demonstrasi menentang rasisme berlangsung selama dua hari, yaitu pada 20 Agustus 2019 berlangsung aman, dan pada 21 Agustus 2019 berakhir ricuh.

Polres Fak-Fak pada dasarnya tidak memberikan ruang bagi massa untuk melakukan aksinya yang kedua karena sudah menduga dan mengidentifikasi bahwa akan ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan yang berbeda yakni isu Papua Merdeka.

Pada 21 Agustus 2019 massa mengawali demonstrasi dengan

melempar fasilitas umum di sepanjang jalan yang dilalui. Massa dalam jumlah yang sangat banyak.

Saat itu pihak kepolisian tetap melakukan pengamanan dan berupaya dengan pendekatan persuasif. Kekuataan aparat saat itu sekitar 200 personil Polri yang di backup TNI. Jumlah aparat tidak sebanding dengan jumlah massa.

Kemudian, muncul masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih sehingga terjadi bentrok dengan kelompok penduduk asli.

Akibatnya, terjadi pengrusakan pada sejumlah gedung pemerintah dan fasilitas umum seperti gedung pasar Thumburuni, Gedung Dewan Adat, Kantor Perindo Kabupaten Fakfak, Kantor Pegadaian, Bank Papua, Bank Mega, ATM BNI dan ATM Bank Mandiri.

Untuk meredam aksi massa yang kian anarkis, polisi melakukan tindakan pembubaran aksi masa dengan tembakan gas air mata dan peluru hampa. Akibatnya salah satu orang mengalami luka serius dan saat ini sudah dirujuk ke salah satu rumah sakit di di Makasar.

Untuk menjamin kondisi kemanan bagi warga, pihak kepolisian melalui Bimas dan Brimob mendatangi sejumlah kampung untuk memberikan pengertian bahwa keadaan sekarang sudah aman dan agar saling menjaga kedamaian.



Pertemuan bersama Kasat Reskrim Polres Fakfak

Dalam peristiwa ini, pihak kepolisian menahan tiga orang dengan status tersangka dalam dugaan kasus pengrusakan, pembakaran dan kasus makar dengan inisial JE, MT dan RR.

2) Bertemu Direktur RSUD Fak-Fak

Komnas HAM Papua juga bertemu dan meminta keterangan dari pihak RSUD Fak-Fak. Menurut Direktur RSUD Fak-Fak, bahwa saat itu hanya ada satu pasien yang dirawat inap bernama Manarson Ndrot Ndrot, umur 20 tahun.

Korban ditemukan di sekitar kantor Bank Papua pada 21 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00. Hasil diagnosa medis menunjukan bahwa korban terkena benda tajam di daerah perut sampai menembus usus dan saluran kemih. Karena itu secara medis segera dilakukan penanganan operasi sebanyak dua kali. Selanjutnya korban dirujuk ke salah satu rumah sakit di Kota Makassar. Biaya penanganan, perawatan dan rujukan bagi korban bersumber dari dana BPJS dan bantuan dana dari RSUD Fakfak bersama Pemda.

Hingga kini pihak RSUD Fak-Fak maupun pihak kepolisian setempat belum bisa memastikan apa penyebabnya yang mengakibatkan kondisi korban separah itu.

3) Bertemu Pemda Fak-Fak

Komnas HAM juga bertemu dan meminta keterangan kepada Pemda Fak-Fak yang diwakili oleh Asisten II.

Asisten II menjelaskan bahwa setelah peristiwa itu terjadi Pemda merespon dengan menerbitkan pengumuman mengenai keadaan darurat, terutama pada segi keamanan.

Demonstrasi berakhir rusuh ini telah menimbulkan kekacauan dan kerusakan yang cukup parah. Misalnya kebakaran di pasar Thumbui dimana ada sekitar 1021 los/lapak pedagang yang mengalami kerugian. Untuk sementara kita upayakan agar mereka berjualan di tempat seadanya di sekitar jalan pasar.

Pada 31 Agustus 2019, bertempat di Rumah Negara, Pemda Kabupaten Fakfak melakukan upaya rekonsiliasi dengan beberapa elemen diantaranya Dewan Adat Fak-Fak, Aliansi Merah Putih, dan para kepala kampung dengan mekanisme proses adat dan dilandasi dengan semangat yang terpatri dalam semboyan "1 tungku 3 batu". 1 Tungku 3 batu memiliki makna bahwa di Kabupaten Fak-Fak memiliki masyarakat yang majemuk yang

terdiri dari berbagai agama, suku maupun etnis. Proses rekonsiliasi tersebut dipadukan dengan prosesi adat yang ditandai dengan cara penyembelihan 3 kambing dan doa bersama untuk perdamaian.

Dalam upaya rekonsiliasi yang diinisiasi oleh Pemda tersebut telah lahir semangat dan komitmen baru dari masing-masing pihak untuk mengakhiri konflik dan hidup berdampingan secara damai. Pemda Fak-Fak berencana, dalam waktu dekat menggelar pertemuan bersama melibatkan semua unsur lapisan masyarakat sehingga bisa melahirkan konsensus bersama untuk kepentingan bersama.

Selain itu untuk aspek pemulihan kondisi, Pemda telah menyurati Presiden RI agar dilakukan penanganan secara terpadu. Presiden RI telah merespon permintaan Pemda dan memerintahkan Kementerian Keuangan, PUPR dan Kementerian Sosial untuk melakukan normalisasi pasca kerusuhan tersebut.



Kondisi Pasar Tumburuni yang hangus setelah dibakar masa saat aksi demo

5. Melakukan Pemantauan di Deiyai

Di Kabupaten Deiyai aksi demonstrasi menentang rasisme dilakukan oleh massa yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Rasisme Kabupaten Deiyai. Ribuan massa turun ke jalan untuk menyatakan protes terhadap ujaran rasisme yang dilontarkan kepada mahasiswa Papua di Surabaya. Aksi demo dilakukan sebanyak dua kali yakni 26 Agustus dan 28 Agustus 2019. Pada 26

Agustus aksi demonstrasi berakhir aman. Sementara pada 28 Agustus 2019 aksi demonstrasi berakhir ricuh. Empat orang warga sipil dan satu anggota TNI dinyatakan meninggal dan puluhan lainnya luka-luka.

Menanggapi aksi demo di Deiyai, Komnas HAM Papua melakukan pemantauan berdasarkan amanat UU Nomor 39 Tahun 1999. Komnas HAM Papua telah bertemu sejumlah pihak untuk meminta keterangan dan meninjau lokasinya.

1) Bertemu Pastor Santon Tekege

Dalam pertemuan tersebut, Pastor Santon Tekege menjelaskan bahwa; demonstrasi menentang rasisme dalam bentuk aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat bukan hanya terjadi di Deiyai saja. Pada 26 Agustus 2019 aksi damai dilakukan secara serempak di Paniai, Deiyai dan Dogiyai. Pada intinya massa menyampaikan sikapnya yakni menentang keras segala bentuk rasisme dan menuntut dilakukannya referendum. Aksi damai ini dikawal oleh pihak kepolisian sampai selesai.

Aksi damai di tiga wilayah ini berjalan dengan aman. Namun di Deiyai aksi damai tersebut diwarnai dengan berkibarnya bendera Bintang Kejora. Kejadian ini berlangsung selama kurang lebih 1 jam.

Berkibarnya bendera Bintang Kejora ini diluar kendali atau kesepakatan massa Front Rakyat Anti Rasisme dengan kelompok yang menaikan bendera. Dalam aksi ini, massa menuntut Bupati Deiyai, Ketua DPRD Deiyai dan Tokoh Adat agar turut menandatangani petisi yang sudah dibuat Front Rakyat Anti Rasisme.

Pada 28 Agustus massa kembali turun ke jalan. Saat itu massa sudah berada di area kantor Bupati sambil melakukan *waita* mengitari halaman kantor Bupati maupun di luar. Tiba-tiba ada mobil *fortuner* putih yang melintasi jalan di belakang kantor Bupati menabrak salah seorang massa bernama Justinus Takimai. Pengendara mobil tersebut diduga aparat keamanan yakni dua orang tentara dan dua orang polisi.

Tabrakan inilah yang memicu terjadinya aksi anarkis. Massa marah dan melakukan bentrokan dengan aparat yang saat itu berada di depan Gedung Kantor Bupati.

Saat itu situasi sulit dikendalikan. Anggota Polres Paniai mengeluarkan tembakan peringatan dan tembakan gas air mata. Situasi malah semakin anarkis. Terdengar bunyi tembakan dari beberapa arah, dari arah belakang dan seputaran depan kantor bupati. Akibatnya empat orang warga sipil dan satu orang anggota TNI meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Aparat kepolisian telah menangkap dan menahan sembilan orang untuk dimintai keterangan.

2) Bertemu para tahanan di Polres Paniai

Pertemuan dilakukan di ruangan tahanan Polres Paniai. Komnas HAM Papua bertemu dengan sembilan orang yang diduga sebagai penanggung jawab aksi demo di Deiyai. Mereka menyampaikan keterangannya sebagai berikut:



Bertemu para tahanan di Polres Paniai

Aksi damai ini kami lakukan sebagai bentuk protes dan perlawanan terhadap ujaran rasisme. Kami tergabung dalam Front Rakyat Anti Rasisme dengan Koordinator Utama Yulianus Mote dan Koordinator Lapangan Sem Pigay.

Sebelum aksi pertama, 26 Agustus 2019, kami telah melakukan rapat persiapan pada 25 Agustus 2019. Dalam rapat kami membahas mengenai persiapan, pembagian tugas dan diakhiri dengan pembacaan tuntutan. Ada beberapa point tuntutan, diantaranya, menentang rasisme, menuntut referendum dan mendirikan monumen berbentuk monyet di Tigido, Deiyai.

Pada rapat persiapan tersebut, kami sepakat agar dalam aksi nanti semua peserta yang jumlahnya kira-kira seratus orang berada dalam satu komando. Tidak ada pembahasan mengenai pengibaran bendera bintang kejora.

Aksi pertama, 26 Agustus 2019 kami lakukan sesuai dengan kesepakatan rapat. Ketika berada di halaman kantor Bupati Deiyai, kami membuat tali komando dan semua peserta aksi berada dalam satu komando. Namun tiba-tiba ada kelompok yang datang membawa bendera bintang kejora dan bendera KNPB.

Secara tiba-tiba massa membawa bendera KNPB, memaksa untuk menaikan bendera bintang kejora. Kami sempat melarang namun kami diancam dengan menggunakan panah. Bendera bintang kejora pun berkibar kurang lebih 30 menit di depan halaman kantor Bupati Deiyai. Dalam keadaan demikian kami tetap meminta agar bendera bintang kejora diturunkan, akhirnya berhasil diturunkan.

Setelah bendera bintang kejora diturunkan, kami membaca tuntutan dan meminta agar pihak Pemda ikut menandatanganinya. Namun karena sudah sore permintaan tersebut tidak dilaksanakan. Akhirnya kami bubar dengan aman.

Sedangkan aksi kedua, 28 Agustus 2019, kami lakukan rapat persiapan pada, 27 Agustus 2019. Pada intinya kami membahas soal pembagian tugas dan bersepakat agar Pemda dalam hal ini Bupati dan Ketua DPRD maupun tokoh adat turut menandatanginya. Semua peserta tetap dalam satu komando.

Pagi itu, 28 Agustus 2019, sekitar pukul 08.00 kami sudah berkumpul di halaman Kantor Bupati Deiyai. Kami berjumlah sekitar 100 orang dan posisi berada dalam tali komando. Sekitar pukul 12.30 massa mulai berdatangan dari dua arah yakni jalan depan dan jalan belakang kantor Bupati dalam jumlah yang sangat banyak mencapai ribuan orang.

Kami meminta mereka agar masuk dalam tali komando. Massa tidak mendengar arahan kami tersebut karena jumlahnya sangat banyak. Karena berdesakan, akhirnya tali komando putus. Di luar halaman kantor bupati pun ada massa dalam jumlah yang banyak pula. Saat itu massa sangat sulit untuk dikendalikan. Saat itu massa melakukan *waita* mengitari halaman kantor bupati. Massa membawa panah terutama yang berpakaian adat *koteka*.

Massa yang berada di luar kantor bupati pun melakukan *waita*.

Secara tiba-tiba terjadi bentrokan dengan pihak aparat. Kami tidak tahu apa penyebabnya. Aparat langsung menembak gas air mata ke arah kami. Kami langsung tiarap dan yang lainnya lari menyelematkan diri. Setelah peristiwa ini terjadi baru kami tahu bahwa ada yang meninggal dunia dan luka-luka.

Setelah itu polisi menangkap dan menahan kami dalam hubungan dengan peristiwa tersebut. Kami sudah mendapat penjelasan tentang alasan penangkapan dan penahanan tersebut. Terhadap kami disangkakan undang-undang darurat dan menyerang aparat saat melaksanakan tugas.

Sejak kami ditangkap dan ditahan kami diperlakukan secara baik. Salah satu dari kami yang ditahan ini memiliki riwayat sakit asma dan pihak kepolisian rutin melakukan pemeriksaan baginya di rumah sakit.

3) Bertemu Kapolres Paniai

Komnas HAM RI Perwakilan Papua juga meminta keterangan dari Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Paniai. Dalam keterangannya, Kasat Reskrim menyampaikan informasi sebagai berikut:

Aksi damai di Deiyai dilakukan sebanyak dua kali. Pertama dilakukan pada, 26 Agustus 2019 di halaman kantor Bupati Deiyai. Dalam aksi ini kami melaksanakan tugas untuk melakukan pengamanan sesuai dengan SOP.

Dalam rangka pengamanan tersebut, Kapolres, mengingatkan agar selalu mengedepankan pendekatan budaya atau kearifan lokal. Setiap anggota yang bertugas di lapangan agar tetap persuasif. Kami bersyukur karena aksi tersebut berjalan dengan damai, meskipun diwarnai dengan pengibaran bendera bintang kejora, namun kami tetap berupaya agar tidak melakukan upaya paksa.

Aksi kedua, 28 Agustus 2019 masih dilakukan di tempat yang sama yakni halaman kantor bupati Deiyai. Aksi ini melibatkan massa yang sangat banyak, sangat tidak sebanding dengan jumlah aparat yang melakukan pengamanan. Dalam keadaan tersebut kami berkomunikasi dengan Kapolres dan meminta petunjuk dan arahan. Kapolres tetap meminta agar pengamanan dilakukan

secara persuasif.

Namun secara tiba-tiba, terjadi bentrokan dari arah jalan belakang Kantor Bupati dan massa mulai memaksa masuk menuju halaman bagian dalam. Aparat tetap dalam barisan sambil mundur secara perlahan-lahan.

Tiba-tiba saja terdengar bunyi tembakan dari arah belakang kantor Bupati, tembakan diarahkan menuju ke arah aparat. Selain bunyi tembakan massa melempar dan memanah secara membabi buta. Polisi langsung menembakan gas air mata dan tembakan peringatan. Namun massa semakin beringas melakukan perlawanan.

Akibatnya, satu anggota TNI meninggal dunia akibat dikampak massa. Beberapa anggota polisi dan TNI luka-luka. Dalam situasi tersebut kami berupaya untuk melakukan perlawanan sambil yang lainnya mengevakuasi para korban.

Peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba tanpa ada tahapan-tahapan yang dilalui misalnya negosiasi dan lain-lain. Dalam peristiwa tersebut ada 10 pucuk senjata milik TNI yang berhasil dirampas oleh massa. Diduga massa menembak menggunakan senjata hasil rampasan tersebut.

Setelah peristiwa ini, kami melakukan penangkapan dan penahanan terhadap sembilan orang yang diduga sebagai penanggung jawab kegiatan aksi damai tersebut untuk dimintai pertanggung jawaban secara hukum.

4) Bertemu Direktur RSUD Madi

Komas HAM RI Papua menemui pihak RSUD Madi untuk dimintai keterangannya. Selain itu Komnas HAM Papua juga bertemu beberapa korban yang di rawat di RSUD Madi di Enarotali.

Dalam pertemuan tersebut pihak RSUD Madi menyampaikan informasi bahwa RSUD Madi hanya menerima korban yang dievakuasi akibat kerusuhan Deiyai. Dalam pelayanan kami tidak membedakan korban berdasarkan status sosialnya, baik TNI/Polri maupun warga sipil dilayani sesuai dengan kebutuhan medisnya.

Beberapa korban meninggal dunia kami layani sesuai dengan

prosedur umum yang berlaku yang diawali dengan proses identifikasi, membersihkan/memandikan jenasahnya, menjahit luka-lukanya lalu disuntik formalin dan diletakan di kamar jenazah. Selama kami menangani korban peristiwa Deiyai, tidak ada intervensi dari pihak mana pun, baik TNI/Polri atau masyarakat pada umumnya. Sebanyak 24 orang dirawat inap, yakni 4 anggota Polri, 2 anggota TNI dan 19 orang masyarakat sipil.

Sejak 29 Agustus 2019 korban dari pihak Polri maupun TNI dirujuk ke RS Bhayangkara di Jayapura. Sedangkan 19 pasien masyarakat sipil, 16 diantaranya sudah dipulangkan. Saat ini hanya ada 3 orang pasien. Salah satu diantaranya masih dirawat di ruang ICU atas nama Yance Dawapa yang sampai saat ini belum sadarkan diri. Sedangkan 2 pasien lainnya dirawat di Ruang Bedah Pria atas nama Bernadus Kotoki dan Leander Doo. Bernadus Kotoki mengalami luka tembak di bagian paha kiri luar yang mengakibatkan tulang pahanya patah.

Menurut keterangan dari korban Bernadus Kotoki, ia ditembak dari arah kantor bupati saat berada di luar tembok kantor bupati. Sedangkan Leander Doo mengalami luka tembak di paha kanan dalam yang menyebabkan patah tulang sehingga harus dipasang *pent*. Leander Doo ditembak di halaman kantor bupati Deiyai. Leander Doo merupakan salah satu tersangka dan saat ini sedang dijaga oleh aparat kepolisian.

Berikut data korban yang diterima di RSUD Madi. Korban meninggal dunia:

1) Mr. X, 30 tahun, alamat Waghete (sipil)
2) Mr. XX, 28 tahun, alamat Waghete (sipil)
3) Mr. Alpius Pigai, 24 tahun, alamat Waghete (sipil)
4) Mr. Kotouki, 35 tahun, alamat Waghete (sipil)
5) Mr. Ericson Edi Chandra, 37 th, alamat Palembang (TNI)

Korban yang dirawat di RSUD Madi:

1) Yos Iyai, 26 tahun, Waghete (sipil)
2) Simon P Ukago, 27 tahun, Waghete (sipil)

3) Stepanus Goo, 29 tahun, Waghete (sipil)
4) Melanus Mote, 34 tahun, Waghete (sipil)
5) Yunes Kayame, 26 tahun, Waghete (sipil)
6) Step Pigai, 26 tahun, Waghete (sipil)
7) Gergorius Tekege, 25 tahun, Waghete (sipil)
8) Samuel Edowai, 27 tahun, Waghete (sipil)
9) Yohanis Adii, 47 tahun, Waghete (sipil)
10) Akmal Riyadi, 25 tahun, Madi (polisi)
11) Habelino Sawaki, 25 tahun, Madi, (polisi)
12) Rifki Aprianto, 19 tahun, Madi, (polisi)
13) Dedi Taine, 21 tahun, Madi (polisi)
14) Sunendra, 31 tahun, Waghete, (TNI)
15) Arip, 37 tahun, Waghete, (TNI)
16) Elisabeth Mote, 29 tahun, Waghete, (sipil)
17) Mr. X, Waghete, (sipil)
18) Juven Pekei, 35 tahun, Waghete, (sipil)
19) Leander Doo, 24 tahun, (sipil)
20) Alex Pakage, 50 tahun, Waghete
21) Jhon Badii, 20 tahun, Waghete, (sipil)
22) Bernadus Kotoki, 50 tahun, Waghete, (sipil)
23) Mikael Bukega, 26 tahun, Waghete, (sipil)
24) Andreas Doo, 30 tahun, Waghete, (sipil)

5) Bertemu Pemda Deiyai

Komnas HAM Papua bertemu Asisten III Pemda Deiyai yang saat itu berada di Kantor Bupati. Asisten III menyampaikan bahwa sejak peristiwa 28 Agustus 2019 hingga hari ini para pegawai belum masuk kantor untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga pelayanan publik tidak berjalan normal. Kalau pun para pegawai datang, mereka hanya sekedar absen lalu kembali ke rumahnya.

Komnas HAM Papua meminta Pemda Deiyai melalui Asisten III agar dilakukan upaya pemulihan. Harus membangun koordinasi dengan semua pihak agar pelayanan publik dapat berjalan.

Saat itu, 20 September 2019, kondisi HAM di Kabupaten Deiyai belum sepenuhnya kondusif. Pelayanan publik belum berjalan optimal sebagaimana mestinya. Pihak aparat kemanan masih berjaga-jaga. Pihak TNI sedang berupaya untuk mencari 1 pucuk senjata yang hingga saat ini belum dikembalikan.

6) Bertemu perwakilan TNI di Deiyai

Komnas HAM RI Perwakilan Papua juga bertemu Mayor Infanteri Dharmawan dan salah satu perwira, Setiyo Priambodo. Dalam kesempatan tersebut mereka menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Keberadaan kami di Deiyai ini dalam rangka pembentukan Kodim. Status kami adalah BKO SATGASTER (Satuan Tugas Teritorial). Kami berasal dari berbagai Kodam yang pada intinya datang untuk mempersiapkan pembentukan Kodim.

Terkait peristiwa ini, kami diminta oleh kepolisian Resor Paniai untuk turut membantu pengamanan. Saat itu, 28 Agustus 2019, kami tugaskan 10 orang anggota untuk membantu pihak kepolisian. Tiga anggota menggunakan mobil *avanza* hitam dan di dalam mobil tersebut ada 10 pucuk senjata lengkap dengan amunisi. Mobil sudah diparkir di jalan belakang di luar Kantor Bupati Deiyai. Sedangkan tujuh anggota lainnya sudah bergabung dengan rekan-rekan dari kepolisian di dalam halaman kantor Bupati.

Tidak ada satu pun anggota TNI yang memegang senjata. Hal ini sesuai dengan arahan dari pimpinan kami agar mengedepankan pendekatan persuasif. Selain itu khusus untuk di Deiyai ada Surat Edaran Bupati yang pada intinya meminta aparat keamanan yang bertugas di Deiyai tidak boleh memperlihatkan senjata api saat sedang melaksanakan tugas.

Ketika massa sudah mulai demo di halaman kantor bupati bagian depan, tiba-tiba saja datang massa dalam jumlah yang sangat banyak melalui jalan belakang melintasi mobil yang diparkir tersebut. Secara tiba-tiba pula massa langsung melempar mobil *avanza* warna hitam dan merusaknya secara brutal. Dua anggota kami terdesak karena massa mengepung dan dipaksa mundur dan masuk ke dalam halaman kantor Bupati.

Sedangkan satu anggota kami dibunuh oleh massa menggunakan kampak dan anak panah. Massa berhasil mengambil 10 pucuk senjata. Setelah itu, massa mendorong mobil dari tempat parkir ke arah parit.

Setelah mendapat laporan dari salah seorang anggota TNI bahwa satu anggota TNI meninggal dunia dan sejumlah senjata dirampas, saya segera melapor ke pimpinan. Arahan dari pimpinan agar kami tetap persuasif dan tetap waspada untuk menjaga keselamatan diri kami.

Sebagai komandan, saya bertanggung jawab penuh atas meninggalnya salah satu anggota kami dan hilangnya 10 pucuk senjata tersebut. Namun saya juga dengan jiwa kstaria mengakui bahwa semua anggota saya taat pada arahan pimpinan. Tidak ada satu pun yang memegang dan menggunakan senjata meskipun dalam keadaan terdesak. Seandainya anggota saya ada yang menggunakan senjata maka tentu akan berbeda ceritanya.

Setelah peristiwa ini, kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, tokoh adat, tokoh agama dan pihak kepolisian untuk mencari senjata yang dirampas massa. Dua hari kemudian, dengan bantuan Pemda Deiyai massa sudah mengembalikan 9 pucuk senjata secara bertahap.

Saat ini kami sedang menunggu Tim dari Mabes TNI untuk melakukan invetigasi juga melakukan komunikasi dan koordinasi kepada semua pihak dalam upaya mencari 1 pucuk yang hingga hari ini belum dikembalikan.

7) Meninjau Lokasi

Komnas HAM Papua juga meninjau lokasi terjadinya kerusuhan tersebut yakni Kantor Bupati Deiyai. Komnas HAM menemukan beberapa fakta sebagai berikut:

Terdapat 34 lubang bekas tembakan di dinding kantor Bupati Deiyai bagian belakang, 4 diantaranya mengenai kaca jendela dan 1 diantaranya mengenai dinding yang terbuat dari kayu atau papan yakni Pos Satpam.



Lubang bekas tembakan pada dinding kantor Bupati Deiyai

Melihat lubang bekas tembakan tersebut dapat dikatakan bahwa secara kasat mata tembakan berasal dari arah luar menuju ke dalam kantor.

Selain itu ada beberapa bagian kantor yang dirusak massa, 3 buah jendela kaca hancur seperti dipukul dengan benda keras. Sementara di beberapa sisi gedung terlihat bekas-bekas patahan anak panah, dua buah noken dan batu-batu yang diduga digunakan untuk melempar.

Sementara di jalan bagian belakang kantor Bupati Deiyai ke arah kiri kira-kira 20 meter masih terlihat mobil kijang hitam dalam keadaan rusak berat terperosok ke arah parit. Ada batu-batu di dalam mobil yang diduga digunakan untuk melempar dan merusakan mobil. Terlihat bekas darah di bagian depan mobil. Masih terasa bau amis darah dari tempat tersebut. Di tempat itu juga terlihat beberapa bekas patahan anak panah.



Mobil Kijang milik TNI yang dirusak oleh massa

Sementara di halaman depan kantor Bupati, tiang bendera masih kokoh berdiri tanpa tali dan tanpa bendera juga ada tali yang digunakan oleh massa sebagai tali komando.

6. Melakukan Pemantauan di Wamena

Aksi demonstrasi massa sebagai respon atas ujaran rasis terhadap mahasiswa Papua juga terjadi di Wamena. Aksi massa berujung rusuh ini tercacat sebagai aksi yang paling brutal. Aksi massa ini menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak, kerusakan fasilitas umum yang cukup parah dan terjadi gelombang pengungsian besar-besaran. Wamena bagaikan kota mati.

Menanggapi peristiwa ini, baik Komnas HAM Pusat maupun Komnas HAM Papua telah bertemu dan meminta keterangan dari sejumlah pihak sesuai dengan mandat UU Nomor 39 Tahun 1999.

a) Komnas HAM Pusat

Komnas HAM RI mendapat informasi dan pengaduan tentang peristiwa yang terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua pada 23 September 2019 yang menimbulkan korban jiwa, luka, hancurnya bangunan rumah, toko, fasilitas publik dan juga fasilitas pemerintahan.

Menindaklanjuti informasi dan pengaduan tersebut, sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang yang dimandatkan dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM RI melakukan investigasi awal pada 25-26 September 2019 di Wamena dan ditindaklanjuti dengan pemantauan ke Jayapura dan Wamena Jayawijaya, Provinsi Papua pada 14-17 Oktober 2019.

Dalam menjalankan tugasnya, selain investigasi lapangan, Tim Komnas HAM RI juga melakukan serangkaian koordinasi dan permintaan keterangan kepada Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih, Kelompok Masyarakat Sipil dan Tokoh Agama Papua, Kapolres Jayawijaya, Dandim 1702/Jayawijaya, Bupati Jayawijaya, dan Rektor Universitas Cenderawasih.

Berdasarkan permintaan keterangan dari para pihak, tinjauan lokasi dan kegiatan lainnya dalam rangka pemantauan dan penyelidikan diperoleh sejumlah data, fakta dan informasi sebagai berikut :

Bahwa komunikasi/kata-kata yang disampaikan Ibu Guru

Riris Tiodora Panggabean pada Rabu, 18 September 2019 kepada beberapa siswa SMA PGRI telah mengalami distorsi menjadi kata-kata yang bertendensi negatif serta mengumbar rasa kebencian terhadap ras dan etnis tertentu khususnya orang asli papua sehingga menimbulkan gelombang protes dari para siswa yang berujung pada tindakan anarkis;

Bahwa peristiwa kerusuhan di Wamena mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang meskipun ada informasi yang cukup kredibel yang menyatakan bahwa jumlahnya lebih dari 33, korban luka 53 (lima puluh tiga) orang, rusak dan terbakarnya 530 (lima ratus tiga puluh) unit bangunan milik masyarakat, 238 (dua ratus tiga puluh delapan) unit kendaraan, dan 17 (tujuh belas) unit gedung pemerintah;

Bahwa peristiwa kerusuhan di Wamena juga menyebabkan masyarakat pergi keluar atau eksodus/mengungsi dari Wamena dengan total sebanyak 7.339 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan). Kondisinya saat ini hampir seluruh masyarakat yang eksodus/pengungsi telah kembali ke rumah atau ke rumah Saudara dan kerabatnya;

Bahwa Kepolisian Daerah Papua Cq Kepolisian Resort Jayawijaya telah melakukan proses penegakan hukum terhadap para terduga pelaku perusakan, penganiayaan, dan pembunuhan dalam Peristiwa Wamena dimana saat ini telah ditetapkan Tersangka sebanyak 14 (empat belas) orang;

Bahwa Pemerintah Daerah Papua Cq Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berkoordinasi dengan seluruh instansi termasuk pihak keamanan Polri dan TNI sedang berupaya melakukan proses pemulihan keamanan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, trauma healing untuk masyarakat/pengungsi, serta pemberian bantuan bahan sandang dan pangan.

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua data, fakta, informasi dan temuan di lapangan, keterangan saksi, laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya, maka Komnas HAM RI menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Komnas HAM RI menilai bahwa peristiwa Wamena merupakan tragedi kemanusiaan yang mengakibatan jatuhnya korban jiwa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, korban luka 53 (lima puluh tiga) orang, rusak dan terbakarnya 530 (lima ratus tiga puluh) unit bangunan milik masyarakat, 238 (dua ratus tiga puluh delapan) unit kendaraan, dan 17 (tujuh belas) unit gedung

pemerintah;

Komnas HAM RI menilai bahwa peristiwa Wamena tidak lepas dari peristiwa diskriminasi ras dan etnis yang terjadi di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya yang kemudian dipicu adanya komunikasi verbal seorang Guru di SMA PGRI yang dituduhkan bertendensi negatif dan didasarkan pada rasa kebencian terhadap ras dan etnis Papua;

Komnas HAM RI menilai dalam peristiwa tersebut terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dijamin di dalam berbagai peraturan perundangundangan yang relevan di bidang hak asasi manusia khususnya UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Aasai Manusia. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam Peristiwa di Wamena yaitu Hak atas Hidup (Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 jo Pasal 9 UU No 39 Tahun 1999), Hak Atas Kepemilikan (Pasal 36 UU No. 39 Tahun 1999), dan Hak Atas Rasa Aman (Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 30 UU No 39 Tahun 1999).

b) Komnas HAM Papua

1) Bertemu Guru-guru SMA PGRI Wamena

Komnas HAM Papua bertemu Riris Theodora Panggabean, salah seorang guru kontrak, SMA PGRI Wamena. Riris menyampaikan kronologisnya sebagai berikut.

Siang itu, Rabu, 18 September 2019, pukul 12.00 Waktu Papua, saya mengajar di kelas 12 IPS. Saat itu, saya meminta para murid untuk mengumpulkan tugas.



Memintai Keterangan Kepala Sekolah SMA PGRI Wamena

Ada 10 siswa yang tidak mengerjakan tugas. Mereka diberi hukuman berdiri di depan kelas dan membaca tugasnya berulang-ulang. Kemudian, saya meminta salah satu siswa laki-laki yang duduk untuk membacakan tugas itu. Tetapi siswa itu membacanya dengan suara pelan. "Kenapa kamu bacanya terbata-bata? Ayo! Baca ulang dengan suara ***keras***."

Setelah itu, proses belajar mengajar berjalan seperti biasa. Interaksi antara saya dan para murid berjalan baik sejak Rabu (18/9) hingga Jumat (20/9).

Pada Sabtu (21/9), para siswa diminta untuk kerja bakti bersama membersihkan ruangan maupun lingkungan sekolah untuk persiapan pelaksanaan Ujian Tengah Semester. Saat itu ada beberapa siswa berkumpul di lapangan sekolah. Mereka menuduh saya telah mengucapkan kata "kera" kepada temannya pada Rabu (18/9).

Melihat gelagat para siswa di lapangan, salah seorang guru bagian kesiswaan, Debora Agapa mendatangi para siswa itu dan menanyakan persoalan yang sedang dibahas. "Ibu Riris bilang kera kepada siapa dan siapa saksinya?" Tanya Ibu Debora kepada para murid yang berkumpul di lapangan itu. Nikon, Thomas, Novri, Bastian, dan Rustam, tidak bisa menjawab dan membuktikannya.

Setelah itu Ibu Debora ke ruangan guru bersama para siswa tersebut dengan maksud untuk meminta klarifikasi kepada saya.

Saat itu, ada siswa yang mengatakan, mereka tidak mendengar ibu Riris menyebut kata kera. Ibu Riris hanya meminta untuk membaca dengan suara yang keras. Tetapi ada siswa juga yang mengatakan bahwa Ibu Riris menyebut kata kera kepada salah satu murid.

Walaupun ada perbedaan soal informasi antara kata 'kera' atau 'keras' tetapi tidak terjadi perdebatan lagi. Bahkan para siswa dan guru saling memaafkan serta bersalaman. Saat itu juga, para siswa pun meminta maaf kepada saya.

Keesokan harinya, Minggu 22 September 2019, penjaga sekolah menelpon kepala sekolah dan memberitahukan bahwa, sejak semalam (malam minggu hingga subuh) ada sejumlah orang memanjat pintu gerbang lalu masuk ke dalam sekolah dan melakukan pengrusakan. Sebagian kaca sekolah pecah dan umbul-umbul serta bendera merah putih rusak.

Berdasarkan laporan penjaga sekolah dan informasi dari

intelejen, Kepala SMA PGRI Wamena, Heri Max Kasiha, menghubungi saya untuk meminta informasi seputar kejadian yang berujung pada aksi protes siswa. Kepala Sekolah meminta agar saya tidak masuk sekolah pada Senin, 23 September.

Senin, 23 September 2019 Pukul 07:00 WIT, saat itu kepala sekolah sedang memberikan arahan kepada siswa untuk persiapan ujian. Tiba-tiba saja muncul dua orang menerobos pagar sekolah lalu masuk dan mengambil-alih pengeras suara. Mereka mengaku sebagai pemuda gereja. Sementara di bagian luar pagar, sudah ada sejumlah pemuda (bukan siswa) berkumpul.

Dua pemuda tersebut kemudian mengarahkan siswa-siswi dan menuntut agar saya diberikan hukuman, serta mengancam akan merusak sekolah. Mendengar ancaman itu, para guru menelpon ke Polres Wamena. Tak berapa lama, anggota Polres datang dan mengamankan situasi.

Lalu sekelompok orang mendesak para siswa untuk membuat laporan ke Polres Wamena. Mereka menggiring para siswa ke Polres. Tetapi di perempatan dekat menara salib para siswa berpencar dalam dua kelompok. Sebagian ke arah SMA Yapis dan sebagian ke SMA Negeri.

Setelah itu, mereka melempar pihak keamanan yang mengawal. Pihak keamanan mencoba menenangkan, tetapi para siswa semakin brutal. Lalu petugas melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan para siswa.

Mendengar tembakan peringatan itu, para siswa bersama kelompok lain tersebut semakin bertindak brutal. Mereka mulai menyebar ke pinggiran kota yaitu Jalan Irian, Jalan Hom-Hom, Jalan Wouma, dan jalan Jibama.

Selain bertemu Ibu Riris, Komnas HAM Papua juga bertemu Debora Agapa, salah seorang guru SMA PGRI Wamena. Saat itu Ibu Debora menyampaikan kronologis sebagai berikut.

Pada Sabtu, 21 September 2019, Kepala Sekolah menugaskan saya menyampaikan informasi kepada para siswa tentang pelaksanaan ujian. Saat itu, saya melihat beberapa siswa berkumpul di lapangan, selang beberapa menit, saya menghampiri mereka dan bertanya “ada masalah apa ini?” Salah seorang murid menjawab, “Ibu, kita ada masalah dengan ibu guru ekonomi.” Terus saya katakan, “kalau begitu, kalian yang tidak ada urusan masuk ke kelas, dan yang punya masalah ikut saya”.

Anak yang bermasalah bernama Anton. Kemudian saya menghampiri Ibu Riris. Kami bertiga masuk ke ruangan guru. Kemudian saya bertanya kepada Ibu Riris "Apakah Ibu menyampaikan bahasa yang kurang pantas kepada anak ini?" "Ah saya tidak bilang seperti itu" Jawab Ibu Riris.

Lalu, saya mengumpulkan semua anak di dalam kelas untuk menanyakan apakah ada anak lain mendengar perkataan Ibu Riris. Setelah semua berkumpul, saya bertanya kepada para siswa apakah mereka mendengar perkataan Ibu Riris terkait kata kera. Ada yang menjawab tidak mendengarnya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa mereka mendengarnya.

Kemudian dengan tegas saya meminta para siswa dan Ibu Riris agar saling memaafkan dan meminta kepada mereka supaya masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan di lingkungan sekolah. Saat itu semua setuju dan saling memaafkan.

Setelah itu, saya meminta semua siswa berkumpul di lapangan untuk menyampaikan pengumuman tentang teknis pelaksanaan ujian pada hari senin nanti. Saat di lapangan, saya kembali mengingatkan para siswa agar melupakan masalah tersebut karena sudah ada pernyataan saling memaafkan.

Senin, 21 September 2019 saat saya tiba di sekolah melihat keadaan sekolah tidak seperti biasanya. Tiang bendera jatuh dan beberapa kaca jendela pecah. Saat itu sudah ada pihak kepolisian yang menanganinya. Kemudian semua siswa diminta ke kantor Polisi untuk menyelesaikan masalah. Setibanya di kantor Polisi keadaan di luar sudah memanas sehingga semua berlindung di kantor Polisi.

2) Bertemu Perwakilan Murid SMA PGRI Wamena

Nelpinus Yando, 16 tahun, siswa SMA PGRI Wamena, kelas I, menuturkan bahwa, pada 23 September 2019, saya ke sekolah seperti biasanya. Setibanya di sekolah, saya melihat beberapa kaca jendela sekolah pecah, tetapi tidak tau siapa yang merusakannya. Saat itu saya melihat dan mendengar salah seorang guru menggunakan pengeras suara menyampaikan bahwa hari ini ada ujian, jadi semua siswa tetap ada di dalam halaman sekolah.

Ketika bapak guru sedang berbicara, tiba-tiba ada dua orang bukan anak sekolah, masuk halaman sekolah. Sementara tampak pemuda yang lain ada di luar pagar. Dua orang yang masuk ke

halaman sekolah tersebut langsung merampas pengeras suara dari bapak guru lalu mereka bertanya, "mana ibu guru yang bilang kera? Guru itu harus dihukum. Kakak kelas yang lain langsung berteriak dan kami semua disuruh keluar. Tak lama kemudian, datanglah beberapa anggota polisi ke sekolah dan membawa beberapa anak sekolah.

Para guru meminta kami semua ikut ke kantor polisi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi orang yang merampas pengeras suara itu berteriak dan meminta kami keluar dari sekolah. Kami diancam. Kalau tidak keluar dan ikut bergabung maka akan dipukul.

Di sepanjang jalan, ada siswa dari sekolah lain ikut bergabung dan saya melihat ada orang membakar kantor bupati dan ruko serta beberapa rumah di sepanjang jalan. Mereka sudah membawa bensin dan korek api.

3) Bertemu Beberapa Warga

Ketika aksi massa kian anarkis, penduduk di Kota Wamena berusaha menyelamatkan dirinya dengan caranya masing-masing. Komnas HAM Papua bertemu dan meminta keterangan dari beberapa warga.

Sainal, 42 tahun, menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Kami tidak tahu kalau ada aksi demonstrasi pada Senin, 23 September 2019. Sekitar jam 10.00 kami mendapat informasi bahwa ada sekelompok orang sedang melakukan aksi demo ke kantor Bupati Wamena. Selang beberapa saat kemudian, kami melihat kepulan asap ke langit.

Orang-orang mulai berlarian di jalan dan membawa alat tajam sambil berteriak: "bakar-bakar." Saya mendengar letupan seperti tembakan senjata. Saya langsung menutup kios dan berusaha lari menyelamatkan diri ke rumah karena massa sudah banyak di jalan-jalan dan menyerang orang yang melintas dengan kendaraan. Samar-samar terdengar suara dari jalan yang berteriak : "*bunuh.....bunuh, bakar.....bakar*."

Setelah tiba di rumah saya mengamankan diri bersama keluarga di dalam rumah sambil terus mencari informasi dan memantau kondisi melalui HP. Informasi menyebar dengan cepat. Kondisi sangat mencekam. Massa sangat brutal melakukan tindakan untuk membakar dan melukai orang lain. Kepulan asap dimana-mana.

Ketika keadaan sudah mulai tenang karena kehadiran aparat

gabungan yang mengeluarkan tembakan peringatan, kami baru bisa menyelamatkan diri melalui jalan pintas di belakang rumah menuju ujung bandara. Kami memutuskan untuk lari ke bandara karena di sana ada aparat keamanan dan kami memiliki kesempatan untuk pergi dari Wamena.

Jhon Wondi, 52 tahun, asal Toraja, seorang supir truk, menyampaikan informasinya sebagai berikut. Ketika situasi Wamena mulai kacau pada 23 September, saya langsung mengamankan diri ke arah Kodim Wamena.

Dimana-mana terlihat asap membubung ke langit. Massa membakar secara membabi buta. Selain itu massa juga menganiaya dan menyerang warga pendatang dengan sadis. Padahal kami sendiri tidak tahu apa masalahnya.

Saya sudah cukup lama berada di wamena. Selama ini tidak ada masalah antara warga pendatang dengan orang asli Wamena. Kami saling kenal dan hidup bersama dengan damai. Tetapi pada saat kejadian, orang-orang datang dalam jumlah banyak lalu melakukan aksi brutal secara bersama sehingga menyebabkan situasi menjadi kacau dan kami masing-masing mencari jalan untuk menyelematkan diri.

Reni, 34 tahun, asal Toraja. Saat ditemui Komnas HAM Papua ia menyampaikan rasa syukurnya karena selamat dari amukan massa. "Puji Tuhan… kami selamat, rumah kami tidak dibakar".



Bertemu para pengungsi di Bandara Wamena

Kami diselamatkan oleh tetangga orang asli Wamena. Pada

saat kejadian, ketika massa sudah mulai membakar sana-sini, dia berdiri sambil berjaga-jaga di depan rumah kami dan melarang massa untuk melempar atau pun membakar. Dia meminta kami agar tetap tenang di dalam rumah. Sekitar jam 17.00 ketika keadaan sudah mulai sepi dengan hadirnya aparat yang melakukan patroli, saat itu kami baru bisa keluar dan diantar oleh tetangga menuju tempat yang lebih aman.

4) Bertemu Salah Satu Korban Penembakan

Novil Yohame, 14 tahun, siswa SMP YPK Wamena. Menyampaikan keterangannya sebagai berikut. Saat itu seperti biasanya saya menggunakan sepeda menuju ke sekolah. Ketika sedang dalam perjalanan, saya berpapasan dengan sekelompok orang dalam jumlah yang cukup banyak.

Sekelompok orang tersebut sambil berlari-lari kecil dan berteriak "bakar... bakar..." Saya dipaksa untuk bergabung dalam kelompok tersebut namun saya menolaknya dengan alasan saya ingin ke sekolah saja. Karena tidak mau bergabung, mereka mendorong saya hingga jatuh ke dalam parit. Meskipun saya sudah jatuh di dalam parit namun mereka masih melempar dan bahkan menyiram dengan bensin dan hendak membakar. Lalu saya berteriak meminta ampun sambil berusaha berdiri mengangkat sepeda dan menyatakan untuk bergabung bersama mereka.

Tetapi tiba-tiba terdengar bunyi letupan senjata. Dalam waktu bersamaan kaki saya terasa berat dan berdarah. Saya langsung jatuh. Saya tidak melihat dengan pasti arah datangnya tembakan tersebut. Selanjutnya saya tidak tau apa-apa lagi. Keesokan harinya saya baru sadar. Saat itu saya sudah berada di rumah sakit.

5) Bertemu Bupati Jayawijaya

Komnas HAM Papua melakukan pertemuan dengan Bupati Jayawijaya. Dalam pertemuan tersebut Bupati menyampaikan bahwa selama ini, terutama masyarakat asli wamena memiliki hubungan baik dengan saya. Jika mereka hendak melakukan sesuatu hal, mereka pasti memberitahukan kepada saya.

Kehidupan masyarakat asli dengan masyarakat non Papua berjalan baik. Interaksi di dalam pemerintahan, di pasar dan dunia usaha berjalan baik, termasuk kelompok-kelompok LSM,

aktivis dan KNPB. Beberapa kelompok masyarakat sipil bersenjata juga kami kenal. Intinya tidak ada masalah diantara masyarakat asli Papua dengan non Papua.

Tetapi mengapa sampai ada kejadian sebesar ini bisa terjadi? Kami masih mencari tahu, siapa di balik gerakan anarkis ini? Saya menduga ada yang mengerakannya.

Sebagai bupati saya bersedia bertemu dengan mereka yang datang di halaman kantor bupati. Mereka meminta agar teman-temannya yang diamankan oleh anggota Polres segera dibebaskan. Saya menyetujui permintaan mereka. Saya langsung berkoordinasi dengan pihak Polres.

Saat itu saya bersama salah satu aktivis HAM, Theo Hesegem menerima dan merespon tuntutan massa tersebut. Mereka yang melakukan aksi di halaman sekolah SMA PGRI itu mengaku sebagai pemuda gereja. Tetapi saya dan Theo Hesegem tidak mengenal mereka. Mereka yang melakukan aksi brutal itu, apakah orang asli Wamena atau orang dari daerah lain yang masuk ke Wamena dan menggerakan massa untuk melakukan aksi brutal, pertanyaan ini belum terjawab.

Setelah saya berkoordinasi dengan Kapolres terkait permintaan massa untuk membebaskan teman mereka yang ditahan, saya meminta wakil bupati untuk terus berkomunikasi dengan massa.

Tiba-tiba saja, massa justru berusaha untuk membakar kantor bupati. Massa menggunakan bahan bakar bensin untuk membakar sejumlah ruangan di kantor bupati. Saya menduga ada aktor yang sudah mempersiapkan pembakaran kantor bupati.

Peristiwa kelam ini menimbulkan korban jiwa sebanyak 32 orang meninggal dunia dan puluhan luka-luka. Ada ratusan bangunan pemerintah maupun swasta dibakar massa. Ratusan kendaraan roda empat dan roda dua milik pribadi maupun milik pemerintah juga dibakar.

Selaku bupati, bersama forkompimda bergerak cepat merespon situasi ini. Fokus pertama diarahkan bagi para korban meninggal dunia. Evakuasi dan identifikasi segera dilakukan dan berkomunikasi dengan pihak keluarga untuk pemakaman maupun pengiriman jenazah.

Fokus kedua diarahkan bagi korban luka-luka untuk memastikan penanganannya medisnya di RSUD Wamena maupun yang harus dirujuk. Semua biaya menjadi tanggung jawab

pemerintah daerah.

Fokus ketiga diarahkan bagi penduduk yang mengungsi untuk memastikan mereka tetap aman. Selanjutnya, dilakukan upaya pemulihan secara keseluruhan baik fisik maupun keamanannya secara bertahap. Pemda tetap berupaya untuk memberikan jaminan keamanan sehingga warga bisa beraktifitas seperti biasa.

Pemerintah terus berkordinasi dengan berbagai pihak terutama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pihak keamanan dan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar bersinergi untuk mengupayakan perdamaian secara bersama.

Kapolres Jayawijaya dan Komandan Kodim Wamena, menegaskan bahwa TNI dan Polri akan terus meningkatkan patroli bersama guna memulihkan kondisi. Patroli dengan pendekatan dialog akan terus dilakukan sampai kondisi wamena pulih.

Dandim Wamena, menyampaikan bahwa di Kodim saat ini sedang menampung 2700 pegungsi dan ratusan kendaraan yang diamankan. Kodim terus berupaya agar kebutuhan dasar para pengungsi bisa terpenuhi.

Polres Wamena terus berupaya meningkatkan patroli dan bertindak cepat merespon setiap informasi terkait kemungkinan terjadinya aksi demo susulan. Anggota yang lain sedang melakukan olah TKP di setiap lokasi dan menghimpun data korban serta mencari siapa pelaku yang menyebarkan berita hoax dan yang menggerakan aksi anarkis tersebut. Upaya ini membutuhkan dukungan dari semua pihak. Saat ini di Polres terdapat sedikitnya 5000 orang pengungsi. Polri berupaya agar kebutuhan pokok para pengungsi bisa terpenuhi.

Ada potensi pengungsi meninggalkan kota wamena dalam jumlah yang banyak karena mereka trauma dan takut adanya kejadian yang sama terulang lagi. Saat ini Polres Wamena mendapat tambahan pasukan BKO Brimob dari Jayapura untuk pengamanan dan pemulihan kondisi pasca peristiwa ini.

1. Melakukan Pemantauan di Beberapa Kota Studi

Ujaran rasis di Surabaya, penangkapan dan dugaan adanya kekerasan dan pernyataan salah satu pejabat di Kota Malang yang berniat memulangkan oknum mahasiswa Papua yang melakukan

anarkis tersebut tidak hanya menimbulkan gelombang protes dalam bentuk aksi demonstrasi semata namun diikuti pula dengan suatu gerakan bersama diantara para mahasiswa Papua di beberapa kota studi untuk kembali ke Tanah Papua (eksodus). Selain itu beredar informasi bahwa para mahasiswa ini kembali ke Tanah Papua karena merasa diintimidasi di kota studi.

Gelombang eksodus mahasiswa Papua tersebut umumnya memilih Jayapura sebagai kota tujuan dan dilakukan secara bertahap. Jumlahnya mendekati ribuan. Dikhawatirkan keberadaan para mahasiswa eksodus ini bisa memicu persoalan baru misalnya soal ketertiban dan keamanan di Kota Jayapura. Selain itu yang paling utama, perkuliahan tidak bisa dilakukan sehingga berpotensi dikeluarkan.

Menyikapi situasi ini Komnas HAM Papua melakukan pemantauan ke beberapa kota studi untuk memastikan apakah ada intimidasi yang dialami oleh mahasiswa Papua atau tidak. Selain itu, Komnas HAM Papua ingin bertemu dan mengajak serta meminta para mahasiswa agar tidak kembali ke Tanah Papua.

Adapun kota studi yang didatangi Komnas HAM Papua, yakni:

1) Manado

Komnas HAM Papua melakukan pemantauan ke Manado, Sulawesi Utara, pada 11-14 September 2019. Dalam pemantauan tersebut, Komnas HAM Papua bertemu dengan sejumlah pihak, yaitu:

a) Pertemuan dengan sejumlah mahasiswa di beberapa asrama

Asrama Cenderawasih I; pada 12 September 2019, Komnas HAM Papua bertemu beberapa penghuni asrama Cenderawasih I dan diterima langsung oleh Ketua IMAPA (Ikatan Mahasiswa Papua) Sulawesi Utara.

Dalam keterangannya, Ketua IMAPA menyampaikan bahwa sebagian besar mahasiswa yang tinggal di asrama Cenderawasih I sudah pulang ke Tanah Papua. Selain itu mahasiswa yang berdomisili di Asrama Lanny Jaya, Asrama Puncak, Asrama Tolikara, dan Asrama Timika, semuanya sudah pulang ke Papua.

Para mahasiswa yang kembali ke Papua itu memiliki alasan yang sama yakni sebagai sebuah pilihan sikap atau gerakan bersama untuk menentang aksi rasisme di Surabaya.

Terkait informasi adanya intimidasi terhadap mahasiswa

Papua, Ketua IMAPA menyampaikan bahwa hal itu tidak terjadi di Asrama Cenderawasih I.



Bertemu para Mahasiswa yang ada di kota Manado

Para mahasiswa yang kembali ke Papua itu memiliki alasan yang sama yakni sebagai sebuah pilihan sikap atau gerakan bersama untuk menentang aksi rasisme di Surabaya.

Terkait informasi adanya intimidasi terhadap mahasiswa Papua, Ketua IMAPA menyampaikan bahwa hal itu tidak terjadi di Asrama Cenderawasih I.

Asrama Lokon; pada hari yang sama, Komnas HAM Papua bertemu dengan penghuni asrama dan Ketua Yayasan Pendidikan Lokon Sulawesi Utara, Dolfi Rumondor.

Dolfi Rumondor menyampaikan bahwa, untuk mencegah dampak kasus rasis di Surabaya, sejumlah aparat mendatangi asrama dan meminta para pelajar membuat rekaman video singkat yang isinya: "Kami di sini baik-baik dan aman-aman saja." Tujuannya, untuk meyakinkan para orang tua murid yang berada di Tanah Papua bahwa mereka dalam keadaan aman.

Lebih lanjut Dolfi Rumondor menjelaskan bahwa, untuk anak SMP, rekaman videonya sudah dilakukan pada Jumat, 6 September 2019. Menurut rencana, siswa SMA akan melakukan perekaman pada Senin, 9 September 2019. Tetapi para siswa SMA menolak.

Tentang anak-anak yang pulang ke kampungnya, Rumondor menjelaskan, sebagian anak-anak, sudah dipulangkan sesuai permintaan orang tuanya. Sedangkan para siswa yang lainnya masih ada. Khusus untuk para siswa yang berasal dari Timika,

kami langsung membantu menyiapkan administrasinya untuk pindah sekolah di sana.

Asrama Yapen; Pada Jumat , 13 September 2019, Komnas HAM Papua melanjutkan pemantauannya di Asrama Yapen. Di asrama ini, para mahasiswa menjelaskan, bahwa mereka tidak terpengaruh dengan kasus rasis di Surabaya. Kami di asrama Yapen pada umumya dalam kondisi baik. Kami tidak mengalami intimidasi oleh siapa pun. Sampai saat ini belum ada satu mahasiswa pun yang pulang ke Papua.

Terkait isu rasis di Surabaya, kami didatangi sejumlah anggota Polisi dari Polsek Malalaya pada Sabtu, 7 September 2019. Sejumlah anggota Polisi tersebut meminta bahkan cenderung memaksa kami untuk melakukan perekaman video singkat yang isinya pernyataan "kami di sini baik-baik dan aman-aman saja." Namun kami menolak untuk melakukan perekaman.

Asrama Kaimana; setelah dari Asrama Yapen, Komnas HAM Papua melanjutkan pertemuan di Asrama Kaimana. Salah seorang penghuni asrama menyampaikan bahwa kehidupan di asrama berjalan seperti biasanya. Para mahasiswa merasa tidak terpengaruh dengan peristiwa di Surabaya dan Malang.

Namun, pada 7 September 2019, seorang anggota polisi datang ke asrama dan memaksa para mahasiswa untuk membuat pernyataan dan direkam melalui video singkat. Isi pernyataan itu adalah "kami di sini baik-baik dan aman-aman saja." Anggota polisi itu terus memaksa tapi para mahasiswa menolaknya.

Penghuni Asrama Kaimana berjumlah19 orang. Dari 19 orang ini, ada 3 orang sedang kembali ke sana untuk berlibur, bukan karena peristiwa rasis di Surabaya.

Asrama Biak; Setelah dari Asrama Kaimana, Tim Komnas HAM Perwakilan Papua melanjutkan pemantauan ke Asrama Mahasiswa Biak.

Dalam pertemuan tersebut para mahasiswa menyampaikan bahwa mereka dalam kondisi yang aman. Kami tidak merasa ada tekanan atau intervensi dari siapa pun karena kami selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan semua orang.

Selama berada di sini, kami selalu aktif dalam berbagai kegiatan di gereja. Warga di sini menerima kami dengan baik sehingga kami boleh terlibat di dalam kegiatan sosial.

b) Pertemuan dengan Lurah Bato

Komnas HAM Papua juga menggelar pertemuan dengan Lurah Bato, John Sampul S. Sos. Dalam kesempatan tersebut Lurah menyampaikan bahwa kehidupan para mahasiswa asal Papua di Kelurahan Bato berjalan sebagaimana biasanya. Kami sering membantu mereka mengurus dokumen kependudukan. Para mahasiswa selalu hadir mengikuti kegiatan-kegiatan di tingkat RT dan kelurahan. Dapat dikatakan bahwa kehidupan mahasiswa Papua sudah membaur dengan semua orang di Manado.

Lurah Bato juga memberikan jaminan bahwa para mahasiswa yang tinggal di kelurahan ini akan terus diperhatikan. Kami menjamin bahwa tidak ada intimidasi atau pun pengusiran.

c) Pertemuan dengan Kapolsek Malalayang

Komnas HAM Papua melakukan pertemuan dengan Kapolsek Malalang, Frengky Manos, SH. Kapolsek menyampaikan bahwa di wilayah hukumnya terdapat sejumlah asrama mahasiswa Papua yaitu: Asrama Jayawijaya, Sorong Selatan, Mamberamo, Kaimana, Serui, Biak, Lanny Jaya, Cenderawasih Lima Putra dan Putri, Timika dan beberapa asrama lainya.

Jumlah warga papua yang berdomisili di sini cukup banyak. Selama tujuh bulan saya melaksanakan tugas sebagai Kapolsek tidak ada masalah yang timbul dari warga Papua.



Bertemu Kapolsek Malalayang

Terkait kasus rasis di Surabaya, saya perlu menjelaskan

bahwa baru-baru ini ada anggota saya yang datang ke beberapa asrama untuk melakukan perekaman video. Isi rekaman video itu menceritakan tentang kondisi mahasiswa Papua di Manado itu aman-aman saja. Hal ini kami lakukan dengan tujuan agar mengajak semua orang untuk saling menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

Sementara itu Kapolsek juga menyampaikan bahwa tidak ada tekanan atau intimidasi kepada mahasiswa Papua. Semua hidup berdampingan secara damai. Namun harus diakui bahwa kasus rasis ini telah meberi dampak yang luar biasa. Berdasarkan data sementara saat ini ada sekitar 62 orang mahasiswa yang sudah pulang ke Papua.

2) Bali

Komnas HAM Papua melakukan pemantauan ke Bali, pada 17 – 20 September 2019. Dalam pemantauan tersebut, Komnas HAM Papua telah bertemu dengan sejumlah pihak, yaitu:

a) Pertemuan dengan sejumlah mahasiswa

Pada 18 September 2019, Komnas HAM Papua mendatangi Asrama Putri yang terletak di Jalan Dokter Goris, Gang Teknik II No 15, Denpasar untuk bertemu dan memastikan kondisi para penghuninya.

Ketika tiba di depan gerbang asrama terdapat sebuah spanduk yang bertuliskan: "Kami Menolak Semua Kunjungan dari Berbagai Pihak." Namun demikian, Komnas HAM tetap berupaya masuk dan berhasil menemui, Joice, salah satu penghuni asrama tersebut dan beberapa orang lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Joice menolak untuk memberikan keterangan apapun. Joice hanya menyampaikan bahwa, seluruh Aliansi Mahasiswa Papua sepakat untuk tidak memberikan informasi apapun kepada siapapun. "Saya takut, kalau pernyataan yang saya sampaikan menimbulkan tanggapan yang negatif."

Joice juga menyampaikan sepintas bahwa kondisi di lingkungan sekitar asrama baik adanya. Tidak ada intimidasi kepada kami mahasiswa Papua yang berada di Bali. Warga di sini menerima kami dengan baik. Sedangkan para penghuni yang lain memilih untuk diam saja. Tidak ada informasi tambahan karena mereka terkesan tertutup.



Spanduk penolakan dari mahasiswa yang berada di depan Asrama

Dalam pertemuan tersebut, Joice menolak untuk memberikan keterangan apapun. Joice hanya menyampaikan bahwa, seluruh Aliansi Mahasiswa Papua sepakat untuk tidak memberikan informasi apapun kepada siapapun. "Saya takut, kalau pernyataan yang saya sampaikan menimbulkan tanggapan yang negatif."

Joice juga menyampaikan sepintas bahwa kondisi di lingkungan sekitar asrama baik adanya. Tidak ada intimidasi kepada kami mahasiswa Papua yang berada di Bali. Warga di sini menerima kami dengan baik. Sedangkan para penghuni yang lain memilih untuk diam saja. Tidak ada informasi tambahan karena mereka terkesan tertutup.

a) Pertemuan dengan Walikota Denpasar

Pada 19 September 2019, Komnas HAM Papua bertemu dengan Walikota Denpasar yang diwakili oleh Asisten I, I Made Toya. Pada pertemuan tersebut Komnas HAM Papua ingin mengetahui respon Pemda Kota Denpasar terhadap isu rasial yang sedang hangat dan keberadaan mahasiswa Papua yang melaksanakan studi di Kota Denpasar.

Pada pertemuan tersebut, Asisten I, Setda Kota Denpasar, I

Made Toya, menegaskan bahwa Bali merupakan kota wisata yang sangat mengutamakan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh masyarakat, baik masyarakat asli Bali, pendatang, ataupun wisatawan. Bali adalah rumah kita bersama, siapa pun yang tinggal di Bali wajib mengupayakan hidup berdampingan secara bersama dengan damai.

I Made Toya mengungkapkan bahwa pasca peristiwa Surabaya dan Malang, mahasiswa Papua di Bali tidak melakukan aksi yang berlebihan. Demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa Papua berjalan dengan damai dan tidak ada keributan antar Mahasiswa Papua dengan penduduk Bali. Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Kesbangpol Kota Denpasar.

Jauh sebelum peristiwa Surabaya dan Malang terjadi, jika dirunut, tidak pernah ada peristiwa atau kasus antara penduduk asli Bali dengan para mahasiswa Papua. Kami berkomitmen untuk terus berupaya menjaga kedamaian, menjadikan Bali sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi siapa saja. Melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), kami berkomitmen untuk selalu bekerja sama untuk membangun dan menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, bisa melalui Forum Kerukunan Umat Beragama, maupun desa adat untuk merangkul seluruh komponen masyarakat yang tinggal di wilayahnya masing-masing.



Bertemu Pemda Kota Denpansar

Kami menjamin keamanan bagi para mahasiswa Papua yang berada di Bali untuk studi maupun tujuan lainnya. Kami terus berupaya agar peristiwa seperti di Surabaya tidak terjadi di Bali. Tidak ada intimidasi atau pun ancaman bagi warga Papua yang berada di Bali.

a) Pertemuan dengan Polresta Denpasar

Setelah bertemu dengan Asisten I Setda Kota Denpasar, Komnas HAM Papua bertemu dengan Kapolresta Denpasar. Pertemuan ini untuk memastikan, ada tidaknya intimidasi terhadap para mahasiswa Papua.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolresta Denpasar menegaskan bahwa sebagai bentuk reaksi atas isu rasisme di Surabaya para mahasiswa Papua yang berada di Bali melakukan aksi demonstrasi sebanyak dua kali. Pada demo pertama, jumlahnya diperkirakan 70 orang, sedangkan pada aksi demo kedua jumlahnya sekitar 25 orang. Para mahasiswa tidak melakukan aksi berlebihan. Aksi demonstrasi dilakukan secara wajar dan berjalan dengan aman sampai selesai.

Pernyataan Kapolresta ini dibenarkan oleh Kabag OPS, I Nyoman Gatra dan Kasat Intel A.A Oky Kusuma. Menurut Kasat Intel, untuk menjamin keamanan mahasiswa Papua di Bali, pihak Polresta berinisiatif melakukan pendataan mahasiswa Papua, baik yang ada di asrama-asrama maupun di kost atau kontrakan.

Semua ini kami lakukan dengan tujuan untuk menjamin keamaman para mahasiswa Papua. Pendataan dilakukan agar dapat memantau dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terhadap para mahasiswa.



Bertemu Kapolresta Denpansar

Dijelaskan juga, bahwa berdasarkan hasil pendataan Polresta Denpasar, jumlah mahasiswa asal Papua sebanyak 188 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 14 orang yang sudah pulang ke Papua. Mereka yang pulang itu, bukan karena permasalahan rasisme yang terjadi di Surabaya dan Malang. Tetapi mereka pulang karena izin cuti dan izin-izin lainnya.

Sebagai aparat penegak hukum kami memberi jaminan bahwa tidak akan ada diskriminasi terhadap mahasiswa Papua yang menuntut ilmu di Bali. Semua orang yang berada di Bali harus menikmati rasa aman.

Namun demikian, Kabag OPS juga memberi catatan, bahwa para mahasiswa Papua, sering kali melanggar aturan-aturan di Bali, seperti mabuk-mabukan dan seringkali berkendara tanpa kelengkapan surat-surat. Oleh karena itu kami menghimbau kepada para mahasiswa Papua agar serius untuk belajar dan menyelesaikan studinya sehingga kelak bisa menjadi pemimpin bagi masa depan Papua yang lebih baik.

3) Kupang

Untuk merespon peristiwa demontrasi yang berujung pada anarkis, diikuti eksodus mahasiswa Papua serta adanya informasi mengenai intimidasi yang dialami oleh mahasiswa Papua maka Komnas HAM RI Perwakilan Papua melakukan pemantauan ke Kupang, NTT pada 6-9 Oktober 2019. Komnas HAM telah bertemu dengan beberapa pihak untuk meminta keterangan.

a) Pertemuan dengan perwakilan mahasiswa

Komnas HAM Papua bertemu dengan perwakilan mahasiswa asal Papua di kontrakan, perumahan Baumata, Kota Kupang. Komnas HAM Papua ingin mengetahui bagaimana kondisi mahasiswa pasca demonstrasi menentang rasisme, memastikan apakah ada intimidasi oleh aparat atau warga setempat dan apakah ada mahasiswa yang sudah kembali ke Papua.

Dalam pertemuan tersebut, Yosep Mote, salah satu mahasiswa senior di Universitas Nusa Cendana (UNDANA), penasihat FORMAPA (Forum Mahasiswa Papua Kota Kupang) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Kota Kupang menyampaikan bahwa, pada 24 – 25 Agustus 2019 kami yang tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas untuk Papua-Kupang (KASPA-KUPANG NTT) melakukan aksi demo damai di depan Mapolda NTT. Aksi demo ini kami lakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap mahasiswa Papua yang adalah teman-teman dan saudara kami atas tindakan persekusi, represif dan ujaran rasisme yang dialami oleh mereka di Surabaya dan sekitarnya. Kami merasa bahwa mereka adalah bagian dari kami. Perlakuan pahit yang dialami oleh mereka adalah bagian dari luka kami. Oleh karena itu kami ingin menyatakan bahwa kami ada bersama mereka dan berjuang

untuk menegakan keadilan.

Selain itu, pada kesempatan tersebut, Michel Mirin, selaku koordinator aksi (KASPA KUPANG NTT) dan ketua AMP Kota Kupang menegaskan bahwa selain menunjukan solidaritas terhadap sesama mahasiswa Papua, melalui aksi damai ini kami ingin menyampaikan kepada negara bahwa kami menentang keras pernyataan rasis tersebut dan meminta agar kasus ini segera dilakukan penegakan hukumnya. Aparat harus segera menangkap pelakunya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan disampaikan secara terbuka kepada publik tentang proses dan hasilnya.

Memang benar, bahwa pada saat pelaksanaan aksi damai tersebut, kami sempat bersitegang dengan Kapolres Kupang Kota. Kapolres mempersoalkan atribut yang kami gunakan serta orasi-orasi yang dianggap telah melenceng dari isi pemberitahuan yang kami sampaikan. Namun demikian kami tetap berupaya agar Kapolres memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan aksi damai tersebut. Kami bersyukur aksi damai tersebut akhirnya berjalan dengan aman sampai selesai.

Kami pastikan bahwa pasca aksi tersebut tidak ada satu pun dari peserta yang ditangkap atau ditahan oleh aparat. Namun demikian kami merasa bahwa sampai saat ini aparat berpakaian sipil masih sering mendatangi kami, meskipun mereka tidak melakukan intimidasi secara langsung atau pun secara fisik namun kami merasa tidak nyaman. Oleh karena itu kami meminta Komnas HAM agar menyampaikan keberatan kami ini kepada pihak keamanan.

Selanjutnya Yosep Mote menyampaikan bahwa, terkait situasi atau kondisi kami mahasiswa asal Papua secara keseluruhan di Kota Kupang dapat dikatakan semua dalam keadaan baik. Kami merasa sangat diterima di kota ini. Kami diterima barangkali karena aspek ras kita yang hampir sama dan dari segi iman kita memiliki kepercayaan yang sama. Tidak ada intimidasi oleh warga setempat. Kami semua bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik. Rata-rata kami kuliah di UNDANA, selain itu ada yang kuliah di UNKRIS serta perguruan tinggi swasta lainnya. Secara keseluruhan kami berjumlah sekitar 120 orang. Masing-masing tinggal di kos atau kontrakan karena kami tidak memiliki asrama. Rata-rata kami memperoleh bea siswa afirmatif. Pasca aksi damai ini sudah ada beberapa mahasiswa, sekitar 10 orang yang sudah

kembali ke Papua. Mereka pulang ke Papua karena berkaitan dengan isu rasis tersebut.

Ke depan kami berharap ada perhatian serius dari pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk mengupayakan tempat tinggal yang layak bagi kami mahasiswa sehingga dapat menunjang perkuliahan kami. Selain itu kami juga menginginkan adanya perhatian dari pemerintah, paling kurang ada jadwal kunjungan bagi mahasiswa Papua di setiap kota studi.

b) Pertemuan dengan Kapolres Kota Kupang

Komnas HAM Perwakilan Papua bertemu dengan Kapolres Kota Kupang Kota di Kantor Polres Kota Kupang. Komnas HAM Perwakilan Papua ingin mengetahui sejauh mana skema pengamanan dan penanganan yang dilakukan oleh Polres Kota Kupang terhadap pelaksanaan aksi damai oleh mahasiswa Papua dan ingin memastikan adanya aspek keamanan bagi mahasiswa Papua selama berada di Kota Kupang untuk melaksanakan perkuliahannya.



Bertemu Kapolresta Kupang

Dalam pertemuan tersebut Kapolres Kota Kupang, AKBP Satrya Perdana PT Binti, SIK, menyampaikan bahwa pada, 24-25 Agustus 2019 puluhan mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas untuk Papua-Kupang (KASPA-KUPANG NTT) dengan Koordinator Aksi, Mickel Mirin, melakukan aksi damai di depan Mapolda NTT. Sebelumnya koordinator aksi telah mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan aksi ke Mapolres Kupang Kota. Kami telah bertemu dengan mereka dan

sesuai dengan penjelasan koordinator aksinya bahwa aksi damai ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap ujaran rasis di Surabaya dan murni dilakukan oleh mahasiswa asal Papua di Kota Kupang. Atas penjelasan ini kami aparat memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan aksi damai tersebut dan kami berkomitmen untuk melakukan pengamanan sesuai dengan SOP.

Dalam aksi damai tersebut para mahasiswa yang tergabung dalam KASPA-KUPANG NTT membacakan 14 pernyataan sikap yakni:

1). Mengutuk pelaku pengepungan Asrama Kamasan Papua Surabaya dan penyerangan aksi damai di Malang, pemaksaan pemasangan spanduk dan bendera di Asrama Papua Semarang serta pemukulan yang berujung pada penangkapan di Ternate dan Ambon; 2). Pengepungan di Surabaya pembungkaman ruang demokrasi di Malang dan Semarang, merupakan bagian dari kelanjutan penjajahan di Papua. Maka kami menyatakan: Lawan Militerisme–dalang Rasisme, Hapuskan Kolonialisme dan Hancurkan Imperialisme; 3).Revolusi Nasional harus dipimpin oleh gerakan rakyat; 4).Seluruh komponen gerakan yang mencintai kebebasan dan kemerdekaan segera mengevaluasi diri dan mendorong terbentuknya persatuan nasional yang lebih luas, demokratis, partisipatif di dalam negeri West Papua untuk memimpin Perjuangan Pembebasan Rakyat; 5).Menolak seluruh tanggapan kolonial, termasuk seruan Mahasiswa Papua di luar Papua pulang oleh Majelis Rakyat Papua (MRP), Pemerintah Kolonial Provinsi Papua serta menolak seruan "Papua Pulang maka orang Indonesia Pulang dari Papua"; 6).Menolak rencana kedatangan Tim Pemerintah Kolonial Provinsi Papua ke Jawa dan Bali serta seluruh Indonesia (tidak hanya di Malang dan Surabaya) sebelum semua elit politik dan Pejabat Orang Papua melepaskan Garuda dan menuntut referendum di Tanah Papua; 7).Mahasiswa Papua akan pulang ke tanah air, jika dan hanya jika, keputusan referendum diberlakukan di West Papua; 8).Rakyat dan Mahasiswa Papua di luar Papua siap kepung Jakarta untuk meminta Jokowi memulangkan kami dengan syarat berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri melalui mekanisme referendum; 9). Persoalan Papua bukan persoalan rumah tangga Indonesia, persoalan Papua merupakan persoalan penjajahan terhadap suatu bangsa yang telah merdeka; 10).Maka kami menuntut agar adanya intervensi dari dunia Internasional; 11).Buka akses

wartawan dan jurnalis asing meliput di Papua; 12).Hentikan Rasisme!! Manusia Papua Bukan Monyet!!; 13). Hentikan seluruh aktivitas aparat dalam hal ini TNI-POLRI melakukan intimidasi terhadap Pelajar/Mahasiswa Papua lewat dunia pendidikan; 14). Tarik TNI-POLRI organik maupun non-organik dari seluruh Tanah Papua.

Selain menyampaikan 14 pernyataan sikapnya, dalam aksi damai tersebut para mahasiswa juga melakukan orasi dan membawa atribut yang pada intinya sudah melenceng dari pemberitahuan awal. Atas situasi ini sebagai Kapolres saya sempat meminta mahasiswa untuk menyampaikan tuntutannya sesuai dengan isi surat pemberitahaun. Saya ingin mereka konsisten dengan sikap awalnya. Namun demikian demo berjalan aman sampai selesai.

Kapolres memastikan bahwa, meskipun isi tuntutan melenceng dari isi surat pemberitahuan namun tidak ada satu mahasiswa atau peserta aksi damai yang ditangkap atau ditahan. Kami memberikan pengamanan secara maksimal sehingga aksi tersebut bisa berjalan dengan aman hingga selesai.

Kapolres juga menyampaikan bahwa terkait informasi soal adanya intimidasi terhadap para mahasiswa Papua itu tidak benar. Kalau ada anggota yang mendatangi para mahasiswa di lingkungannya itu hanya untuk kepentingan keamanan semata. Kami ingin mereka dalam keadaan aman menjalani rutinitasnya sebagai mahasiswa hingga selesai dan kembali mengabdi di daerah asalnya dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, Kapolres juga meminta agar adanya perhatian dari pemerintah daerah asal agar para mahasiswa bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik. Pemerintah daerah asal mestinya memikirkan juga tempat tinggal yang representatif dan nyaman bagi mahasiswa. Selain itu gerakan orang tua asuh bagi mahasiswa Papua di Kota Kupang juga mesti mulai dipikirkan sehingga ada dukungan nyata bagi mereka terutama dari hal-hal negatif yang dapat mengganggu proses perkuliahannya.

8) Melakukan pendampingan kepada para mahasiswa eksodus yang ditahan di Mako Brimob Kotaraja

Sebanyak 733 mahasiswa eksodus yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) diamankan di Mako Brimob Kotaraja. Para mahasiswa eksodus ini diamankan oleh Satuan

Brimob Polda Papua karena terlibat bentrok dengan aparat keamanan di Expo Waena, pada Senin (23/9). Bentrok ini bermula dari adanya aksi demo yang dilakukan oleh para mahasiswa eksodus di halaman gedung Rektorat Universitas Cenderawasih, Abepura.

Awalnya para mahasiswa eksodus ini menggelar aksi damai dan berniat membuka posko di halaman gedung Rektorat Universitas Cenderawasih Abepura. Aksi ini berlangsung aman dengan kawalan ketat dari pihak keamanan. Namun pihak Universitas Cenderawasih memandang bahwa aksi para mahasiswa eksodus ini sangat mengganggu sehingga harus dibubarkan.

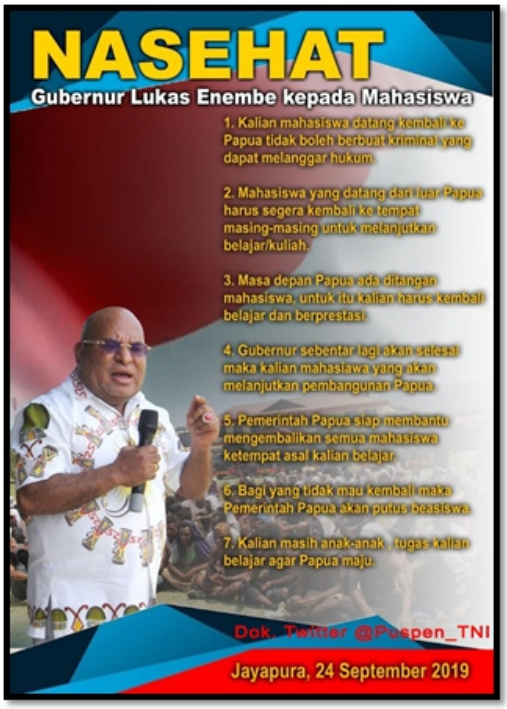
Atas permintaan pihak Universitas Cenderawasih maka pihak keamanan melakukan negosiasi dengan para mahasiswa dan selanjutnya diantar kembali ke asrama di kawasan Ekspo, Waena. Namun ketika tiba di Ekspo, situasi berubah ricuh. Bentrok pun terjadi antara aparat dan para mahasiswa. Akibatnya seorang anggota TNI, Praka Zulkifli Karim dan empat warga sipil lainnya meninggal dunia. Sementara korban luka 24 orang warga sipil dan 7 anggota Brimob luka berat.

Sejak mereka diamankan di Mako Brimob, Komnas HAM Papua terus melakukan pendampingan untuk memastikan tidak adanya perlakuan sewenang-wenang dari aparat. Para mahasiswa eksodus meminta agar Komnas HAM Papua bersama Gubernur Papua melakukan upaya negosiasi agar mereka dapat kembali ke rumah masing-masing.



Negosiasi bersama Forkopimda Papua terhadap 733 mahasiswa yang ditahan di Mako Brimob Polda Papua

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Papua yang didampingi oleh Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih meminta dengan tegas kepada para mahasiswa agar tidak melakukan tindakan anarkis yang merugikan orang banyak. Tidak boleh ada lagi tindakan kriminal sebab telah banyak korban mati sia-sia. Gubernur juga menyampaikan kekecewaannya terhadap para mahasiswa eksodus yang beberapa kali diundang untuk bertemu namun menolak. Selain itu Gubernur juga menyatakan bahwa Pemda Provinsi Papua siap untuk memulangkan para mahasiswa ke kota studinya masing-masing.



7 Nasehat Gubernur Papua Lukas Enembe, terhadap 733 mahasiswa saat demo terjadi

Setelah melakukan pertemuan dengan para mahasiswa eksodus Komnas HAM Papua bersama Gubernur Papua meminta kepada Polda Papua agar para mahasiswa eksodus ini dipulangkan ke tempat tinggalnya masing-masing. Sebanyak 733 mahasiswa eksodus akhirnya dipulangkan sementara 7 orang lainnya ditahan untuk kepentingan penegakan hukum.

9) Melakukan Pemantauan terhadap para tahanan di Balikpapan

Pada Senin, 23 September 2019 terjadi bentrok antar aparat keamanan dan para mahasiswa eksodus yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)di Taman Expo, Waena yang mengakibatkan seorang anggota TNI, Praka Zulkifli Karim dan empat warga sipil lainnya meninggal dunia, 24 orang warga sipil dan 7 anggota Brimob luka berat. Bentrok ini bermula dari adanya aksi demo yang dilakukan oleh para mahasiswa eksodus di halaman gedung Rektorat Universitas Cenderawasih, Abepura. Pihak Universitas Cenderawasih menolak para mahasiswa eksodus yang hendak menjadikan halaman gedung rektorat sebagai poskohnya.

Akhirnya, sebanyak 733 mahasiswa eksodus diamankan di Mako Brimob Kotaraja. Setelah itu, sebanyak 762 orang dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Sementara 7 orang ditahan untuk kepentingan penegakkan hukum.

Ketujuh orang itu adalah Agus Kosai, (Ketua KNPB), Buktar Tabuni (Eksekutif ULMWP), Feri Gombo, (Ketua BEM Uncen), Aleks Gobai, (Ketua BEM USTJ, Hengki Hilapok, Irwanus Uropmabin, Stevanus Itlai (mahasiswa). Mereka ditahan karena diduga sebagai pihak yang bertanggung jawab menggerakan masa untuk melakukan aksi demosntrasi anti rasisme yang berakhir ricuh dengan pihak keamanan.

Dalam perkembangannya, atas pertimbangan keamanan, Polda Papua memindahkan 7 tahanan tersebut ke Polda Kalimantan Timur untuk menjalani proses hukum.

Atas peristiwa ini, keluarga para korban mengadu ke Komnas HAM Papua. Para keluarga korban menyatakan keberatan karena pemindahan para tahanan tanpa pemberitahuan kepada keluarga mengenai alasan pemindahan tersebut.

Menindaklanjuti pengaduan ini Komnas HAM melakukan pemantauan ke Balikpapan, Kalimantan Timur pada 19 Oktober 2019 untuk memastikan kondisi pemenuhan HAM bagi ketujuh tahanan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut mereka menyampaikan bahwa selama berada di tahanan Polda Kaltim, mereka diperlakukan baik oleh aparat dan ditahan dalam ruangan yang layak. Mereka juga menyatakan bersedia menjalani proses hukum dan meminta

agar menjalani persidangan di Papua. Mereka yakin dan menjamin bahwa tidak akan ada pengerahan massa untuk mengganggu jalnnya sidang.



Bertemu para tahanan di Polda Kaltim

Selain itu mereka meminta agar Komnas HAM terus memantau dan memastikan agar proses hukum ini berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang menjamin penerapan nilai-nilai dan prinsip HAM. Para tahanan yang masih berstatus mahasiswa meminta agar Komnas HAM Papua memperjuangkan nasib mereka agar bisa melanjutkan kuliahnya setelah menjalani proses hukum.

III
PERSOALAN NDUGA BELUM SELESAI

A. Kondisi HAM di Nduga

Situasi HAM di Papua saat ini telah menjadi perhatian publik baik di tingkat nasional maupun dunia internasional. Salah satu kasus yang menonjol sepanjang 2019 adalah konflik bersenjata di Nduga.

Nduga merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya. Secara administratif berdiri pada 04 Januari 2008 melalui UU Nomor 6 Tahun 2008.

Hal yang masih melekat dalam ingatan publik, Nduga pernah menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) Indonesia pada 9 Mei 1996 dalam Operasi Pembebasan 11 orang Tim Expedisi Lorentz dan World Wildlife Fund (WWF) yang disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) di Mapenduma.

Operasi ini mengakibatkan banyak korban jiwa. Aparat militer melakukan tindakan secara brutal. Hingga saat ini masyarakat Nduga mengalami trauma.

Tidak berhenti sampai disitu, rangkaian konflik bersenjata yang didalangi oleh TPN OPM mulai kembali terjadi terjadi pada 2017, dimana pada 12 Desember 2017 TPN OPM melukai seorang anggota TNI an. Prada Didimus Abidondifu dan menembak mati Yovicko Sondak, operator alat berat yang sedang mengerjakan proyek pembangunan jalan di Distrik Mugi.

Pada 01 Januari 2018, anggota TNI menyiksa warga sipil an. Anekanus Kamaringgi hingga meninggal di Pos TNI di Keneyem. Pada 03 Januari 2018 aparat TNI di Pos Napua–Wamena melakukan intimidasi terhadap beberapa warga sipil Nduga yang hendak ke Wamena dan melakukan penyiksaan terhadap Abola Kogoya dan Wegianus Murib. Pada Juni 2018, saat momen menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilgub) juga terjadi serangkaian kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh TPN OPM diantaranya, pada 22 Juni TPN OPM menembak pesawat Dimonim Air dari Timika yang hendak mendarat di Keneyem. Pada 25 Juni 2018 TPN OPM menyerang pesawat Trigana Twin Otter yang disewa Brimob Polda Papua untuk pengamanan Pilkada di Nduga. Pada Oktober 2018 TPN OPM menyekap belasan Guru SD YPGRI 1 dan SMPN 1 dan juga

Petugas Puskesmas di Mapenduma.

Pada awal Desember, tepatnya pada 01-02 Desember 2018, TPN-OPM pimpinan Egianus Kogoya menyerang dan membantai puluhan pekerja PT. Istaka Karya. Sebanyak 24 orang disandera. 17 orang diantaranya dibunuh secara sadis.

Peristiwa ini berawal dari pertengahan November 2018, dimana saat itu TPN OPM pimpinan Egianus Kogoya mengirimkan dua pucuk surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Jhoni Arung (Site Operation Manager PT. Istaka Karya).

Dalam suratnya kepada Jhoni Arung, TPN-OPM meminta kepada semua pekerja untuk berhenti kerja dan meninggalkan lokasi proyek sebelum tanggal 01 Desember 2018 atau paling lambat 23 November 2018. TPN-OPM meminta agar lokasi proyek dikosongkan karena akan dilakukan perayaan peringatan hari kemerdekaan Papua Barat pada 1 Desember 2018.

Namun hal tersebut tidak diindahkan. Jhoni Arung beralasan bahwa proyek harus selesai tepat waktu. Pada 23 November TPN OPM kembali mengingatkan para pekerja untuk segera meninggalkan lokasi kerja. Namun sampai 30 November 2018 para pekerja masih menyelesaikan pekerjaan di jembatan kali Aorak dan kali Yigi Distri Yal.

Pada 01 Desember, TPN OPM mengadakan upacara peringatan hari kemerdekaan. Sore harinya mereka mengantar seekor babi ke Gereja sebagai persembahan.

Pada 02 Desember anggota TPN OPM menjemput paksa 24 pekerja dari camp dan seorang pegawai Kementerian PUPR di Kampung Yigi I ke Gunung Kabo. Ditempat ini pimpinan TPN OPM, Egianus Kogoya meminta Jhoni Arung datang dan menjelaskan alasan tidak menjalankan permintaan sesuai surat yang diterima. Sampai sekitar pukul 13.00 Jhoni Arung tak kunjung datang. Akhirnya TPN-OPM menembak mati 17 orang 7 orang lainnya berhasil menyelamatkan diri.

Pasca pembantaian tersebut, pemerintah meresponnya dengan kebijakan penegakan hukum dan pemulihan keamanan. Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya meminta aparat keamanan mengejar dan menuntas para pelaku sampai ke akar-akarnya. Panglima TNI dalam pernyataannya menyerukan agar para pelaku menyerah tanpa syarat atau akan dikejar hidup ataupun mati. Menkopulhukam dalam pertnyataannya, berniat menurunkan pasukan non organik untuk menumpas para pelaku.

Pada 04-05 Desember, ribuan aparat keamanan gabungan TNI dan Polri diturunkan ke Nduga khususnya ke wilayah terjadinya

pembantaian untuk mengevakuasi korban dan memburu para pelaku.

Beberapa saksi, warga setempat, menerangkan bahwa aparat keamanan gabungan TNI dan Polri menyerang menggunakan 4 buah helikopter dan puluhan mobil *strada*. Aparat keamanan melakukan penembakan dan menjatuhkan alat peledak menyerupai granat ke Kampung Opmo dan kampung-kampung lainnya di sekitar Distrik Mbua, Distrik Bulmuyalma dan Distrik Dal. Dalam sebuah pernyataan Pangdam XVII Cenderawasih menjelaskan bahwa alat peledak yang disampaikan warga adalah granat asap, berjenis GT-6 AS, buatan pindad.

Akibatnya warga setempat yang berada di tiga distrik tersebut menjadi panik dan ketakutan hingga melarikan diri ke hutan.

Setelah operasi penyisiran, ribuan aparat keamanan ditempatkan di beberapa distrik di Nduga demi alasan keamanan. Akibat pengamanan secara massif, ribuan penduduk lokal merasa tidak aman dan mengungsi ke wilayah terdekat diantaranya Lanny Jaya, Jawawijaya dan Mimika.

Pemerintah Provinsi Papua, melalui dinas kesehatan melaporkan bahwa pengungsi berasal dari 13 Distrik di Nduga yaitu distrik Mbua, Dal, Mbulmuyalma, Mapenduma, Yiginirkuri, Kageam, Paro, Mebarok, Gesekema, Jengelo, Amala dan Klimid. Pemerintah terus berupaya agar para pengungsi kembali ke tempat asalnya. Namun upaya ini belum maksimal.

B. Upaya Komnas HAM

1) Komnas HAM Pusat

Selain memantau peristiwa Wamena, Tim Komnas HAM RI juga melakukan monitoring terhadap peristiwa Nduga. Fokus monitoring dilakukan terhadap kondisi para pengungsi Nduga yang tersebar dibeberapa wilayah di Provinsi Papua.

Melalui monitoring Komnas HAM menemukan beberapa fakta sebagai berikut:

Pertama; bahwa para pengungsi Nduga masih tersebar di beberapa wilayah di Papua seperti di Kabupaten Lani Jaya dan Jayawijaya. Para pengungsi sangat membutuhkan bantuan kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari;

Kedua; bahwa pemberian bantuan kepada para pengungsi Nduga sudah sangat banyak dilakukan oleh Pemerintah Pusat seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah

Kabupaten/Kota dimana para pengungsi itu berada;

Ketiga; bahwa pemberian bantuan tersebut mendapat kendala karena para pengungsi Nduga menolaknya dengan alasan, distribusi bantuan-bantuan tersebut melibatkan aparat Kepolisian dan TNI;

Keempat; bahwa ada pengungsi Nduga yang meninggal dunia seperti yang terjadi di Kabupaten Lani Jaya sebanyak 7 (tujuh) orang karena kondisi kesehatannya yang memburuk.

2) Upaya Komnas HAM Papua

1) Pemantauan Kondisi Para Pengungsi di Wamena

Awal Desember 2018, ratusan penduduk dari Nduga mengungsi ke Wamena. Mereka mengungsi karena merasa takut terhadap kehadiran aparat keamanan yang melakukan operasi gabungan TNI dan Polri untuk mengejar dan menangkap anggota KKB pimpinan Egianus Kogoya yang diduga melakukan pembunuhan terhadap para pekerja PT. Istaka Karya.

Operasi gabungan ini berpotensi menimbulkan kepanikan dan ketakutan bagi masyarakat Nduga, terutama bagi masyarakat yang berada atau tinggal di dalam wilayah operasi tersebut. Jika mereka memilih untuk tetap tinggal di kampungnya ada kemungkinan mereka akan dituduh sebagai anggota KKB. Oleh sebab itu, tak ada jalan lain untuk bertahan hidup, selain mengungsi ke daerah lain yang dianggap lebih aman, seperti di Wamena.

Setelah tiba di Wamena, para pengungsi Nduga mengalami masalah baru. Mereka tinggal di tenda-tenda darurat dalam kondisi makan yang tidak cukup dan rentan mengalami gangguan kesehatan. Kondisi ini menjadi sorotan di media massa.

Menyikapi kondisi ini, Komnas HAM Papua melakukan pemantauan ke Wamena untuk mengetahui kondisi HAM para pengungsi terkait pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokoknya. Selain itu Komnas HAM Papua ingin berkoordinasi dan memastikan agar pemerintah daerah setempat melakukan upaya cepat untuk pemenuhan kebutuhan pokoknya.

Pada, 22 Agustus 2019, Komas HAM Papua melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, yakni

Bupati, Asisten I dan Kepala Biro Hukum.



Bertemu Bupati Jayawijaya

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Jayawijaya, Jhon R Banua menjelaskan bahwa, pada awalnya, setelah informasi ini beredar luas, Pemerintah Jayawijaya sudah berencana melakukan pendekatan untuk bertemu dengan para pengungsi guna dilakukan pendataan. Rencana awal ini mengalami kendala karena para pegiat HAM yang sejak awal mendampingi para pengungsi, tidak memperbolehkan pemerintah untuk masuk ke lokasi dengan berbagai alasan. Sejumlah alasan yang disampaikan kami anggap sangat politis dan tidak berdasar. Ini menyebabkan hak-hak dasar para pengungsi terabaikan. Namun demikian, sebagai Bupati kami siap memberikan bantuan dan pelayanan kepada mereka.

Hingga kini Pemda Jayawijaya belum mengetahui secara pasti penyebaran para pengungsi. Apalagi para pendamping tidak bisa dimintai keterangan tentang jumlah dan lokasi pengungsiannya. Informasi beredar bahwa para pengungsi berada di wilayah Yelekmane di halaman Gereja Kingmi. Selain itu, ada juga yang sudah tinggal dengan keluarga mereka yang ada di Wamena.

Dalam perkembangannya kami melakukan pertemuan bersama pemerintah Kabupaten Nduga guna membahas penanganan lanjutan bagi para pengungsi, terutama membahas mengenai pelayanan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah dan

persiapan pelaksanaan ujian karena saat itu sudah mendekati pelaksanaan ujian nasional (UN) bagi siswa SD, SMP dan SMA.

Dari pertemuan itu, kami sepakat bahwa untuk kepentingan pemenuhan hak atas pendidikan Pemda Jayawijaya siap memfasilitasi gedung sekolah bagi anak-anak pengungsi. Kami menawarkan agar beberapa sekolah di Wamena bisa dipakai untuk proses belajar dan pelaksanaan ujian. Secara teknis akan diatur jadwal penggunaan gedung sekolah tersebut termasuk guru-gurunya kalau diperlukan selain para guru dari Nduga.

Namun upaya ini mendapat penolakan dari para pendamping. Hingga saat ini anak-anak pengungsi hanya menggunakan tenda darurat sebagai sekolah di lokasi pengungsian.

Pasca pertemuan tersebut, Pemda Nduga tidak berkoordinasi lagi dan tidak menunjukan upaya serius untuk penanganan berkelanjutan bagi para pengungsi.

Terkait pemenuhan hak atas kesehatan, pada prinsipnya Pemda Jayawijaya siap memberikan pelayanan bagi mereka. Namun sekali lagi, kami memiliki kendala karena belum mempunyai data yang akurat terkait jumlah pengungsi, tidak ada komunikasi dan koordinasi dari Dinas Kesehatan Nduga dan adanya penolakan dari para pendamping.

Meskipun kondisinya demikian Pemda Jayawijaya tetap memberikan pelayanan kesehatan bagi pengungsi. Sejumlah fasilitas seperti puskesmas dan rumah sakit siap untuk melayani para pengungsi yang membutuhkan penanganan secara medis.

Dalam pengamatan kami, keberadaan pengungsi ini sudah menjadi perhatian dari berbagai kalangan misalnya, pemerintah pusat, Duta Besar Amerika, Duta Besar Belanda, Dewan Gereja-gereja Sedunia, dan pegiat HAM lainnya. Kami hanya bisa menjelaskan sesuai dengan kondisi yang dialami.

Kehadiran Kementerian Sosial RI, melalui Dirjen Kemensos dan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPPA) dan para Psikolog bermaksud untuk memberikan bantuan berupa sembako atau makanan instan, obat-obatan dan penanganan khusus bagi upaya pemulihan mentalnya. Namun bantuan ini ditolak oleh para pengungsi.

Berdasarkan informasi yang kami terima, para pengungsi bersedia menerima bantuan dari pemerintah asalkan semua pasukan TNI/Polri yang melakukan operasi gabungan di Nduga

ditarik dari Nduga.

Dari sisi HAM kami ikut prihatin dan peduli terhadap kondisi para pengungsiyang berada di Wamena. Kami selalu menawarkan bantuan, serta memfasilitasi para pihak dari kementerian dan pemerintah provinsi. Tetapi faktanya masih ada penolakan. Hingga kini kami terus berkordinasi dengan Pemda, karena bagaimanapun, para pengungsi adalah warga Nduga yang mengungsi di wilayah pemerintahan kami.

Asisiten I Setda Jayawijaya, Tinggal Wasono menyarankan agar pihak Komnas HAM berkoordinasi dengan Pemda Nduga dengan harapan agar para pendamping dan pengungsi bisa menerima bantuan dari pemerintah atau pihak lainnya.

Pada akhir pertemuan, Bupati Jayawijaya menyarankan, agar Pemda Nduga dan Tim Relawan lebih terbuka dan mau bekerjasama dengan Pemda Jayawijaya untuk pelayanan kemanusiaan bagi para pengungsi di Wamena.

2) Pemantauan Kondisi Para Pengungsi di Lanny Jaya

Selain Wamena, ratusan penduduk dari Nduga mengungsi ke Lanny Jaya. Untuk mengetahui kondisi HAM para pengungsi terkait pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokoknya Komnas HAM Papua melakukan pemantauan ke Lanny Jaya. Komnas HAM Papua melakukan pertemuan dengan Pemda Kabupaten Lanny Jaya diwakili oleh Asisten III, Alvius Jigibolom pada Jumat, 23 Agustus 2019.

Pada kesempatan tersebut, Asisten III menjelaskan bahwa para pengungsi Nduga yang datang ke Lanny Jaya, sebagian besar berasal dari Distrik Kuyawage. Distrik ini berbatasan langsung dengan wilayah Lanny Jaya. Para pengungsi ada yang tinggal dan bergabung bersama warga setempat. Ada pula yang tinggal di tenda-tenda darurat dan tenda yang disiapkan Pemda Lanny Jaya.

Pemda Lanny Jaya belum mengetahui jumlah para pengungsi dengan pasti karena belum menerima data dari Pemda Nduga. Saat ini kami sudah memerintahkan para kepala distrik dan kepala kampung untuk melakukan pendataan.

Informasi yang beredar, jumlah pengungsi sudah mencapai 700 kepala keluarga sejak pertama datang ke Distrik Kuyawage. Tetapi saat ini jumlahnya sekitar 300 kepala keluarga karena

sebagiannya sudah ke Wamena.

Menyikapi keadaan ini, Pemda Lanny Jaya menyatakan keprihatinan dan berupaya memberikan bantuan sejumlah bahan makanan dan obat-obatan berupa, beras sebanyak dua ton, sejumlah tenda, pakaian dan obat-obatan dari.

Kami mengantar bantuan tersebut bersama TNI dan Polri yang bertugas di wilayah Lanny Jaya. Namun pada saat pendistribusiannya, kami tidak bisa sampai ke Distrik Kuyawage karena akses jalannya tidak memungkinkan untuk dilintasi kendaraan. Kami hanya sampai di kampung Malagai, dekat Distrik Kuyawage. Selanjutnya kepala distrik dan kepala kampung beserta warga yang mengantar bantuan tersebut ke Distrik Kuyawage untuk dibagikan ke pengungsi.

Ada juga bantuan yang berasal dari dari Palang Merah Indonesia (PMI). Pemda Lanny Jaya memfasilitasi PMI untuk mengantar bantuan tersebut. Hingga saat ini belum ada bantuan dari pemerintah pusat. Kami mendengar informasi bahwa akan ada bantuan dari pemerintah pusat, namun sampai sekarang belum terealisasi.

Sampai saat ini, Pemda Nduga belum berkoordinasi dan bertemu dengan Pemda Lanny Jaya untuk membahas skema penanganan bagi para pengungsi yang ada disini. Kami belum tahu persis bagaimana kondisi para pengungsi terutama soal kebutuhan dasarnya termasuk pendidikan dan kesehatan.

Tidak mungkin anggaran APBD Pemda Lanny Jaya hanya dipakai untuk penanganan para pengungsi semata. Kami menyadari bahwa Pemda Lanny Jaya belum memberikan pelayanan secara maksimal bagi saudara-saudara kita yang mengungsi di Distrik Kuyawage.

Namun demikian, Pemda Lanny Jaya tetap berupaya untuk memberikan perhatian bagi para pengungsi terutama mengenai kesehatan dan pendidikan. Kami telah memerintahkan Dinas Kesehatan agar memberikan pelayanan kesehatan bagi para pengungsi yang membutuhkan penanganan medis. Para petugas medis yang berada di kampung-kampung, di Distrik Kuyawage masih tetap melayani walaupun banyak kekurangan dari sisi fasilitas sarana prasarana dan obat-obatan.

Sedangkan bagi anak-anak usia sekolah, Pemda Lanny Jaya memberi kesempatan atau menawarkan agar mereka bisa mengikuti kegiatan belajar di sekolah-sekolah yang ada di

distrik. Kami sudah memerintahkan para kepala sekolah agar menerima anak-anak usia sekolah untuk mengikuti proses belajar.

Selain bertemu Asisten III, Komnas HAM juga melakukan pertemuan dengan Kepala Distrik Kuyawage, Yafet Kogoya dan Kepala Kampung Liwaren, Iwenus Telenggen pada 24 Agustus 2019.

Dalam pertemuan itu, Kepala Distrik Kuyawage menjelaskan bahwa, Distrik Kuyawage terdiri dari 9 kampung. Sedangkan para pengungsi Nduga menyebar di 6 kampung yaitu Kampung Liwaren, Yugunuba, Tunigele, Upaga, Kuyawage dan Wome.



Bertemu Kepala Distrik Kuyawage

Para pengungsi yang datang ke Distrik Kuyawage diantar oleh gembala dari Gereja Kemah Injil dan Baptis. Saat pertama kali datang para pengungsi langsung menyebar ke 6 Kampung sebanyak 714 KK. Saat ini tersisa kurang lebih 400 KK. 300 KK lainnya sudah mengungsi ke Wamena. Sementara janda, duda dan anak-anak sebanyak 200 jiwa.

Terkait bantuan, Kepala Distrik Kuyawage, menjelaskan bahwa pihak gereja mengusulkan agar bantuan difokuskan pada tenda-tenda sebagai tempat tinggal darurat. Hingga saat ini, para pengungsi sudah menerima bantuan dari Pemda Lanny Jaya, Kementerian Sosial dan PMI. Bantuan dari pemerintah Provinsi

Papua berupa beras 2 ton, minyak goreng, super mie, tenda 10 buah dan bantuan lainnya sudah disalurkan ke para pengungsi. Lembaga UNICEF pernah meminta data melalui telepon kepada Danramil, tetapi sampai sekarang belum terealisasi.

Dalam hal pelayanan kesehatan, sudah dilakukan pemeriksaan oleh petugas medis secara rutin termasuk lanjutan program Polio. Para petugas medis didatangkan dari dari distrik terdekat, karena di Distrik Kuyawage belum ada petugas medis yang menetap mungkin karena faktor wilayah yang jauh.

Bagi anak-anak usia sekolah, mereka ikut bergabung dengan anak-anak setempat dan belajar di sekolah yang ada di distrik. Tenaga guru tetap belum ada, sementara ini kegiatan belajar mengajar dilayani oleh pihak gereja dan warga di distrik yang dianggap cakap.

Menurut Kepala Kampung Liwaren, Iwenus Telenggen , bahwa sejak adanya pengungsi di Kuyawage, sudah ada 5 orang yang meninggal dunia karena sakit, 3 orang di Kampung Liwaren, 1 orang di Kampung Tunigele dan 1 orang di Kampung Upaga.

Dalam perkembangannya, para pengungsi tidak lagi menetap di tenda-tenda. Saat ini sebagian pengungsi mulai membangun honai untuk tempat tinggal mereka. Selain itu, para pengungsi mulai membuka kebun dan hidup membaur bersama masyarakat setempat.

Komnas HAM Papua juga bertemu dan meminta keterangan Ketua Klasis Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua Wilayah Kuyawage, Arigi Wenda. Dalam kesempatan tersebut, Arigi Wenda menjelaskan bahwa, sejak Desember 2018, pasca peristiwa penembakan pekerja jembatan oleh kelompok TPN OPM Egianus Kogoya, para pengungsi Nduga yang tinggal di distrik-distrik yang berbatasan langgsung dengan Kabupaten Lanny Jaya, mengungsi ke Distrik Kuyawage di Lanny Jaya. Jumlahnya diperkirakan 700 orang. Kami belum melakukan pendataan secara detail.

Sejak para pengungsi datang, mereka diterima dan ditangani oleh Gereja Baptis di 7 kampung yakni Gereja Baptis Kampung Liwaren, Kampung Ageowak, Kampung Yugume, Kampung Bobonime, Kampung Alea, Kampung Tunikele, Kampung Wupaga.

Setelah itu para pengungsi bergabung dengan warga

setempat. Kami meminta warga setempat agar masing-masing kepala keluarga menerima dan menampung para pengungsi sesuai kemampuannya.

Namun dalam pelaksanaanya kami menemui kendala. Karakter sosial, budaya dan bahasa masyarakat Nduga agak berbeda dengan masyarakat Lanny Jaya. Cara mereka bersosialisasi agak tertutup. Hanya sedikit dari pengungsi Nduga yang bisa berbicara dalam bahasa Lanny Jaya.

Hal ini sangat mempengaruhi relasi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Para pengungsi yang tidak bisa berbahasa Lanny Jaya cenderung membentuk komunitas atau kelompok-kelompok kecil dan menyebar di Kuyawage. Hal ini cukup mengganggu terutama dalam proses pendataan, pendistribusian dan pelayanan bagi mereka.

Terkait penanganan pemerintah dan bantuan kemanusiaan Arigi Wenda, menyampaikan bahwa para pengungsi baru menerima bantuan dari Pemda Lanny Jaya.

Saat ini, para pengungsi sangat membutuhkan makanan. Persediaan bahan makanan tidak cukup untuk mereka bertahan hidup. Akibatnya, sebagian besar pengungsi keluar dari Kuyawage pindah ke daerah lain, misalnya di Wamena. Ada juga yang dijemput oleh keluarganya.

Tentang pelayanan kesehatan, Arigi Wenda, menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan berjalan baik di beberapa puskesmas di distrik Kuyawage. Para petugas medis tetap memberikan pelayanan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan. Upaya ini memang belum maksimal karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Arigi Wenda juga menyampaikan bahwa, sejak kedatangan para pengungsi, sudah 5 orang yang meninggal dunia akibat sakit, yakni, 4 orang dewasa dan 1 bayi.

Tentang pelayanan pendidikan, Arigi Wenda, menjelaskan bahwa proses belajar anak-anak pengungsi maupun anak-anak setempat tidak berjalan efektif karena kesulitan tenaga pengajar. Jumlah tenaga pendidik sangat terbatas.

Selain itu, ketika Komnas HAM Papua berada di Kampung Uwome berpapasan dengan rombongan pengungsi yang datang dari arah Kampung Liwaren. Salah satu warga menginformasikan bahwa mereka baru datang dari Nduga dua minggu yang lalu. Para pengungsi itu berjumlah 72 orang, terdiri

dari, anak-anak 35 orang, ibu-ibu 22 orang, dan laki-laki dewasa 15 orang.

Saat bertemu rombongan pengungsi ini, Komnas HAM Papua sempat berinteraksi dan berencana untuk mewawancarai mereka. Namun upaya ini gagal karena para pengungsi memilih untuk diam dan tertutup. Selain itu kendala bahasa yang menyulitkan kami untuk berkomunikasi.

Selanjutnya, sekitar pukul 12.00, ketika Komnas HAM Papua memasuki Kampung Liwaren langsung dihadang oleh tiga orang yang diduga anggota KKB. Mereka menodong menggunakan senjata api dan alat tajam. Salah satu dari mereka mengatakan: "*Kalau kalian mau mendata pengungsi, silahkan ke Wamena dan bertemu dengan relawan pegiat HAM yang mengkoordinir para pengungsi di Wamena. Kami tidak ijikan kalian bertemu dengan para penggungsi di sini*."

Rupanya ketiga orang yang diduga KKB ini mengawal dan mengantar para pengungsi tadi ke Distrik Kuyawage dan selanjutnya menempuh perjalanan menuju ke Wamena.



Bertemu pengungsi Nduga di Kab. Lanny Jaya Distrik Kuyawage

3) Bertemu Para Pengungsi di Kampung Sapalek, Distrik Napua

Pada 25 Agustus 2019, Komnas HAM Perwakilan Papua bertemu para pengungsi di Kampung Sapale, Distrik Sinakma, Wamena.

Ketika tiba di Kampung Sapale, Komnas HAM Papua melihat langsung salah satu tenda yang dipakai untuk pelaksanaan proses belajar mengajar dan bertemu para guru, anak-anak sekolah dan pihak gereja. Tenda yang digunakan sebagai sekolah darurat ini berada di halaman gereja. Pembagian ruang kelasnya, menggunakan sekat seng sebagai pembatas. Proses belajar mengajar ini dilayani oleh para guru dari Nduga dan pihak Gereja.

Setelah itu, Komnas HAM Papua bertemu para pengungsi di Kampung Yelekme (Misi). Saat itu ada seorang pengungsi yang baru saja meninggal, yakni, Eniana Kogoya (P), umur 25 tahun, berasal dari Distrik Mam, Kabupaten Nduga. Eniana meninggal pada 25 Agustus 2019, pukul 08.00 karena sakit. Selama sakit korban tidak pernah mendapat perawatan medis.

Menurut keterangan Gembala Gereja Kemah Injil, Mikael Nirigi, bahwa di tempat yang sama sebelumnya sudah ada dua orang pengungsi yang meninggal dunia, yakni, Aini Gwijangge (L), 21 tahun, asal Distrik Mam, meninggal pada 14 Agustus 2019 karena sakit muntah darah. Sedangkan korban yang lain, atas nama, Terten Nirigi (P), umur 17 Tahun, asal Distrik Mugi, meninggal pada 20 Agustus 2019 karena sakit akibat kelaparan.

Berdasarkan data, keterangan, informasi hasil pemantauan lapangan di Wamena dan lanny Jaya, Komnas HAM Papua mengungkap sejumlah fakta sebagai berikut:

Bahwa pelaksanaan operasi gabungan TNI/Polri di Nduga untuk menumpas KKB telah menimbulkan kepanikan atau ketakutan luar biasa bagi warga sipil di Nduga terutama di sekitar wilayah pelaksanaan operasi gabungan tersebut;

Bahwa, akibat kondisi ini sejumlah warga sipil Nduga mengungsi ke Wamena dan Lanny Jaya untuk menyelamatkan diri dan keluarganya;

Bahwa, Pemda Wamena, Lanny Jaya dan Nduga belum melakukan pendataan secara menyeluruh mengenai jumlah pengungsi Nduga dan persebarannya;

Bahwa, para pengungsi yang berada di Wamena dan Lanny Jaya belum mendapat pelayanan secara maksimal dari pemerintah terutama pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan termasuk pemenuhan hak atas kesehatan dan pendidikan;

Bahwa, para pengungsi Nduga menolak sejumlah bantuan terutama dari pemerintah;

Bahwa, sejak berada di Wamena dan Lanny Jaya, para pengungsi didampingi oleh pihak Gereja dan sejumlah pegiat HAM;

Bahwa, hingga saat ini komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dengan pihak gereja serta pendamping para pengungsi belum maksimal sehingga menyulitkan upaya penanganan para pengungsi secara bersama.

IV
CAPAIAN STRATEGIS KOMNAS HAM PAPUA

A. Pemantauan

Sepanjang 2019 perjalanan kehidupan masyarakat di Tanah Papua tak lepas dari berbagai peristiwa yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Rakyat Papua memandang bahwa dalam berbagai tindakan atau kebijakan Pemerintah cenderung tidak adil dan diskriminatif. Hal ini berdampak pada munculnya berbagai gejolak.

Menyikapi kondisi ini, untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum, pemerintah cenderung reaktif melalui pendekatan keamanan. Dalam penerapannya, tak jarang menimbulkan masalah bahkan sampai merenggut korban jiwa, baik itu aparat keamanan maupun masyarakat sipil dan KKB.

Selain itu dalam konteks pemenuhan HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya muncul berbagai persoalan ketimpangan yang berdampak pada tingkat kesejateraan warga negara terutama OAP. Otsus yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan mendasar OAP, ternyata dalam realisasinya belum menampakan kemajuan berarti.

Berdasarkan amanat UU Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM Papua memantau beragam peristiwa yang mengindikasikan adanya pelanggaran HAM di bidang sipil dan politik melalui tindakan kekerasan maupun di bidang ekonomi, sosial dan budaya melalui kebijakan.

1) Pengejaran dan penangkapan Warga Binaan Lapas Klas IIA Abepura yang kabur berujung kematian

Pada 24 April 2019, Kota Jayapura dihebohkan dengan berita kaburnya sejumlah warga Binaan Lapas Klas IIA Abepura. Terhadap peristiwa ini, pihak Lapas Klas IIA Abepura bekerja sama dengan aparat kepolisian melakukan upaya penyisiran untuk mengejar dan menangkap para narapidana yang berhasil kabur. Dalam upaya ini dikabarkan dua orang narapidana meninggal dunia. Satu diantaranya, diduga meninggal karena dikeroyok massa pada saat melakukan pengejaran. Sedangkan yang lainnya diduga meninggal karena sakit.

Atas peristiwa ini keluarga korban meminta Komnas HAM melakukan investigasi. Pada intinya pihak keluarga menduga korban

meninggal karena ditembak. Saat penyerahan jenazah, pihak Lapas tidak menjelaskan penyebab kematian korban kepada keluarga.

Menindaklanjuti pengaduan ini, Komnas HAM Papua melakukan sejumlah upaya sesuai kewenangannya untuk meminta keterangan dari sejumlah pihak.

Dalam keterangannya, ketika ditemui Komnas HAM Papua, Kalapas Klas IIA Abepura, Korneles Rumboirusi membantah tuduhan keluarga korban soal penyebab kematiannya. Kalapas menegaskan bahwa korban meninggal karena dikeroyok massa, bukan karena dianiaya pegawai lapas atau ditembak.

Kalapas menjelaskan bahwa peristiwa kaburnya para narapidana Lapas Klas IIA Abepura terjadi pada 24 April 2019. Rencana pembobolan digagas oleh seorang narapidana, yakni Michael Ilian Tamol. Mereka membobol pagar kawat menggunakan besi dan selanjutnya menggunakan kain sarung sebagai tali untuk meloncat keluar. Narapidana yang kabur berjumlah 10 orang. Mereka melarikan diri ke arah Kampkey dan Kuburan Tanah Hitam, Abepura, Kota Jayapura.

Menindaklanjuti insiden ini, pihak Lapas bekerja sama dengan aparat kepolisian melakukan upaya pengejaran untuk menangkap para warga binaan yang kabur. Dalam upaya pengejaran tersebut, 9 orang berhasil ditangkap, sedangkan satu orang dinyatakan DPO, yakni:

1. John Haluk (berhasil ditangkap)
2. Agustinus Haluk (berhasil ditangkap)
3. Selyus Logo (berhasil ditangkap)
4. Steven Jibili (berhasil ditangkap)
5. Arnoldus Alua (berhasil ditangkap)
6. Lasarus Matuan (berhasil ditangkap)
7. Michael Ilian Tamol (berhasil ditangkap)
8. Jakson Haluk (berhasil ditangkap)
9. Alen Haluk (berhasil ditangkap)
10. Ambo Mompo (DPO).

Dalam upaya pengejaran ini, seorang warga binaan yang bernama Michael Ilian Tamol dinyatakan meninggal dunia. Beberapa hari kemudian, salah seorang narapidana bernama Sellius Logo juga meninggal dunia di RSUD Abepura. Saat ini pihak Lapas masih menunggu hasil pemeriksaan RSUD Abepura mengenai penyebab meninggalnya Sellius Logo.

Komnas HAM Papua juga telah meminta keterangan dari Kapolres Jayapura Kota, AKBP Gustav R Urbinas. Dalam pernyataannya, Kapolres menjelaskan bahwa kaburnya warga binaan tersebut bermula dari

adanya keributan di dalam Lapas. Seorang warga binaan bernama Michael Ilian Tamol merencanakan dan memimpin pelarian tersebut.

Dari 10 warga binaan yang kabur, 9 orang berhasil ditangkap atas dukungan aparat kepolisian, petugas Lapas dan masyarakat. Sementara itu, satu orang warga binaan yang belum ditangkap atas nama, Ambo Mompo. Pihak Kepolisian Resort Jayapura Kota, terus melakukan upaya pengejaran. Selain itu, pihak kepolisian telah menetapkan Ambo Mompo dalam DPO.

Sedangkan mengenai korban meninggal dunia, Michael Ilian Tamol, Kapolres menjelaskan bahwa pada saat ditangkap korban dalam keadaan babak belur. Diduga dianiaya secara massal. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun tidak tertolong dan dinyatakan meninggal.

Komnas HAM Papua bertemu dan meminta keterangan beberapa saksi korban. Hampir semua saksi korban menyatakan bahwa rencana pelarian dirancang oleh almarhum Michael Ilian Tamol, bersama JH dan SL. Rencana ini berhasil dilakukan pada 24 April 2019 sekitar pukul 11.10 WIT dengan cara membobol pagar kawat menggunakan besi lalu menggunakan kain sarung sebagai tali untuk memanjat tembok.

Selain itu Komnas HAM bertemu dan meminta keterangan dari sejumlah warga di sekitar Kampkey. Beberapa warga di sekitar Kampkey menyampaikan keterangan bahwa para warga binaan menyelamatkan diri di rumah warga dan Pantai Asuhan Kampkey.

Berdasarkan informasi, keterangan, data dan dokumen yang diperoleh, Komas HAM Papua menemukan beberapa fakta sebagai berikut:

Bahwa, rencana pelarian dirancang oleh almarhum Michael Ilian Tamol, bersama JH dan SL dan selanjutnya mengajak beberapa warga binaan yang lain.

Bahwa, pada 24 April 2019 sekitar pukul 11.10 WIT Michael Ilian Tamol bersama warga binaan yang lain berjumlah 10 orang kabur dari Lapas Klas IIA Abepura dengan cara membobol pagar kawat menggunakan besi dan selanjutnya menggunakan kain sarung sebagai tali untuk memanjat tembok sampai berhasil keluar dan melarikan diri.

Bahwa, pada saat meninjau lokasi, Komnas HAM Papua menemukan barang bukti yang digunakan untuk membobol pagar kawat berupa tiga buah besi dan kain sarung sepanjang 7 meter yang digunakan untuk memanjat tembok.

Bahwa, pada saat itu, ketika melihat kejadian, petugas jaga Lapas Klas IIA Abepura membunyikan tembakan peringatan menggunakan

senjata *soft gun* sebanyak 7 kali.

Bahwa, setelah berhasil keluar, para warga binaan menyelamatkan diri di beberapa rumah warga dan Panti Asuhan Kampkey.

Bahwa, atas peristiwa ini Kalapas meminta dukungan anggota Polsek Abepura untuk melakukan pengejaran dan penyisiran terhadap warga binaan yang melarikan diri.

Bahwa dalam proses penyisiran dan pengejaran tersebut, 9 orang warga binaan berhasil ditangkap.

Bahwa, ditemukan bekas luka memar di bagian wajah dari 7 warga binaan yang ditangkap. Selain itu, dua warga binaan meninggal dunia pasca pengejaran dan penangkapan. Ditemukan bekas luka di bagian kepala dan masih berdarah dari salah satu korban meninggal dunia.

Bahwa, patut diduga telah terjadi penganiayaan yang dilakukan secara massal dan berkelanjutan yang dilakukan oleh petugas lapas, anggota Polsek Abepura dan warga yang terlibat dalam proses penangkapan tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut, Komnas HAM Papua menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

Pertama; meminta Kapolres Kota Jayapura melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap penyebab kematian dua warga binaan pasca pengejaran dan penangkapan.

Kedua; meminta kepada semua pihak yang mengetahui peristiwa ini agar kooperatif untuk menyampaikan informasi atau keterangan atau kesaksiannya kepada pihak yang berwenang demi kepentingan penegakkan hukum.

Ketiga, meminta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua melakukan pemeriksaan terhadap Kalapas Abepura dan semua petugas jaga yang bertugas pada 24 April 2019 mengenai penerapan Standar Operasional Prosedur Lapas Klas IIA Abepura dalam menangani kasus pelarian warga binaan serta hasilnya disampaikan secara terbuka kepada publik.

Keempat, meminta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua mengevaluasi dan membenahi sistem mengenai penerapan prinsip dan standar pemenuhan HAM bagi para tahanan dan narapidana di lingkungan Lapas Klas IIA Abepura.

2) Penembakan di Deiyai

Pada 21 Mei 2019 terjadi insiden penembakan yang diduga dilakukan oleh anggota Polsek Tigi, di Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai.

Penembakan tersebut mengakibatkan 1 (satu) warga sipil meninggal dunia atas nama Yulianus Mote dan 2 (dua) orang lainnya, Melianus Dogopia dan Madai mengalami luka-luka.

Situasi Deiyai saat itu sempat memanas. Masyarakat mendatangi Polsek Tigi menuntut pertanggungjawaban aparat. Massa menuntut agar korban, Yulianus Mote dimakamkan di halaman kantor Polsek Tigi. Massa terus bertahan dan bertamba banyak sambil melakukan aksi *waita* di halaman kantor Polsek sebagai bentuk protes terhadap aparat. Aksi protes massa ini berujung pada pembakaran Kantor Polsek. Pihak kepolisian merespon aksi massa tersebut dengan melakukan pembubaran paksa untuk menghindari kerusuhan yang lebih parah.

Keesokan harinya, sesuai dengan tuntutannya, massa melakukan upacara pemakaman bagi korban meninggal Yulianus Mote di halaman kantor Polsek Tigi.

Atas peristiwa ini, Komnas HAM Papua menerima pengaduan dari keluarga korban yang pada intinya meminta agar kasus ini dibuka secara transparan dan pelakunya diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Menanggapi pengaduan tersebut, Komnas HAM Papua melakukan pemantauan pada 23-25 Mei 2019.

Komnas HAM Papua telah melakukan pemantauan berdasarkan amanat UU Nomor 39 Tahun 1999. Dalam pemantauan tersebut Komnas HAM Papua telah meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait, yakni Kapolres Paniai, Kapolsek Tigi, pelaku dan keluarga korban.

Berdasarkan informasi, data dan fakta yang diperoleh maka, Komnas HAM Papua menyampaikan rekomendasi, sebagai berikut:

Pertama; meminta Kapolda Papua untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku penembakan secara transparan dengan tetap memegang teguh prinsip *fair* demi keadilan dan kemanusiaan;

Kedua; meminta Kapolda Papua meningkatkan pengawasan terhadap semua anggota Polri yang ditempatkan di daerah Papua terutama mengenai penggunaan senjata api,

Ketiga; meminta Kapolda Papua melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab meninggalnya korban meninggal dunia atas nama Yulianus Mote dan kepada pelaku diproses secara hukum,

Keempat; meminta Bupati Deiyai agar melakukan pengawasan secara ketat terhadap peredaran minuman keras di Kabupaten Deiyai,

Kelima; meminta kepada semua pihak terutama saksi maupun masyarakat yang mengetahui peristiwa agar bersikap kooperatif untuk

memberikan keterangan dan kesaksiannya kepada pihak yang berwenang guna membantu proses penegakan hukum.

3) Penembakan di Distrik Fayit, Kabupaten Asmat

Pada 27 Mei 2019, terjadi penembakan di Distrik Fayit, Kabupaten Asmat yang diduga dilakukan oleh anggota TNI. Peristiwa ini menyebabkan empat warga sipil meninggal dunia.

Komnas HAM Papua menerima pengaduan dari keluarga korban yang pada intinya meminta agar Komnas HAM melakukan investigasi. Selain itu, ada desakan publik yang cukup kuat yang meminta Komnas HAM agar melakukan upaya sesuai dengan fungsinya. Menanggapi pengaduan tersebut, Komnas HAM Papua melakukan pemantauan pada 28-30 Mei 2019 bersama Tim Gabungan Kodam XVII Cenderawasih.

Dalam pemantauan tersebut, Komnas HAM Papua mendapatkan gambaran awal sebagai berikut:

Pertama; bahwa peristiwa itu bermula ketika sejumlah massa dari beberapa kampung melakukan pengrusakan terhadap rumah salah seorang calon legislatif (caleg). Massa melakukan tindakan tersebut karena diduga caleg dukungannya tidak ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilihan legilatif 2019, padahal menurut perhitungan mereka caleg usungannya mendapat suara tertinggi. Tidak terima dengan keputusan ini massa yang berjumlah kira-kira 350 orang melakukan pengrusakan dan penjarahan.

Kedua; saat massa melintasi depan Kantor Polsek, salah seorang anggota Polisi berusaha menenangkan dan meminta massa untuk tidak bertindak gegabah. Namun massa tidak menghiraukan himbauan tersebut. Anggota polisi tersebut membuntuti massa ke arah pelabuhan. Tak lama berselang terdengar bunyi rentetan tembakan senjata.

Dalam keterangannya, Serka Fajar menjelaskan bahwa, awalnya ia mendengar informasi bahwa ada sekelompok massa melakukan pengrusakan dan penjarahan di rumah Muhammad Mulla. Mendengar informasi itu ia mendatangi Serda Rettop yang berada didepan Pos Ramil dan meminta senjata api. Serda Rettop mengatakan bahwa senjata api ada di rumah Kopda Eko. Lalu Serka Fajar datang ke rumah Kopda Eko untuk mengambil senjata.

Setelah mengambil senjata lalu ia berjalan ke arah berkumpulnya massa di pertigaan jalan. Serda Rettop juga ikut bersamanya sampai di pertigaan jalan. Tujuan kedatangannya di sana adalah untuk menenangkan atau menghimbau massa agar tidak masuk ke arah obyek

vital. Akan tetapi massa tidak mengindahkan himbauan tersebut.

Saat itu massa membawa alat-alat tajam berupa panah, tombak dan parang. Melihat situasi yang semakin panas, salah seorang warga Kampung Fayit yang berada di dekatnya, meminta untuk membunyikan tembakan peringatan dengan maksud agar massa bisa tenang. Lalu Serka Fajar memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak satu kali.

Mendengar bunyi tembakan itu, massa semakin beringas dan berusaha menyerang Serka Fajar. Ia berusaha mundur tetapi massa terus maju untuk menyerangnya. Kemudian, Serka Fajar berusaha lari ke pinggir sebuah warung, sampai di situ ia tidak bisa mundur lagi karena ada dinding dibelakangnya. Saat itu, Serka Fajar langsung diserang oleh massa dari dua arah secara bergantian menggunakan senjata tajam. Dalam kondisi terdesak ia terpaksa menembak ke arah massa yang menyerang. Lalu dengan cepat Serka Fajar keluar dari kerumunan massa, berlari untuk menyelamatkan diri ke arah perumahan warga.

Setelah peristiwa ini, Pemda Kabupaten Asmat bergerak cepat. Bupati mendatangi keluarga korban dan para kepala kampung untuk dilakukan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa keluarga korban baik meninggal dunia maupun luka-luka mendapatkan santunan (uang duka) dan berkomitmen untuk mengakhiri permasalahan tersebut dan pelakunya akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.



Investigasi Kasus Penembakan di Distrik Fayit Kabupaten Asmat

Untuk memastikan penegakan hukum, Komnas HAM Papua terus

melakukan pemantauan terhadap proses hukum yang dijalani pelaku di Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

4) Pemantauan di RSUD Mimika Terkait Kasus Penembakan di Ilaga

Pada 17 September 2019, di Kampung Olenki, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, **terjadi kontak senjata antara** kelompok sipil bersenjata dengan Tim Gabungan TNI/Polri. Peristiwa ini menyebabkan Tekiman Wonda, Edison Mom, Rudi Mom dan Eriton Mom (6 bulan) meninggal dunia.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letkol CPL Eko Daryanto melalui keterangan tertulis, pada 19 September 2019, menjelaskan, kejadian tersebut berawal ketika kelompok bersenjata mulai menembak secara sporadis ke arah tim gabungan TNI/Polri. Saat itu tim gabungan sedang berada di sebuah *honai* di dekat sungai. Lalu Tim gabungan membalas tembakan ke arah kelompok bersenjata.

Mereka melarikan diri berpencar ke arah hutan sambil terus menembak secara brutal. Setelah kontak tembak selesai, tujuh warga sipil ditemukan dalam kondisi luka tembak. Tim gabungan TNI/Polri bersama masyarakat lainnya melakukan evakuasi korban ke Puskesmas Ilaga untuk melakukan perawatan medis. Tiga dari tujuh korban tersebut dinyatakan meninggal. Sementara empat warga lainnya di bawah ke Puskesmas Ilaga untuk menjalani pegobatan.

Peristiwa ini menyebabkan kondisi di Ilaga Kabupaten Puncak memanas. Rentetan kontak senjata antara TNI/Polri dengan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) terus berulang. Di sisi lain, aparat gabungan TNI/Polri melakukan penyisiran di kampung-kampung untuk mencari anggota OPM.

Merespon peristiwa ini, pada 21 – 22 September 2019, Komnas HAM Papua melakukan pemantauan untuk melihat kondisi riil terutama para korban yang sedang menjalani perawatan di RSUD Mimika. Komnas HAM Papua mengalami kesulitan untuk turun ke Ilaga (Tempat Kejadian Perkara) karena kondisi saat itu belum stabil dari sisi keamanan selain akses penerbangan yang sangat terbatas. Komnas HAM Papua bertemu para korban di RSUD Mimika.

Bertemu Para Korban di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika

Juprina Mom, adalah perempuan yang sejak lahir mengalami catat pada kaki bagian kanan sehingga tidak bisa berjalan normal. Juprina

mengalami luka tembak pada dada bagian kanan saat terjadi kontak tembak antara kelompok sipil bersenjata dengan aparat TNI yang sedang melakukan patroli di wilayah Distrik Mawugi, Ilaga pada 17 September 2019.

Tim Komnas HAM mendatangi RSUD Mimika untuk melihat kondisi korban yang saat itu sedang dirawat dan menjalani pengobatan akibat luka yang cukup serius. Dokter Ais, spesialis bedah, RSUD Mimika menyampaikan kepada Tim Komnas HAM bahwa bahwa pasien tersebut belum bisa dimintai keterangan atau diajak bicara karena belum sadar. Korban masih mengunakan alat bantu pernapasan. Komnas HAM hanya diperbolehkan melihat saja.



Melihat kondisi Juprina Mom korban luka tembak di RSUD Mimika

Lerina Tinal, Tim Komnas HAM bertemu dengannya di RSUD Mimika. Lerina Tinal menyampaikan keterangan bahwa, saat itu, ketika ia sedang berada di dalam *honai* (rumah) sedang menyusui anaknya (Eriton Mom, usia 6 bulan), tiba-tiba mendengar bunyi rentetan tembakan. Ia langsung menggendong anaknya dan bergegas keluar dari *honai* untuk melihat apa yang sedang terjadi karena memang kondisi di kampung saat itu sedang terjadi perang suku dan suaminya Rumanus Mom adalah pimpinan perang.

Saat berada di luar ia masih mendengar bunyi tembakan. Dalam kondisi demikian, ia berteriak meminta pertolongan. Saat itu ia melihat suaminya bersama belasan orang laki-laki lari ke arah belakang *honai* menuju hutan untuk menyelamatkan diri. Bunyi tembakan masih terus terjadi dan semakin menakutkan. Tiba-tiba Lerina Tinal jatuh bersama

anaknya dalam gendongannya. Ia merasakan perih di bagian pahanya. Ia berteriak meminta tolong. Anaknya sempat menangis, lalu terdiam. Setelah itu, ia melihat beberapa orang anggota TNI dan polisi lengkap dengan senjata datang bersama seorang mantri untuk menolongnya. Sementara anaknya tidak bernyawa lagi.



Melihat kondisi Lerina Tinal korban luka tembak di RSUD Mimika

Stopina Mom, seorang perempuan, menyampaikan keterangannya kepada Tim Komnas HAM bahwa, pada hari itu mereka sedang duduk di *honai*, yang laki-laki sedang minum kopi karena baru pulang dari kebun. Kondisi di Kampung Olenki belum normal karena sedang ada perang suku. Para warga kampung waspada mengantisipasi adanya serangan dari suku yang menjadi lawan perangnya. Tiba-tiba terdengar rentetan bunyi tembakan. Stopina Mom langsung keluar dari *honai* untuk melihat keadaan yang terjadi. Terlihat banyak orang berlarian. Saat itu ia memutuskan untuk ikut berlari, namun ketika hendak berlari ia terjatuh dan merasakan kaki bagian kanannya sakit. Kakinya berdarah akibat terkena tembakan.

Setelah itu beberapa anggota polisi datang menolongnya dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Timika untuk mendapat perawatan. Stopina

Mom juga menyampaikan bahwa, akibat tembakan tersebut menyebabkan seorang anak kecil meninggal dunia. Selain itu ada dua orang dewasa yakni Tenya Mom dan Kalianus Mom juga tertembak dan meninggal dunia.



Melihat kondisi Stopina Mom, korban luka tembak di RSUD Mimika

Bun Tabuni, saat ditemui Tim Komnas HAM, perempuan ini tidak banyak bicara karena kondisinya cukup parah dan belum stabil mentalnya. Terlihat perban melingkar di tangan kanannya. Ia hanya menyampaikan bahwa ia ditembak oleh aparat di dalam *honai* yang menyebabkan tangan kanannya mengalami luka yang cukup serius.

Dimitus Pinim, saat ditemui Tim Komnas HAM, laki-laki berusia paru baya ini menyampaikan bahwa serangan dari TNI dan Polri menimbulkan banyak korban. Saat itu, ia sedang berada di depan *honai* dan para kerabat yang lainnya sedang membersihkan rumput di pekarangan depan *honai* untuk ditanami sayur-sayuran. Kemudian datang beberapa anggota Polisi dan menanyakan "*di sini ada OPM ka tidak"*? Mereka semua menjawab bahwa tidak ada diantara mereka yang menjadi anggota OPM. Namun anggota Polisi tersebut langsung meluncurkan tembakan ke arah mereka. Mendengar tembakan tersebut mereka berlarian untuk menyelamatkan diri. Dimitus Pinim melihat ada beberapa orang yang tertembak termasuk dirinya, tertembak di kaki kanan. Setelah itu ia dirujuk ke RSUD Timika untuk mendapat perawatan lebih lanjut.

5) Tahanan Wanita Menyusui anaknya di dalam sel

Pada 12 September 2019 beberapa media di Tanah Papua dihebohkan dengan beredarnya foto seorang ibu yang sedang menyusui anaknya di dalam tahanan. Foto tersebut menjadi viral di media sosial dan mendapat kecaman dari publik.



Foto yang viral di media sosial tentang ibu menyusui di dalam sel, Polres Manokwari

Menanggapi kasus ini, publik mendesak Komnas HAM Papua untuk melakukan investigasi guna memastikan kebenarannya.

Atas dasar kemanusiaan, Komnas HAM Papua melakukan pemantauan sesuai amanat UU Nomor 39 Tahun 1999 terutama mengenai hak perempuan dan hak anak sebagai kelompok rentan.

Komnas HAM Papua telah bertemu dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Pada saat ditemui, korban berinisial SM tersebut menyampaikan keterangan bahwa ia ditangkap dan ditahan di Polres Manokwari dalam dugaan kasus makar. SM mengakui bahwa pada Juni 2019 ia menjalani persalinan dan melahirkan seorang anak. Setiap hari pada jam besuk keluarganya datang ke ruangan sel membawa bayinya. SM terpaksa menyusui bayinya di dalam sel karena dilarang oleh petugas agar tidak keluar dari sel.

Dalam pemantauan ini Komnas HAM Papua juga meninjau kondisi sel di Polres Manokwari. Khusus untuk perempuan atau ibu menyusui Polres Manokwari menyediakan 3 ruangan untuk menyusui. Secara keseluruan kondisi sel cukup baik.

Untuk memastikan kebenaran informasi atau keterangan korban,

Komnas HAM Papua bertemu dan meminta keterangan dari Kapolres Manokwari. Dalam keterangannya Kapolres Manokwari menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi SM untuk menyusui bayinya di luar sel. Saat dikunjungi oleh keluarga bersama bayinya, petugas jaga selalu membuka pintu ruang sel dan mereka bertemu di ruangan besuk. Hal ini dilakukan agar tahanan dapat bertemu dan berinteraksi langsung dengan pembesuk tanpa ada halangan jeruji besi. Hal ini sesuai SOP terutama pemenuhan hak-hak para tahanan.



Bertemu Kapolresta Manokwari bersama korban

Pada kesempatan tersebut, Komnas HAM Papua meminta Polres Manokwari agar menjamin seluruh tahanan agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Aparat penegak hukum harus menjamin pemenuhan hak asasi para tahanan. UU Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 49 Ayat (3), menegaskan bahwa hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

6) Kasus Penambangan Emas Ilegal dan Dugaan Pembantaian Warga Penambang di Korowai

Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, pengembangan (pengendalian), pengelolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada Pasal 7 disebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan. Sedangkan pada Pasal 10

menjelaskan tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan Tanah Papua menjadi salah satu primadonanya. Sektor pertambangan Papua menyimpan kekayaan beragam namun belum dikelola secara baik dan benar untuk menunjang kemakmuran. Pengelolaan dan pemanfaatan sektor pertambangan belum optimal karena belum didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni.

Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat UUD 1945 ini merupakan landasan pembangunan pertambangan dan energi untuk memanfaatkan potensi kekayaan SDA, mineral dan energi yang dimiliki secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Namun kenyataannya, dalam usaha pertambangan itu muncul masalah baru yakni adanya penambangan ilegal. Selama ini praktek penambangan dilakukan tanpa ijin, prosedur operasional, dan sebuah aturan dari pemerintah maupun pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota termasuk di daerah Korowai, Kabupaten Boven Digoel. Komnas HAM Papua menerima laporan bahwa selain terdapat penambangan illegal, diduga telah terjadi pembantaian warga penambang oleh kelompok tak dikenal.

Menindaklanjuti laporan ini Komnas HAM RI Perwakilan Papua melakukan pemantauan ke Kabupaten Boven Digoel untuk mengumpulkan informasi mengenai sejauh mana proses penambangan itu dilakukan dan informasi mengenai dugaan adanya pembantaian warga pendulang.

Pada Kamis, 26 September 2019 Tim berangkat ke Tanah Merah, Boven Digoel. Dalam kegiatan koordinasi dan monitoring kasus tersebut, Komnas HAM RI Perwakilan Papua bertemu sejumlah pihak, yakni:

1. Ibu Morien Midop

Pada Jumat, 27 September 2019, Tim bertemu Ibu Mariolen Midop di rumahnya. Tim bertemu untuk mendengar keterangan dan kesaksiannya. Ibu Mariolen Midop adalah salah satu korban yang kesehariannya sebagai penjual sembako di areal pendulangan. Ia bukan pekerja (pendulang). Selain menjual sembako, ia juga sebagai perawat dan menjual obat-obatan. Jika ada pekerja yang meminta bantuan medis

ia melayani sesuai kemampuannya.

Ia menyampaikan bahwa sudah dua kali ke tempat pendulangan. Pada 20 Agustus 2019 ia berjalan dari Distrik Khoo menuju Kampung Kawe, Distrik Awinbot, Kabupaten Yahukimo dan tinggal disana selama 2 hari. Setelah itu ia melanjutkan perjalanannya ke lokasi pangkalan penjualan sembako yang bernama Pisang-Pisang.

Di lokasi Pisang-Pisang tersebut, ada pekerja yang bekerja sebagai pengangkut peralatan penambangan, bahan makanan dan obat-obatan menuju ke lokasi pendulangan. Pekerjaan seperti ini disebut "tukang ojek". Mereka diberikan upah yang cukup besar, mengingat letak geografis tempat pendulangan memang sangat susah. Lokasi pendulangan berada di daerah ketinggian antara Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang yang aliran sungainya melalui sungai Boven Digoel dan sungai-sungai di dataran lembah Kabupaten Asmat.

Terkait Surat Ijin Penambangan, ia menyampaikan bahwa tidak tahu menahu soal itu. Jika Komnas HAM membutuhkan informasi lebih lengkap dapat bertemu langsung dengan para pekerja yang mengalami langsung di tempat kejadian. Ada pekerja yang menjadi korban, dipotong, mereka masih berada di lokasi pendulangan.

Para pekerja yang berada di lokasi pendulangan merupakan gabungan orang pendatang dan orang Papua. Para pendatang berasal dari Toraja, Manado (Sangier-Talaud), Makasar, Jawa, Sumatera, Kalimantan, NTT, dan NTB. Sedangkan orang Papua berasal dari suku setempat, Boven Digoel (suku Muyu, Mandobo, Awyu, Kawe, Khoo) dan ada juga dari Nabire, Biak, Serui, Waropen dan beberapa tempat lainnya di Papua.

Terkait pola kerja dan pembagian hasil, ia menjelaskan bahwa, para pekerja ada yang bekerja secara bersama dan ada juga yang bekerja sendiri sesuai dengan komunikasi antara mereka dan pemilik hak ulayat. Biasanya, di setiap lokasi pendulangan ada pemiliknya sehingga para pekerja yang direkrut oleh seorang ketua rombongan diantar ke lokasi dan bertemu pemilik hak ulayat. Setelah itu mereka membuat kesepakatan kerja dan pembagian hasil.

Dalam perhitungan pembagian hasil antara pemilik hak ulayat dan ketua rombongan serta para pekerjanya dilakukan sesuai situasi dan kondisi di lapangan berdasarkan pendapatan. Misalnya dalam seminggu jika seorang pekerja mendapatkan 5 gram emas maka pendulang/pekerja wajib memberikan 1 gram kepada pemilik hak ulayat. Sisanya milik pekerja.

Soal situasi keamanan, ia menyampaikan bahwa aparat keamanan

baik Polri/TNI tidak ada di lokasi tersebut. Tidak ada pos keamanan di sana. Sehingga dugaan kami pembantaian atau penyerangan itu dilakukan oleh kelompok kriminal yang masuk ke tempat pendulangan untuk melakukan aksi-aksi kejahatan mereka.

2. **Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Boven Digoel**

Pertemuan dengan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Boven Digoel dengan maksud untuk mengkonfirmasi keberadaan para pendulang untuk memastikan dokumen kependudukannya. Pada 27 September 2019, Kadis Disdukcapil meminta agar pertemuan dengan Komnas HAM dilakukan secara bersama dengan pihak Polres. Pada pertemuan tersebut, dihadiri oleh Kabid Kependudakan Dinas Dukcapil Boven Digoel. Dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan bahwa para pekerja yang bekerja di lokasi Kawe bukan penduduk Kabupaten Boven Digoel. Pada saat mereka masuk ke tempat pendulangan sama sekali tidak melaporkan diri pada Dinas Dukcapil Boven Digoel. Sehingga Disdukcapil menegaskan bahwa para pekerja tersebut adalah pekerja ilegal yang tidak memiliki dokumen kependudukan Kabupaten Boven Digoel.

3. **Kapolres Boven Digoel**

Jumat, 27 September 2019, Tim Komnas HAM RI Perwakilan Papua bertemu Kapolres Boven Digoel di Rumah Jabatan Kapolres. Ada beberapa hal yang disampaikan tentang situasi dan kondisi pasca terjadinya konflik di tempat penambangan yang ditangani langsung oleh pihak Polres Boven Digoel.



Bertemu Kapolres Boven Digoel dan Tim Posko Kemanusiaan Pengungsi Korowai

Pada kesempatan tersebut Kapolres menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Pertama: terkait *Operasi Kemanusian oleh Polres Boven Digoel*. Perlu kita ketahui bahwa locus atau TKP yakni lokasi tempat pendulangan bukan masuk wilayah Kabupaten Boven Digoel, namun masuk di wilayah perbatasan Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan sebagian wilayah Kabupaten Asmat. Para pekerja sudah lama berada di lokasi penambangan. Saya sendiri baru 3 setengah bulan menjabat sebagai Kapolres Boven Digoel.

Kejadian itu bermula dari adanya penyerangan oleh kelompok tak dikenal terhadap para penambang pendatang. Akibat serangan ini, mereka lari menyelamatkan diri. Alternatif jalur yang paling efektif dan paling aman menurut mereka adalah jalur sungai. Namun sebelum mencapai sungai besar (sungai Digoel) para pengungsi atau penambang harus berjalan kaki sekian kilo selama sehari semalam turun ke wilayah Pisang-Pisang. Setelah itu naik perahu boat (motor tempel) menuju ke Kawe (masuk wilayah Pegunungan Bintang).

Pada 5 September 2019, Forkopimda Boven Digoel (Bupati, Kapolres, dan Dandim) mendatangi lokasi penambangan menggunakan Helikopter milik TNI AD untuk membawa bahan makanan atas perintah Kapolda Papua. Hal ini dilakukan untuk melihat kondisi para pekerja pasca peristiwa tersebut dan mengantisipasi terjadi kelaparan pada mereka. Bahan makanan yang kami bawa adalah makanan siap saji kira-kira setengah ton sesuai kapasitas Helikopter. Kami tidak bisa mendarat karena di lokasi pendaratan terlihat orang dalam jumlah yang cukup banyak. Dari atas Helikopter tim hanya melepaskan bahan makanan.

Ini adalah operasi kemanusiaan untuk menyelamatkan para pendulang yang terjebak di lokasi penambangan. Mereka meminta bantuan evakuasi penyelamatan diri. Operasi ini berjalan selama 10 hari terhitung sejak 3 s/d 12 September 2019. Setelah menerima laporan, Kapolres melakukan rapat bersama anggota Polres dan Forkopimda Kabupaten Boven Digoel dan menyiapkan Posko Kemanusian bagi para pendulang. Kapolres rutin menyampaikan laporan perkembangan kepada Kapolda Papua dan meminta petunjuk pelaksanaan terhadap hal-hal yang dipandang penting dan mendesak dalam melakukan operasi ini.

Setelah itu dilakukan pendataan terhadap para pendulang yang tiba di pelabuhan Boven Digoel, menyiapkan tempat tinggal dan memberikan makanan dan minuman. Selanjutnya para pengungsi diarahkan kepada Ketua-Ketua Paguyuban untuk upaya pemulangan ke daerah asal masing-masing.

Kedua; terkait *Data* Pengungsi. Para pekerja didata berdasarkan daerah asal sebagai berikut: Jawa 164 orang, Jakarta 1 orang, Banten 1 orang, Kalimantan 6 orang, Maluku 57 orang, Maluku Utara 110 orang, Nusa Tenggara Barat 5 orang, Nusa Tenggara Timur 30 orang, Sulawesi Barat 8 orang, Bumas/Sulsel 316 orang, Palopo/Sulsel 284 orang, Toraja/Sulsel 229 orang, Sulawesi Tengah 8 orang, Sulawesi Tenggara 73 orang, Sulawesi Utara 809 orang, Sumatera Barat 2 orang, Sumatera Selatan 5 orang, Sumatera Utara 6 orang, Papua 139 orang, dan Papua Barat 13 orang. Total para pekerja berjumlah 2.266.

Para penambang ini ada yang bertugas mengakomodir para pekerja yang disebut kepala rombongan. Tugas dari kepala rombongan adalah merekrut pekerja dari daerah asal, mengantar ke lokasi penambangan, dan mempekerjakan pada masing-masing lokasi yang telah ditentukan oleh pemilik hak ulayat. (*sumber: Data posko kemanusiaan Polres Boven Digoel, tanggal 03 s/d 12 September 2019. Kaposko. Ipda. Makmur)*.

Ketiga; terkait *Lokasi Penambangan*. Lokasi penambangan berada di Meanning 1, meanning 2, meanning 3, meanning 4, meanning 4 Lama, meanning 4 BCL, meanning 4 Culang, meanning 4 Yusuf, meanning 4 Marius, meanning 5, meanning 6, meanning 7, meanning 12, meanning, 13, meanning 45, meanning 45 Dalam, meanning 45 Luar, Meanning 45 Batas, lokasi 45, meanning 45 helipat, meanning 46, meanning 46 Dalam, meanning 47 Dalam, meanning 54, meanning 55, meanning 63, meanning 63 B, meanning 63 plus, lokasi Sagu-Sagu 63 B, meanning 69, meanning 72, meanning 77, Bravo 77, meanning 77 Dalam, meanning 81, meanning 82, meanning 83, meanning 84, meanning 85, meanning 88, meanning 88 Gunung, meanning 88 Puncak, meanning 88 Baru, meanning 88 Kali Daka, meanning 89, meanning 89 Mamanalis, meanning, 92, meanning 96, meanning 99, meanning 212, Kampung Kawe, Kampung Pisang-Pisang, lokasi Bakijang, lokasi Sagu-Sagu, Lokasi Kali Fis, lokasi Kali Rop, lokasi Kali Arop, Lokasi Kali Airop, Lokasi Rumah 4, Lokasi kali Merah, Lokasi Kali Kalum, Lokasi Markus, Lokasi Kawai, Lokasi Kawei, Lokasi Kali Deka, Lokasi Kali Daka, Lokasi Kali Fer, Lokasi Ayundim, dan Lokasi Kali Be. Secara keseluruan berjumlah 70 lokasi. (*sumber : Data posko kemanusiaan Polres Boven Digoel, tanggal 03 s/d 12 September 2019. Kaposko. Ipda. Makmur)*.

Keempat; terkait *Pergeseran Para Pekerja*. Pergeseran para pekerja dari lokasi penambangan ke Polres Boven Digoel berdasarkan tanggal: 03 September 2019: Wanita 6 orang dan Pria 225 orang, total 231 orang. 04 September 2019: Wanita 5 orang dan Pria 151 orang, total 156 orang.

05 September 2019: Wanita 4 orang dan Pria 146 orang, total 150 orang. 06 September 2019: Wanita 8 orang dan Pria 567 orang, total 575 orang. 07 September 2019: Wanita 0 orang dan Pria 288 orang, total 288 orang. 08 September 2019: Wanita 4 orang dan Pria 494 orang, total 498 orang. 09 September 2019: Wanita 6 orang dan Pria 197 orang, total 203 orang. 10 September 2019: Wanita 1 orang dan Pria 64 orang, total 65 orang. 11 September 2019: Wanita 5 orang dan Pria 32 orang, total 37 orang. 12 September 2019: Wanita 1 orang dan Pria 62 orang, total 63 orang.

Total keseluruhan pekerja yang keluar dari 70 lokasi penambangan melalui sungai Boven Digoel dan melapor di Posko Kemanusiaan di Polres Boven Digoel akibat dari peristiwa ini adalah sebanyak 2.266 orang dengan rincian Wanita 40 orang dan Pria 2.226 orang. (*sumber: Data posko kemanusiaan Polres Boven Digoel, tanggal 03 s/d 12 September 2019. Kaposko. Ipda. Makmur)*.

Kelima; terkait *Pintu Masuk – Keluar Para Pendulang*. Pintu masuk bagi para pendulang emas adalah melalui Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Akses dari Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Asmat menggunakan transportasi sungai yaitu *long boat Viber*. Sedangkan akses dari Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang menggunakan transportasi kendaraan roda dua dan melanjutkan dengan berjalan kaki menuju tempat pendulangan.

Pada saat peristiwa, para pendulang atau pekerja yang berjumlah 2266 orang memilih keluar dari tempat kejadian melelalui Kabupaten Boven Digoel karena sarana transportasi melalui sungai Boven Digoel yang dianggap mudah dan cepat walaupun memakan waktu perjalanan yang cukup lama.

4. Bapak Sonny Maskay

Sabtu, 28 September 2019, Tim Komnas HAM Perwakilan Papua bertemu bapak Sonny Maskay dan istri di rumahnya. Dalam pertemuan ini tim ingin mendapatkan informasi terkait peristiwa penyerangan terhadap para pendulang oleh kelompok kriminal tak dikenal.

Bapak Sonny Maskay merupakan salah satu korban. Ia dibacok oleh seseorang dari 4 pelaku yang bertemu dengan korban dan istri dari Saudara Ben Penyum (Tuan Dusun tempat pendulangan).

Menurut penjelasan Bapak Sonny Maskay, pada Minggu, 1 September 2019 sekitar pukul 12.30 WIT, ia bersama Istri dari saudara Ben Penyum (Tuan Dusun) sedang dalam perjalanan pulang dari ibadah di Gereja Oikumene yang dibangun secara swadaya dari para pendulang

tradisional yang berlokasi di tempat pendulangan tepatnya di lokasi Kawe, Distrik Awinbong, Kabupaten Yahukimo atau sering para pendulang menyebutnya dengan nama lokasi Meanning Tujuh. Sewaktu dalam perjalanan pulang dari Meaning Tujuh ke Kali Rop, saat itu ada dua orang mengikuti dari arah belakang dan dua orang di depan menghadang. Orang tersebut meminta barang bawaanya berupa parang dan tas noken. Lalu pelaku yang berjumlah 4 orang itu menyampaikan bahwa mereka akan membunuh Bapak Sonny Maskay dan Istri dari Tuan Dusun. Dalam keadaan demikian, Bapak Sonny meminta untuk berdoa. Ketika sedang berdoa (Doa Bapa Kami/Doa Umat Kristen) tiba-tiba ia dibacok di bahu kanan.

Awalnya pelaku berencana menebas lehernya, tetapi seperti mendapatkan bisikan, korban mengangkat bahu kanannya sehingga parang/golok mengenai bahunya. Parang yang digunakan adalah miliknya sendiri.

Setelah dibacok korban melarikan diri bersama istri dari Ben Penyum. Ketika korban berusaha melarikan diri, ia dibacok lagi di bagian kepala samping telinga kanan. Akibatnya ia mengalami luka sobek yang cukup parah. Meskipun terluka parah ia bersama istri Ben Penyum berhasil melarikan diri ke arah Distrik Sao, Kabupaten Pengunungan Bintang. Ketika sampai di Distrik Sao ia mendapat perawatan medis seadanya oleh warga setempat, lalu melanjutkan perjalanan lagi menggunakan *long boot* mengikuti aliran sungai Digoel menuju Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel. Jarak tempuh dari Distrik Sao Kabupaten Pegunungan Bintang sampai Tanah Merah, Boven Digoel kurang lebih 2 hari. Jalur ini relatif aman dari pada melalui Oksibil ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang atau Kabupaten Asmat atau Kabupaten Yahukimo.

Setelah pembacokan terhadap Sonny Maskay, terjadi kerusuhan di lokasi pendulangan tepatnya di Kawe, Distrik Awinbong, Kabupaten Yahukimo. Kerusuhan ini mengakibatkan banyak korban luka-luka dan beberapa korban meninggal dunia serta pengungsian besar-besaran ke TanahMerah, Kabupaten Boven Digoel.

Para pekerja yang mengungsi ke Tanah Merah ditampung dan didata di Mapolres Boven Digoel lalu selanjutnya diserahkan kepada masing-masing paguyuban suku untuk dikembalikan ke daerah asal masing-masing.

Berdasarkan hasil koordinasi dan monitoring terhadap informasi dan keterangan yang diperoleh dari pihak terkait, Komnas HAM Papua menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kerusuhan di lokasi pendulangan berawal dari percobaan pembunuhan terhadap Sonny Maskay dan istri Ben Penyum (Tuan Dusun tempat pendulangan). Peristiwa ini merupakan tindakan kriminal dengan niat menghilangkan nyawa orang yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal.
2. Dalam kerusuhan ini menimbulkan korban luka-luka, korban meninggal dunia dan pengungsian besar-besaran sebanyak 2.266 orang. Ke Tanah Merah, Boven Digoel.
3. Pendulangan yang dilakukan di 70 lokasi tersebut adalah usaha illegal karena tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat. Selain itu para pekerja adalah pekerja ilegal karena tidak memiliki dokumen kependudukan pemda setempat.
4. Pola rekrutmen para pekerja tidak melalui lembaga resmi pemerintah.
5. Aparat Polri dan TNI telah melakukan langkah-langkah pengamanan dan mengupayakan bantuan kebutuhan makan-minum dan tempat tinggal sementara kepada para pengungsi.
6. Secara administratif, belum ada batas-batas yang jelas antar wilayah kabupaten di areal pendulangan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komnas HAM Perwakilan Papua menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Meminta Polres Boven Digoel, Polres Yahukimo, Polres Pegunungan Bintang dan Polres Asmat mengupayakan langkah-langkah penegakan hukum secara bersama untuk mengungkap peristiwa ini secara tepat dan terukur dan menjamin terciptanya rasa aman bagi warga sipil di areal pendulangan.
2. Meminta Pemda Yahukimo, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Asmat dan Pemda Provinsi Papua melalui instansi teknis terkait untuk memberi perhatian serius mengenai usaha pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meminta Pemda Yahukimo, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Asmat melalui instansi teknis terkait untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap arus masuknya penduduk.

4. Meminta Pemda Yahukimo, Pegunungan Bintang, Boven Digoel dan Asmat untuk mengupayakan dengan segera melalui Tim Bersama untuk penentuan batas-batas wilayah secara jelas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7) Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Mamberamo Raya

Komnas HAM Papua menerima pengaduan dari perwakilan para guru SD-SMP sekabupaten Mamberamo Raya. Pada pokoknya, mereka menyampaikan bahwa bahwa sejak Juni – Juli tidak menerima gaji bulanan termasuk gaji 13. Para guru menduga Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya telah menyelewengkan dana tersebut. Akibatnya gaji yang belum dibayarkan para guru mogok mengajar. Proses belajar mengajar di 98 sekolah di Kabupaten Mamberamo Raya selama satu bulan tidak berjalan. Banyak orang tua murid menyatakan protes atas kondisi ini. Hak atas pendidikan tidak terpenuhi.

Menindaklanjuti pengaduan ini, Komnas HAM Papua melakukan monitoring dan pemantauan pada 10 - 14 September 2019. Komnas HAM bertemu dan meminta keterangan pada sejumlah pihak. Berdasarkan keterangan, informasi dan data hasil pemantauan, Komnas HAM Papua menemukan fakta sebagai berikut;

Pertama, patut diduga telah terjadi penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya yang menyebabkan para guru tidak menerima gaji,

Kedua; para guru SD-SMP sekabupaten Mamberamo Raya sebanyak 269 orang belum menerima gaji bulan Juni, Juli, gaji ke 13 dan ke 14 tahun anggaran 2019,

Ketiga; para guru telah mengajukan laporan/pengaduan ke Polres Mamberamo Raya dan Polda Papua,

Keempat; akibat belum menerima gaji, para guru mogok mengajar sejak 15 Juli 2019 s/d 02 September 2019,

Kelima; proses belajar mengajar bagi SD-SMP di Mamberamo Raya dibuka kembali pada 02 September 2019,

Keenam; meskipun proses belajar mengajar sudah dibuka sejak 2 September, sebagian guru PNS belum berada di tempat tugasnya, beberapa sekolah belum melaksanakan proses belajar mengajar secara normal.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, Komnas HAM Papua menyampaikan sejumlah rekomendasi sebagai berikut:



Bertemu guru SMP Negeri 1 Kasonaweja (Oktovina Norotauw, S. Pd)

Meminta Polres Mamberamo Raya memberi respon secara cepat terhadap kondisi ini dan segera melakukan upaya penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para guru SD-SMP se Mamberamo Raya.

Meminta Bupati Mamberamo Raya agar mengambil langkah cepat untuk melakukan perbaikan dan dengan segera memastikan pemenuhan hak atas pendidikan dan hak atas upah yang layak bagi para guru.

8) Pemantauan Tanah Bandara Mopah, Merauke

Pembayaran ganti rugi atas tanah yang terletak di bandara Mopah Merauke yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Merauke masih menyisakan masalah. Beberapa pemilik hak ulayat mengklaim belum mendapat ganti rugi tahap II. Donatus Sopor Mahuze, mewakili para pemilik hak ulayat, menyatakan bahwa Pemda Kabupaten Merauke salah membayar ganti rugi kepada pihak-pihak yang sebenarnya bukan sebagai pemilik hak ulayat. Kami selaku pemilik hak ulayat, khususnya masyarakat adat kampung Kayakai (suku marind) merasa sangat dirugikan.

Atas permasalahan ini, Andrew Donatus Mahuze mengadu ke Komnas HAM Papua. Menindaklanjuti pengaduan ini, Komnas HAM

Papua melakukan upaya pemantuan untuk bertemu dan meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait serta meninjau lokasi guna mencari upaya penyelesaian.

Berdasarkan hasil pemantauan, keterangan dan informasi yang diperoleh dari para pihak, Komnas HAM Papua menemukan sejumlah fakta sebagai berikut:

Pertama; terkait ganti rugi atas tanah di bandara Mopah, pada tahun 2010 Pemda Kabupaten Merauke bersama pemilik hak ulayat membentuk sebuah Tim yang disebut Tim 7,

Kedua; Tim 7 bertugas menyajikan data kepemilikan hak ulayat berdasarkan kajian histori secara detail. Data ini akan dipakai oleh Pemda Kabupaten Merauke sebagai dasar pembayaran kepada para pemilik hak ulayat,

Ketiga; berdasarkan data yang disajikan oleh Tim 7, pemilik hak ulayat yang berhak menerima ganti rugi terdiri dari 4 marga yakni, Bazik-Bazik, Gebze, Mahuze dan Balagaize sesuai dengan petanya masing-masing,

Keempat; berdasarkan data Tim 7, Pemda Merauke melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah Tahap I kepada pemilik hak ulayat.

Kelima; dalam perkembangannya, Donatus Sopor Mahuze menilai bahwa data yang disajikan oleh Tim 7 tidak sesuai dengan faktanya,

Keenam; atas kondisi ini, Donatus Sopor Mahuze menyampaikan keberatan kepada Pemda Merauke dengan melampirkan peta kepemilikan tanah dimaksud.

Ketujuh; setelah dilakukan penelusuran dan klarifikasi, Pemda Merauke yang diwakili Sekretaris Daerah (pada tahun itu), menyatakan bahwa data yang diajukan Donatus Sopor Mahuze adalah benar, sedangkan data Tim 7 diragukan kebenarannya. Saat itu juga, Sekda memerintahkan agar dikukan pemblokiran terhadap 213 nomor rekening.

Kedelapan; sampai saat ini, Donatus Sopor Mahuze selaku pemilik hak ulayat belum menerima ganti rugi.

Berdasarkan temuan ini, Komnas HAM Papua menyampaikan rekomendasi kepada Bupati Merauke agar merespon tuntutan para pemilik hak ulayat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini segera dilakukan untuk meminimalisir gerakan atau aksi protes warga yang bisa menimbulkan konflik baru.



Bertemu masyarakat adat pemilik Hak Ulayat

9). Monitoring Situasi Keamanan di Kampung Berap, Distrik Nimbokrang, Kab. Jayapura Pasca Peringatan 1 Desember 2019

Setiap 1 Desember sebagian masyarakat Papua terutama kelompok pendukung kemerdekaan memperingatinya sebagai hari ulang tahun kemerdekaan bangsa West Papua. Biasanya mereka memperingati dan merayakannya dengan cara ibadah syukur bersama. Dalam beberapa tahun terkahir, peringatan 1 Desember pada beberapa wilayah di Tanah Papua cenderung diwarnai pengibaran bendera bintang kejora.

Aksi ini selalu menjadi perhatian pihak keamanan. Setiap tahun, menjelang Desember, biasanya aparat keamanan meningkatkan patroli dan penjagaan pada wilayah yang dianggap rawan untuk menjamin terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Selain itu untuk mencegah potensi pengibaran bintang kejora. Dalam beberapa kasus, peringatan 1 Desember berakhir dengan penangkapan dan penahanan sejumlah warga.

Mencermati kondisi ini Komnas HAM melakukan pemantauan terhadap kondisi keamanan terkait peringatan 1 Desember. Komnas HAM Papua ingin memastikan agar segala perangkat negara bekerja

sesuai mekanisme hukum yang menjamin adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Negara harus memberikan jaminan keamanan bagi seluruh warga.

Hal ini penting dilakukan karena Negara menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. Kewajiban dan tanggung jawab Negara meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamananan dan bidang lainnya.

Berdasarkan pengamatan, informasi dan keterangan dari sejumlah pihak, Komnas HAM Papua menyatakan bahwa secara keseluruhan kondisi keamanan di Kabupaten Jayapura pasca peringatan 1 Desember dalam keadaan kondusif. Namun diwarnai dengan penangkapan dan penahanan sejumlah warga di Polres Sentani.

Sebanyak 34 orang yang terdiri dari masyarakat di beberapa kampung ditahan oleh Satuan Polres Sentani ketika hendak menghadiri perayaan 1 Desember yang dipusatkan di Lapangan Trikora, Sentani.

Terhadap peristiwa ini Komnas HAM Papua telah bertemu Kapolres Jayapura dan meminta agar upaya penegakan hukum terhadap 34 orang warga sipil ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum formal dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah.

Secara khusus di Kampung Beraf, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, kondisi keamanan menjelang dan pasca 1 Desember dinyatakan kondusif. Beberapa warga yang dimintai keterangannya, menyampaikan bahwa situasi pada umumnya aman. Pihak kepolisian rutin melakukan patroli. Masyarakat pun tidak menggelar doa bersama untuk memperingati 1 Desember 2019.

10) Pemantauan Kasus Perkelahian antarkelompok di Kota Sorong

Komnas HAM Papua pada 2 Desember 2019 menerima pengaduan Susanna Sofia Pandori. Pengadu menyampaikan bahwa ada dua kelompok terlibat perkelahian yaitu antara kelompok Innawatan dan Ayamaru. Kedua kelompok ini berkelahi di komplek perumahan Klademak 3 yang mengakibatkan 1 warga meninggal dunia dan 9 rumah dirampok, dijarah dan dibakar habis. Dalam peristiwa ini pengadu merasa polisi tidak melakukan tugasnya secara efektif sehingga

menyebabkan satu warga meninggal dunia dan 9 rumah terbakar.

Menindaklanjuti pengaduan ini Komnas HAM Papua melakuan pemantauan ke Kota Sorong dan bertemu beberapa pihak terkait. Dalam pemantauan tersebut Komnas HAM Papua bertemu dan meminta keterangan terhadap sejumlah pihak, diantaranya para korban dan pihak kepolisian.

Komnas HAM Papua tiba di komplek perumahan Klademak 3 dan disambut warga yang rumahnya terbakar. Warga menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki persoalan dengan kedua pihak yang bertikai. Pada saat itu ada perkelahian antara kelompok Innawatan dengan kelompok Maparu. Kelompok Maparu kemudian melampiaskan kekesalan mereka pada rumah warga Klademak 3.

Kedua kelompok ini sudah bertikai selama tiga tahun berturut-turut. Perkelahian kali ini dipicu saat bermain petasan, dimana kesempatan ini menjadi ajang adu gengsi satu sama lain. Pada 24 November 2019 kedua kubu ini saling bentrok. Saat itu beberapa rumah warga hanya dilempari batu. Perkelahian berlanjut hari kedua pada 25 November yang kemudian kelompok dari Maparu mulai merusak dan menjarah isi rumah.

Perkelahian ini berlanjut pada hari ketiga. Saat itu ada seorang warga perumahan Maparu bernama David Nau melarang kelompoknya untuk tidak berkelahi. Namun larangan tersebut tidak diindahkan. Perkelahian pun berlanjut yang menyebabkan satu orang meninggal dunia. Hal ini membuat kelompok Maparu marah dan melakukan aksi pembakaran rumah warga Klademak 3 menggunakan bom Molotov yang berisi bensin.

Warga mengaku kecewa terhadap kinerja anggota kepolisian karena pada saat kerusuhan hanya menjaga dalam jarak yang cukup jauh dari tempat kejadian. Padahal saat itu, beberapa warga langsung menemui aparat kepolisian dan meminta agar dilakukan tindakan hukum untuk menghentikan pertikain tersebut. Namun aparat tidak merespon permintaan warga dengan alasan belum ada perintah dari pimpinan.

Warga meyakini bahwa jika polisi segera mengambil tindakan tegas maka bisa meminimalisir bahkan bisa mencegah kerusakan seperti sekarang ini.

Komnas HAM mencatat bahwa akibat kejadian tersebut ada 8 rumah warga yang dibakar, yakni, Perumahan Klademak 3, Jalan Tanjung terdiri dari rumah keluarga Pandori, keluarga Mentansan, keluarga

Manulang, keluarga Merauga, Kios. Rumah keluarga Betaubun (2 rumah) di jalan Soka. Rumah keluarga Rumaropen di jalan Tulip dan kios keluarga



Kios di Jln. Tanjung, Klademak 3; yang dibakar pertama kali oleh warga Mapura

Komnas HAM Papua juga bertemu pihak Kepolisian Sorong Kota. Dalam pertemuan tersebut Wakapolres Sorong Kota, Hengki Kristianto Abadi, SIK, MH menjelaskan kronologis perkelahian antara kelompok Innawatan yang beralamat di Jalan Baru dengan kelompok Mapura yang berada di Jalan Worot. Sebenarnya kedua kelompok ini sudah bertikai selama tiga tahun terakhir. Penyebabnya hanya masalah adu gengsi dan kekuatan. Kelompok ini berisi para remaja yang duduk di bangku SMP dan SMA. Perkelahian antara kelompok ini sudah terjadi dalam tiga tahun berturut-turut. Kali ini dipicu oleh permainan petasan. Kemudian meluas menjadi perkelahian antar kelompok.

Kejadian ini mengakibatkan 8 rumah warga dibakar dan 1 orang meninggal dunia atas nama David Nau. Pada saat kejadian anggota polisi berjaga di depan pertokoan yohan dan batas jalan seberang dengan maksud untuk menghalau kedatangan kelompok Inanwatan. Perkelahian antar dua kelompok ini berlangsung selama tiga hari. Saat itu memang diakui anggota polisi tidak melakukan penjagaan di komplek Klademak 3 karena mempertimbangkan dua hal, yakni, pertama, dikhawatirkan anggota polisi menjadi korban. Hal ini menjadi perhatian karena pada tahun sebelumnya salah seorang anggota polisi menjadi korban karena pertikaian dua kelompok ini. Kedua, komplek

Klademak 3 letaknya berada dibawah bukit dan sangat mudah bagi kelompok yang ingin menyerang menggunakan lemparan batu atau alat-alat tajam seperti anak panah. Mempertimbangkan dua hal ini, polisi memutuskan untuk mengamankan di luar komplek dan berjaga di sepanjang jalan untuk mengantisipasi serangan dari kedua belah pihak.

Setelah kejadian ini, polisi sudah menangkap tersangka penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal untuk diproses sesuai dengan mekanisme hukum. Sedangkan terhadap beberapa rumah warga yang dibakar, pihak kepolisian saat ini sedang melakukan penyelidikan. Apabila polisi menemukan fakta-fakta yang mengarah pada pelaku, maka akan dilakukan penangkapan terhadap para pihak yang diduga kuat melakukan pengrusakan, penjarahan dan pembakaran.

B. Pemajuan

Penyuluhan HAM Bagi Korban Pelanggaran HAM di Teluk Wondama

Teluk Wondama merupakan salah satu kabupaten yang dimekarkan oleh pemerintah pasca terjadinya peristiwa pelanggaran HAM, yang dikenal dengan peristiwa Wasior Berdarah. Secara umum dapat digambarkan bahwa peristiwa Wasior Berdarah itu terjadi pada 2001. TNI dan Polri diduga melakukan tindakan brutal seperti penembakan, pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang, pengrusakan dan pembakaran rumah warga.

Hasil penyelidikan Komnas HAM menyatakan bahwa dalam peristiwa Wasior Berdarah diduga telah terjadi Pelanggaran HAM Berat. Berkas hasil penyelidikan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Sejak 19 tahun silam hingga kini, korban dan keluarga korban masih menunggu pengungkapan kasus ini demi keadilan dan penegakkan HAM.

Dalam pidatonya, pasca dilantik pada periode kedua, Presiden RI telah menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. Namun dalam kenyataannya, pemerintah tidak menunjukan upaya serius untuk mengungkap pelanggaran HAM Berat termasuk peristiwa Wasior Berdarah.

Sementara itu, Gubernur Papua dalam pidatonya pada acara

Peringatan Hari HAM ke 67, 10 Desember 2015, menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan keluarga korban pelanggaran HAM Berat di Papua. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Papua menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua akan memberikan perhatian kepada para korban dan keluarganya.

Menindaklanjuti niat Pemerintah Provinsi Papua tersebut, Komnas HAM Papua merancang Peraturan Gubernur tentang Pemenuhan Hak Bagi Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat di Papua sebagai dasar hukumnya. Draft Peraturan Gubernur tersebut telah diajukan ke Biro Hukum Pemda Papua sejak 2016. Namun hingga saat ini belum direalisasikan.

Komnas HAM Papua menyadari bahwa upaya penegakkan HAM di Papua tidak semudah membalikan telapak tangan. Meskipun demikian, segala daya dan upaya harus tetap dilakukan. Semua pihak harus dilibatkan dalam upaya ini sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Salah satu upaya yang terus dilakukan oleh Komnas HAM Papua adalah bertemu korban dan keluarga korban Wasior Berdarah. Upaya ini dimaksudkan untuk memberi dukungan dan penguatan bagi mereka. Para korban terutama kaum perempuan diberi ruang untuk menyampaikan suara hatinya.



Kegiatan penyuluhan HAM di Kab. Teluk Wondama

Dalam kegiatan ini Komnas HAM Papua melibatkan Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial, Kesbangpol, Bagian Hukum Kabupaten Teluk Wondama dan KPKC GKI Klasis Wondama. Pesertanya adalah para korban dan keluarga korban Wasior Berdarah, khususnya kaum perempuan.

Melalui kegiatan ini, para peserta meminta dengan tegas kepada

pihak-pihak terkait terutama pemerintah Presiden Jokowi agar serius untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM Berat Wasior. "Kasus ini menimbulkan trauma yang berkepanjangan, intimidasi dan stigma itu masih membekas. Sudah terlalu lama kami menunggu. Kami berharap agar segera diselesaikan. Jangan lagi ada kekerasan".

Selain itu mereka menyampaikan agar setiap kebijakan yang diputuskan Pemerintah Daerah Teluk Wondama harus berpihak pada kaum perempuan, misalnya dalam hal penataan usaha-usaha ekonomi kecil dan menengah, pemberdayaan dan perlindungan terhadap kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum.

C. Pramediasi

1) Meredam Amarah Warga di Koya Barat

Mengawali tugas dan fungsinya pada 2019, Komnas HAM Perwakilan diminta melakukan upaya negosiasi dan mediasi untuk meredam amarah umat Kristiani di Kota Jayapura dan sekitarnya.

Saat itu, nyaris terjadi ketegangan antar masyarakat dan mengarah pada sentimen agama. Peristiwa ini terjadi di Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura pada Kamis, 28 Februari 2019.

Hal ini dipicu oleh tindakan yang diduga dilakukan oleh Jafar Umar Thalib dan pengikutnya. JUT dan pengikutnya marah kepada salah satu warga setempat karena membunyikan lagu-lagu rohani Kristen melalui *tape* yang disambungkan ke toa atau pengeras suara. Mereka merasa terganggu karena saat itu sedang melakukan pengajian di salah satu Mesjid yang berada dekat dengan rumah warga tersebut. JUT dan pengikutnya, mendatangi rumah warga tersebut dan melakukan pengancaman, penganiayaan serta pengrusakan.

Aksi JUT ini menyebar cepat di media massa melalui *facebook* dan *whatss up group.* Ratusan umat Kristiani di Distrik Muara Tami turun ke jalan, memblokir ruas jalan dan membakar ban-ban bekas. Massa meminta Polda Papua segera menangkap JUT dan pengikutnya untuk diproses secara hukum.

Untuk meredam timbulnya pertikaian antar umat beragama, Kapolda Papua, Irjen Martuani Sormin mengambil langkah cepat. Kapolda Papua mengundang pihak gereja-gereja dan pengurus MUI dan stakeholder terkait untuk rapat bersama. Hal yang sama dilakukan oleh Walikota Jayapura yang menggelar pertemuan dengan berbagai pihak

untuk meredam meluasnya amarah warga.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda dan Walikota Jayapura, meminta Komnas HAM RI Perwakilan Papua, untuk melakukan sejumlah upaya guna mengakhiri konflik tersebut.

Setelah melakukan berbagai pertemuan dengan sejumlah pihak terkait, Komnas HAM Papua meminta Polda Papua agar segera melakukan penegakkan hukum. Atas perbuatannya, JUT dan 6 orang pengikutnya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang membawa, menguasai dan memiliki senjata tajam tanpa ijin dan Pasal 170 ayat (2) ke-1 tentang barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Selain itu, atas pertimbangan kondisi keamanan dan ketertiban umum serta demi menjaga relasi antar umat beragama di Kota Jayapura, maka Komnas HAM Papua menyarankan kepada Polda Papua agar yang bersangkutan menjalani proses hukum di luar Papua.

Pertimbangan ini didasarkan pada penilaian Komnas HAM Papua bahwa kehadiran JUT dan pengikutnya telah meresahkan warga baik di Kota Jayapura maupun Kabupaten Keerom. Sebelumnya, Pemda Keerom telah berupaya memulangkan JUT dan pengikutnya secara patut. Namun upaya ini gagal karena tidak ada sikap kooperatif dari JUT. Apabila hal ini dibiarkan maka berpotensi menimbulkan konflik yang dapat mengganggu nilai dan semangat toleransi antar umat beragama di Papua yang selama ini sudah berjalan baik.



Prosesi persidangan yang telah selesai di Pengadilan Negeri Makassar

Akhirnya, JUT dan para pengikutnya menjalani sidang di Pengadilan Negeri Makasar. Selama proses itu berjalan, Komnas HAM Papua terus melakukan pemantauan, termasuk mendampingi keluarga korban.

2) Pengaduan Buruh Sawit dari Arso Timur

Masyarakat Adat Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom menyampaikan pengaduan ke Komnas HAM Papua tentang kasus perselisihan pengurus Koperasi Tani Sawita Susjetkri dengan PT Tandan Sawita Papua (PT. TSP).

Berdasarkan pengaduan itu, Komnas HAM Papua melakukan upaya pramediasi dan bertemu dengan pihak-pihak terkait pada 16 – 18 Oktober 2019. Komnas HAM Papua melakukan pertemuan dengan Pemda Keerom, masyarakat Adat Arso Timur, Pengurus Koperasi Tani Sawita Susjetkri dan PT. TSP.



Bertemu Pemda Kab. Keerom

Dari data yang dihimpun, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menilai penting untuk melakukan pra mediasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat adat Arso Timur serta Pengurus Koperasi Tani Sawita Susjetkri (masyarakat adat adalah bagian dari koperasi) yang dibina secara bertahap oleh manageman PT TSP.

Berkaitan dengan kegiatan pra mediasi itu, maka Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga mandiri yang kedudukannya

setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia yang diatur dalam UU No.39 /1999 tentang HAM.

Tujuan dari Tim Komas HAM Perwakilan Papua turun ke Arso, yaitu untuk melihat, mendengar dan melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan dari berbagai pihak untuk melakukan pra mediasi agar mendapatkan kesepakatan bersama oleh para pihak yang berselisih. Kemudian, tujuan lainnya adalah untuk melihat sejauh mana PT Tandan Sawita Papua menjawab pemenuhan hak atas kesejahteraan masyarakat adat pemilik ha katas tanah adat juga para buruh sawit.

Berdasarkan hasil pertemuan dengan berbagai pihak, maka Komnas HAM Perwakilan Papua berkesimpulan:

1. Masyarakat belum memahami tentang hubungan Antara perusahaan dengan masyarakat.
2. Masyarakat ingin ada kesepakatan yang jelas antara masyarakat dan perusahaan.

Untuk itu, Komas HAM Perwakilan Papua memberikan saran:

1. Perlu ada pertemuan dengan para pihak sehingga jelas posisi masyarakat dalam pengelolaan kebun sawit.
2. Perlu dibuat perjanjian kerjasama untuk mendapatkan kesepakatan sehingga ada hak dan kewajiban yang megikat Antara penduduk asli dan perusahaan.

***3)* Karyawan Dipecat, Perusahaan Keluarkan Surat Kematian**

Perusahaan Kelapa Sawit, PT. Satrindo Jaya Agropalma yang beroperasi di Kampung Lereh, Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 76 karyawannya. Tetapi anehnya, perusahaan itu mengeluarkan Surat Keterangan Kematian (tertanggal 28 Juni 2018) bagi mereka yang di PHK dengan maksud agar bisa mengurus Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Tenaga Kerja.

Kebijakan perusahaan yang menerbitkan Surat Keterangan Kematian ini menimbulkan protes dari para karyawan. Nyaris terjadi bentrok. Tidak terima dengan kebijakan ini, para karyawan mengadu ke Komnas HAM Papua.

Menindaklanjuti pengaduan ini, Komnas HAM Papua melakukan upaya pramediasi guna mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari alternatif penyelesaian yang berkeadilan.

Pada saat melakukan pertemuan awal, pihak perusahaan

menyampaikan bahwa terkait Surat Keterangan Kematian bagi karyawan yang dibenrhentikan itu bukan merupakan kebijakan atau keputusan perusahaan. Perusahaan mengakui bahwa terjadi kelalaian atau kesalahan akibat ketidakcermatan administrasi pada saat dokumen dikirim ke BPJS Ketenagakerjaan.

Atas kesalahan ini pihak perusahaan menyampaikan permohonan maaf kepada para karyawan dan keluarganya melalui Surat Pernyataan. Selain itu, perusahaan bersedia memberikan kompensasi sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 76 orang dan bersedia menerima mereka kembali sesuai dengan ketentuan perusahaan.



Bertemu karyawan PT. Satrindo Jaya Agropalma yang di PHK

Komnas HAM Papua telah bertemu dan meminta keterangan para karyawan yang diPHK. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan bahwa pihak perusahaan telah menyampaikan permohonan maaf dan memberikan kompensasi bagi kami. Kami bisa dipekerjakan kembali di perusahaan ini asalkan bisa memenuhi sejumlah ketentuan sesuai standar perusahaan, misalnya mengajukan lamaran, dengan melampirkan KTP, KK, SKCK, dan pemeriksaan kesehatan dari perusahaan.



Bertemu pihak Perusahaan

Terkait SKCK, para karyawan merasa kesulitan karena untuk mengurus SKCK harus melampirkan ijazah dan akta kelahiran. Rata-rata karyawan yang diPHK tidak memiliki dokumen dimaksud.

Para karyawan meminta Komnas HAM Papua untuk membantu berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk mempertimbangkan persyaratan ini.

Berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak, Komnas HAM Papua menyarankan agar mengedepankan upaya damai dan berorientasi pada penyelesaian masalah yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip HAM.

V
PELAYANAN PENGADUAN

A. Pelayanan Pengaduan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap perbuatan pelanggaran HAM dapat diadukan ke Komnas HAM. "Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM". (Pasal 90 ayat 1).

Pelayanan pengaduan oleh Komnas HAM Perwakilan Papua merupakan wujud nyata pelayanan publik kepada semua warga negara yang berada di Tanah Papua berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM yang telah terjadi atau sedang terjadi atau akan terjadi dalam bentuk pengaduan atau laporan.

UU 39 Tahun 1999 menetapkan bahwa perbuatan pelanggaran HAM yang dapat dilaporkan atau diadukan ke Komnas HAM meliputi 10 hak dasar manusia, yakni, hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak.

Setiap orang dapat menyampaikan pengaduan atau laporan secara langsung ke kantor atau melalui surat atau telepon yang tersedia pada Komnas HAM Papua. Selain itu dalam perkembangannya, berdasarkan pertimbangan tertentu, Komnas HAM Papua membuka Pelayanan Pengaduan Pro Aktif langsung di wilayah terkait dan melalui media masa. Laporan atau pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penangangannya berdasarkan fungsi atau kewenangan Komnas HAM.

B. Matriks Pelayanan Pengaduan Langsung

Selama 2019 Komnas HAM Papua melalui Sub Bagian Pelayanan Pengaduan menerima pengaduan dari masyarakat di berbagai daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pengaduan tersebut disampaikan secara langsung di kantor Komnas HAM Papua, melalui surat dan telepon.

Jumlah pengaduan yang diterima Komnas HAM Papua pada 2019 sebanyak 65 berkas, yang terdiri dari 62 kasus baru dan 2 kasus lanjutan. Dari 65 berkas pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan kajian terhadap substansi pengaduan oleh analis pengaduan dan dilimpahkan ke fungsi pemantauan sebanyak 28 kasus dan fungsi mediasi sebanyak 4 kasus. Selanjutnya penanganan atas kasus-kasus tersebut dilakukan sesuai fungsi masing-masing bagian dengan cara meminta klarifikasi melalui surat atau secara langsung, pemantauan, tinjau lapangan serta pra mediasi dan diakhiri dengan penyampaian rekomendasi kepada pihak-pihak terkait.

Selama 2019, Sub Bagian Pelayanan Pengaduan mencatat sebanyak 23 berkas pengaduan ditutup dengan alasan, materi pengaduan bukan merupakan pelanggaran HAM, terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian pengaduan tersebut dan sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat 10 berkas pengaduan yang dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi ketentuan atau syarat-syarat, misalnya tidak memiliki bukti awal yang memadai dan kekurangan berkas lainnya.

Berdasarkan pengaduan yang diterima, Sub Bagian Pelayanan Pengaduan melakukan pemetaan berdasarkan tema hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya. Hasil pemetaan tersebut menunjukan bahwa sepanjang 2019, terdapat 45 kasus mengenai dugaan pelanggaran hak sipil dan politik serta 18 kasus terkait dugaan pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya.

Untuk memberi gambaran secara jelas mengenai pelayanan pengaduan sepanjang 2019 maka dapat dilihat melalui tabel atau grafik di bawah ini.

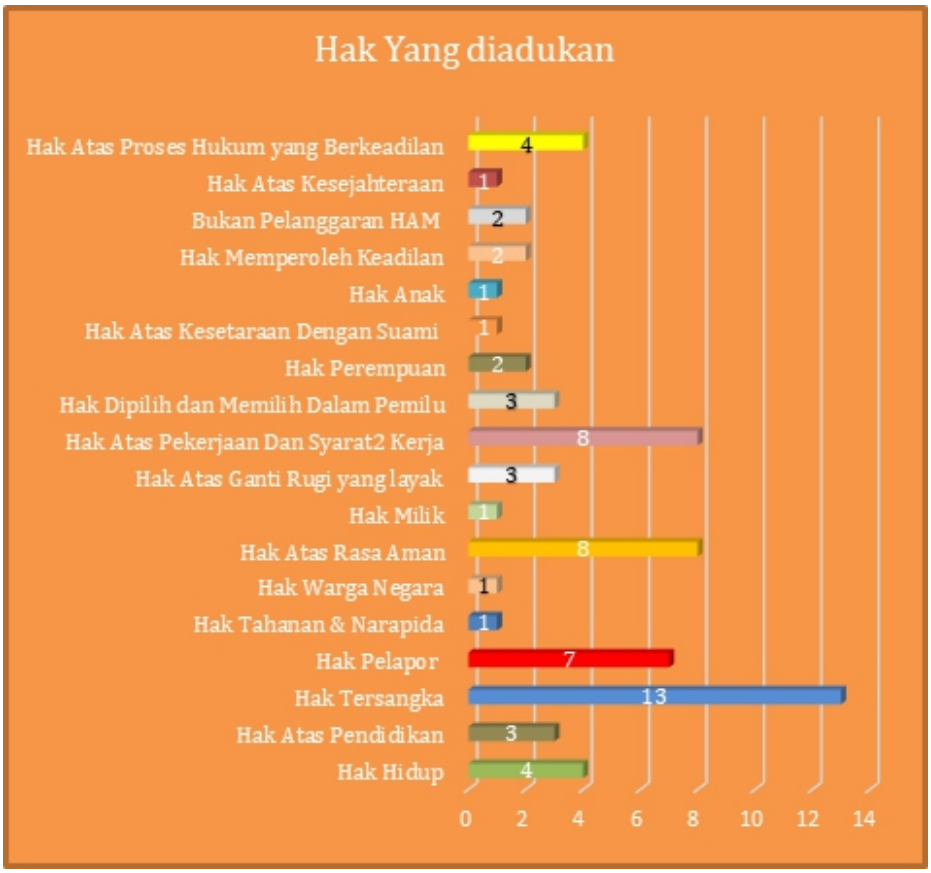
DATA PENGADUAN 2019

Uraian	Jumlah
Jumlah Berkas	65
Jumlah Pengaduan	62
Jumlah Pengaduan Lanjutan	2
Pengaduan SIPOL	45
Pengaduan EKOSOB	18
Dilimpahkan ke Bagian Pemantauan	28
Dilimpahkan ke Bagian Mediasi	4
Pengaduan Selesai/Ditutup (*Bukan PH, Rekomendasi Penyelesaian Yang Lain)	23
Diarsipkan (*Kurang kelengkapan dokumen & Barang Bukti)	10

a. Berdasarkan Hak yang diduga dilanggar

Tema/Hak Yang diadukan	Jumlah
Hak Hidup	4
Hak Atas Pendidikan	3
Hak Tersangka	13
Hak Pelapor	7
Hak Tahanan & Narapida	1
Hak Warga Negara	1
Hak Atas Rasa Aman	8
Hak Milik	1
Hak Atas Ganti Rugi yang Layak	3

Tema/Hak Yang diadukan	Jumlah
Hak Atas Pekerjaan Dan Syarat2 Kerja	8
Hak Dipilih dan Memilih Dalam Pemilu	3
Hak Perempuan	3
Hak Anak	1
Hak Memperoleh Keadilan	2
Bukan Pelanggaran HAM	2
Hak Atas Kesejahteraan	1
Hak Atas Proses Hukum yang Berkeadilan	4

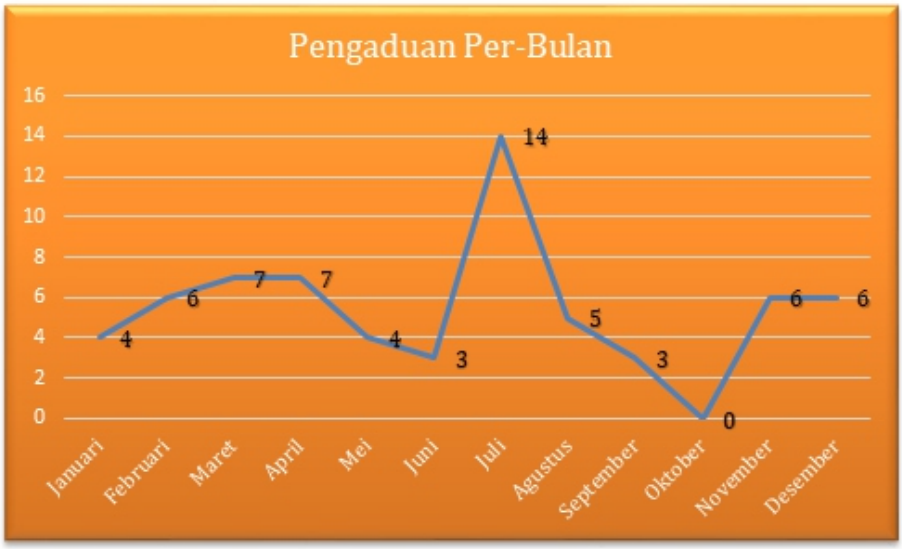


Klasifikasi Hak	Jumlah
Sipol (Hak Sipil dan Politik)	52
Ekosob (Hak Ekonomi Sosial dan Budaya)	13



b. Jumlah Pengaduan Per-bulan

Bulan	Jumlah
Januari	4
Februari	6
Maret	7
April	7
Mei	4
Juni	3
Juli	14
Agustus	5
September	3
Oktober	0
November	6
Desember	6



d. Berdasarkan Pihak yang Diduga Melanggar

Pihak yang Diduga Melanggar	Jumlah
Pemerintah	18
Kepolisian	30
TNI	6
Kelompok	2
Individu	6



e. Ditindak Lanjuti Melalui Koordinasi Pemantauan Langsung

No	Kegiatan	Tanggal Pemantauan
1	Koodinasi Dan Monitoring Kasus Hak Atas Pendidikan Di Kabupaten Mamberamo Raya	10 – 14 September 2019
2	Tindak Lanjut Pengaduan Sengketa Penyelesaian Kompensasi Tanah Ulayat Pada Masalah Salah Bayar Ganti Untuk Tanah Bandara Mopah Merauke Tahap Ii Tahun 2010 Tertanggal 08 September 2010	18 – 21 September 2019
3	Koodinasi Dan Monitoring Pra Mediasi Kasus Perselisihan Pengurus (Karyawan) Koperasi Tani Sawita Susjetkri Dengan PT Tandan Sawita Papua Di Kabupaten Keerom	15 – 17 Oktober 2019
4	Tindak Lanjut Pengaduan Penyalahgunaan Adminstasi Para Karyawan Phk, Pt. Satrindo Jaya Agropalma Tertanggal 28 Juni 2018	18 -20 November 2019
5	Koordinasi Penangkapan terhadap 34 orang di duga melakukan Makar	02 Desember 2019
6	Koordinasi Kasus Insiden Keributan di komplek Kld IIIA Sorong yang mengakibatkan ada korban yang mati atas nama David Nauw dan 9 rumah penduduk terbakar.	04 – 06 Desember 2019
7	Koordinasi Pemantauan Situasi Keamanan di Kab. Jayapura Pasca HUT OPM 1 Desember 2019	04 Desember 2019

C. Matriks Pelayanan Pengaduan Proaktif

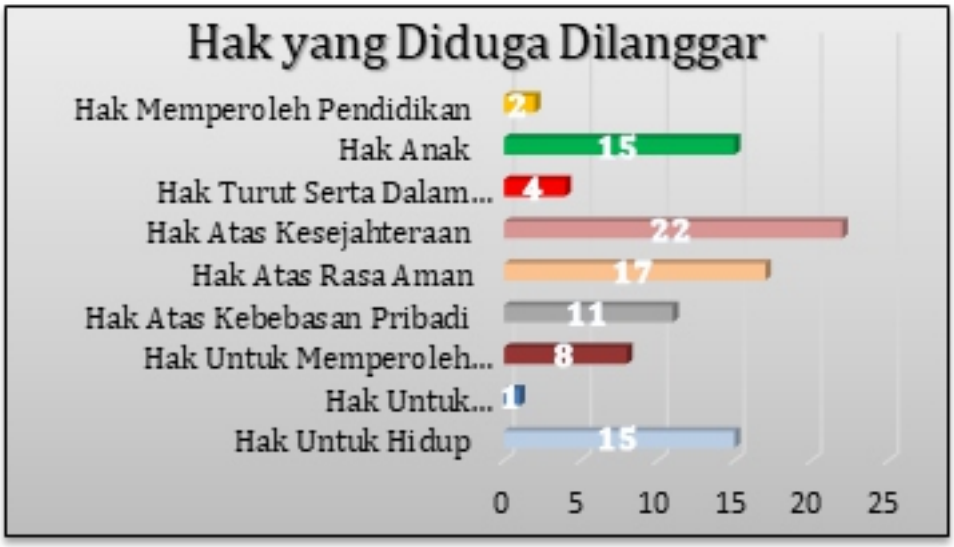
Selain pengaduan yang disampaikan keada Komnas HAM melalui tatap muka atau datang langsung, telepon atau surat, Komnas HAM Papua juga melakukan pelayanan pengaduan proaktif.

Pelayanan pengaduan proaktif dilakukan dengan dua cara yakni, pertama; pengaduan yang diterima pada saat pembukaan pos pengaduan di daerah oleh Sub Bagian Pelayanan Pengaduan, kedua; berdasarkan inisiatif bagian pemantauan yang diperoleh dari berita-berita yang ada di media massa dan atau elektronik dan atau pengaduan langsung yang diterima di lapangan.

Pelayanan pengaduan proaktif selama 2019 dapat dilihat dalam matriks di bawah ini:

a. **Berdasarkan Hak yang diduga dilanggar**

Hak yang Dilanggar	Persen %	Jumlah
Hak Untuk Hidup	16	15
Hak Untuk Mengembangkan Diri	1	1
Hak Untuk Memperoleh Keadilan	8	8
Hak Atas Kebebasan Pribadi	12	11
Hak Atas Rasa Aman	18	17
Hak Atas Kesejahteraan	23	22
Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan	4	4
Hak Anak	16	15
Hak Memperoleh Pendidikan	2	2
Jumlah Total	100%	95



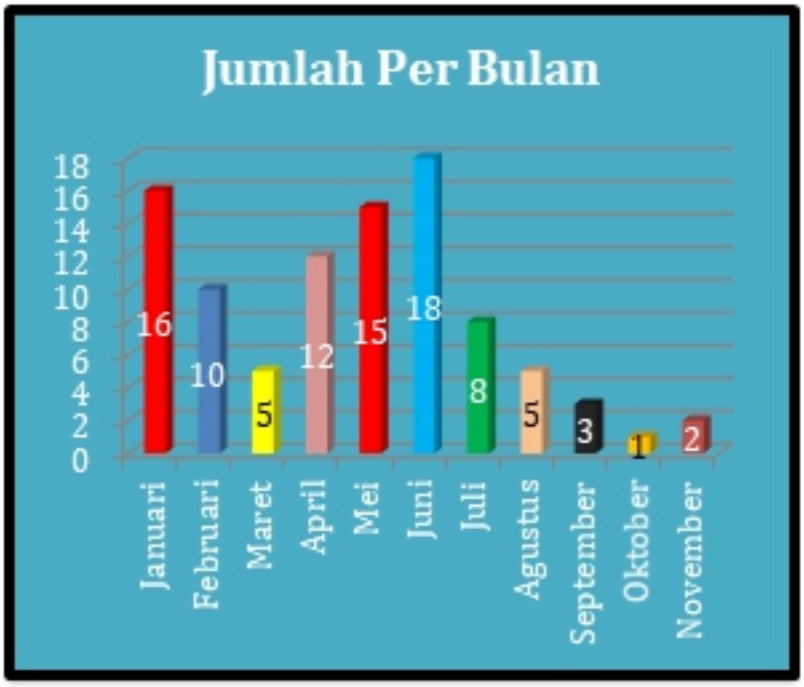
b. Berdasarkan Klasifikasi Hak yang diduga dilanggar

Klasifikasi Hak	Jumlah
Sipol (Hak Sipil dan Politik)	69
Ekosob (Hak Ekonomi Sosial dan Budaya)	26



c. Jumlah Perbulan

Bulan	Jumlah
Januari	16
Februari	10
Maret	5
April	12
Mei	15
Juni	18
Juli	8
Agustus	5
September	3
Oktober	1
November	2



d. Jumlah Korban

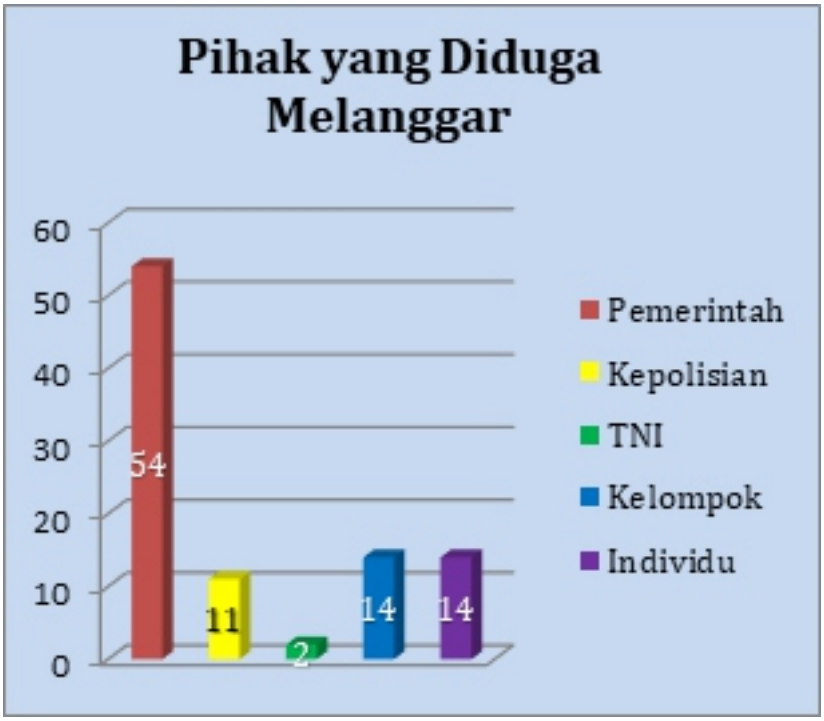
Korban	Jumlah
Korban Luka	102
Korban Meninggal	99



Ket : Tragedi Wamena yang paling besar yaitu 33 Meninggal dunia

e. Berdasarkan Pihak yang Diduga Melanggar

Pihak yang Diduga Melanggar	Jumlah
Pemerintah	54
Kepolisian	11
TNI	2
Kelompok	14
Individu	14



f. Ditindak Lanjuti Melalui Koordinasi Pemantauan Langsung

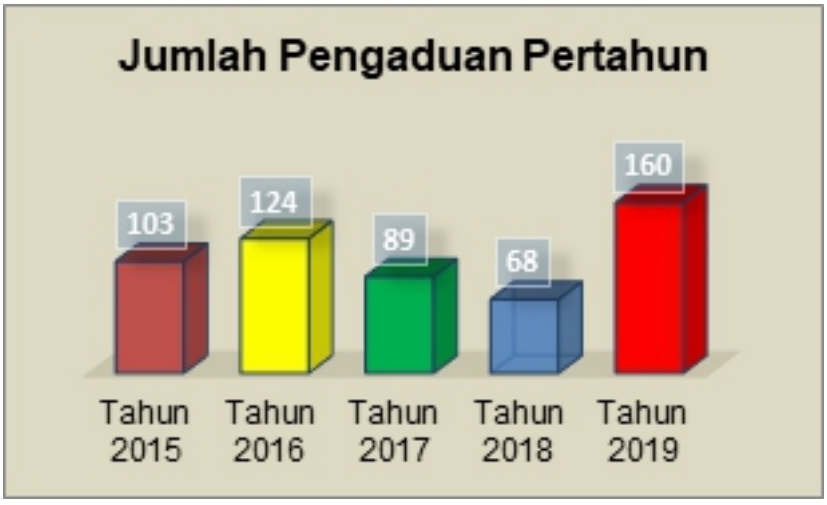
No	Kegiatan	Tanggal Pemantauan
1	Pemantauan Kondisi Ham Di Kota Sorong Pasca Aksi Massa Terkait Ujaran Rasis	21 – 24 Agustus 2019
2	Koordinasi Kasus Kerusuhan Yang Terjadi Di Manokwari	21 – 24 Agustus 2019
3	Koodinasi Dan Monitoring Kasus Hak Atas Pendidikan Di Kabupaten Mamberamo Raya	10 – 14 September 2019
4	Koordinasi Kasus Pemulangan Mahasiswa Di Kota Study Manado	11 – 15 September 2019
5	Koordinasi Kasus Insiden Demonstrasi Berujung Ricuh Di Kabupaten Fakfak	11 – 16 September 2019
6	Kondisi Ham Di Kabupaten Deiyai Pasca Aksi Demonstrasi Menentang Rasisme	14 – 16 September 2019
7	Koordinasi Kasus Kepulagan Mahasiswa Papua Dari Kota Bali Pasca Peristiwa Di Surabaya	18 – 21 September 2019

No	Kegiatan	Tanggal Pemantauan
8	Investigasi Komnas Ham RI Perwakilan Papua Selepas Kerusuhan Wamena	25 – 26 September 2019
9	Koordinasi Dan Monitoring Kasus Dugaan Penambangan Ilegal Maining Dan Dugaan Pembantaian Warga Penambang Ilegal Di Mining 1 Korwai Perbatasan Kabupaten Boven Digoel, Asmat, Yahukim Dan Penggunungan Bintang.	26 – 29 September 2019

D. Matriks Pelayanan Pengaduan 2019

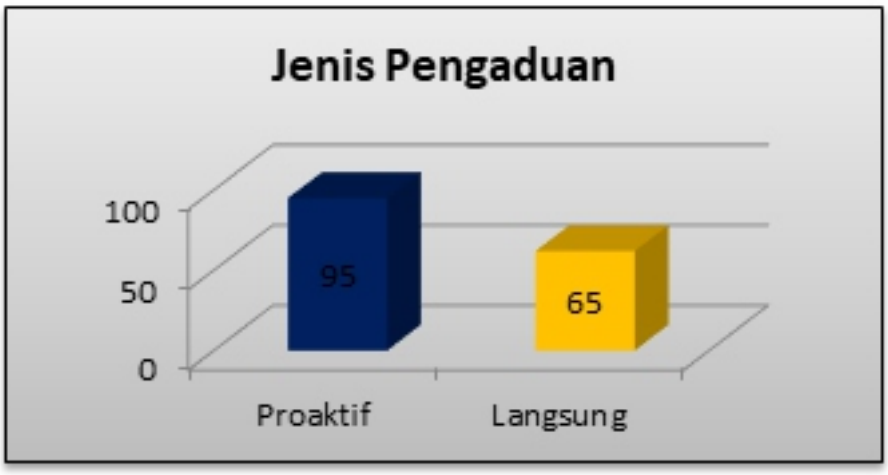
1) Jumlah Pengaduan Per-Tahun

Jumlah Pengaduan Per-Tahun	Jumlah
Tahun 2015	103
Tahun 2016	124
Tahun 2017	89
Tahun 2018	68
Tahun 2019	**160**



2) Jenis Pengaduan

Jenis Pengaduan	Jumlah
Proaktif	95
Langsung	65



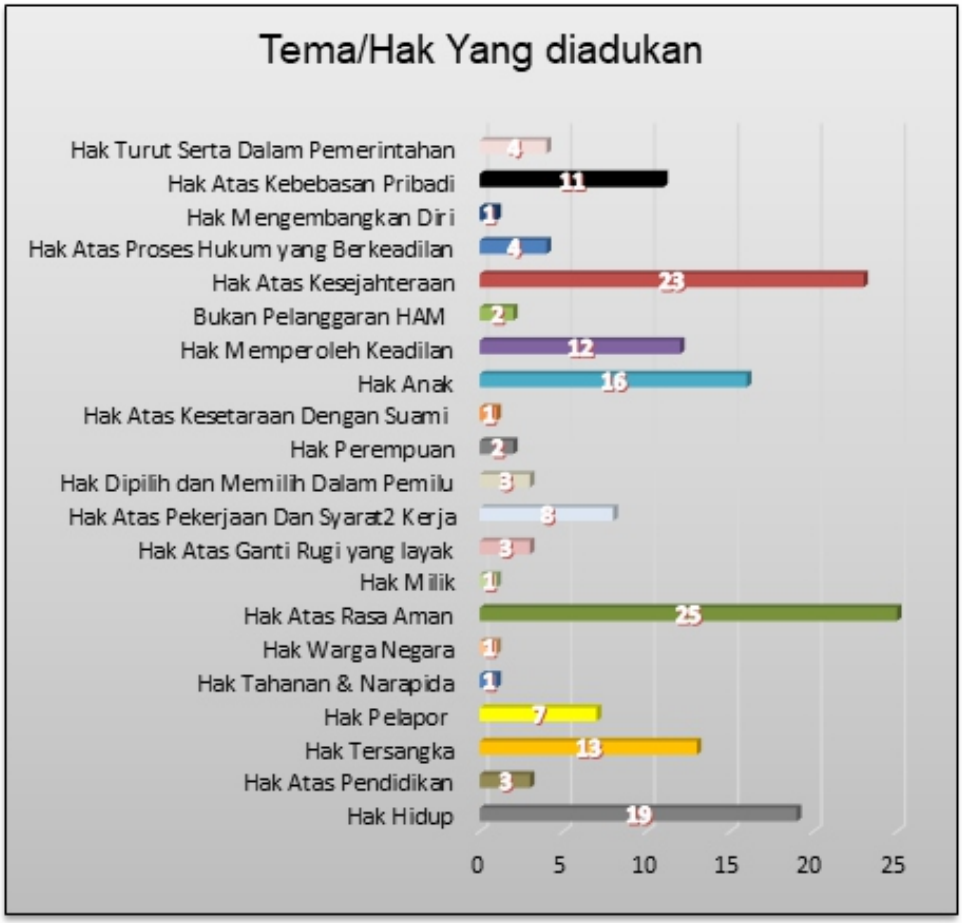
3) Berdasarkan Klasifikasi Hak yang diduga dilanggar

Klasifikasi Hak	Jumlah
Sipol (Hak Sipil dan Politik)	121
Ekosob (Hak Ekonomi Sosial dan Budaya)	39



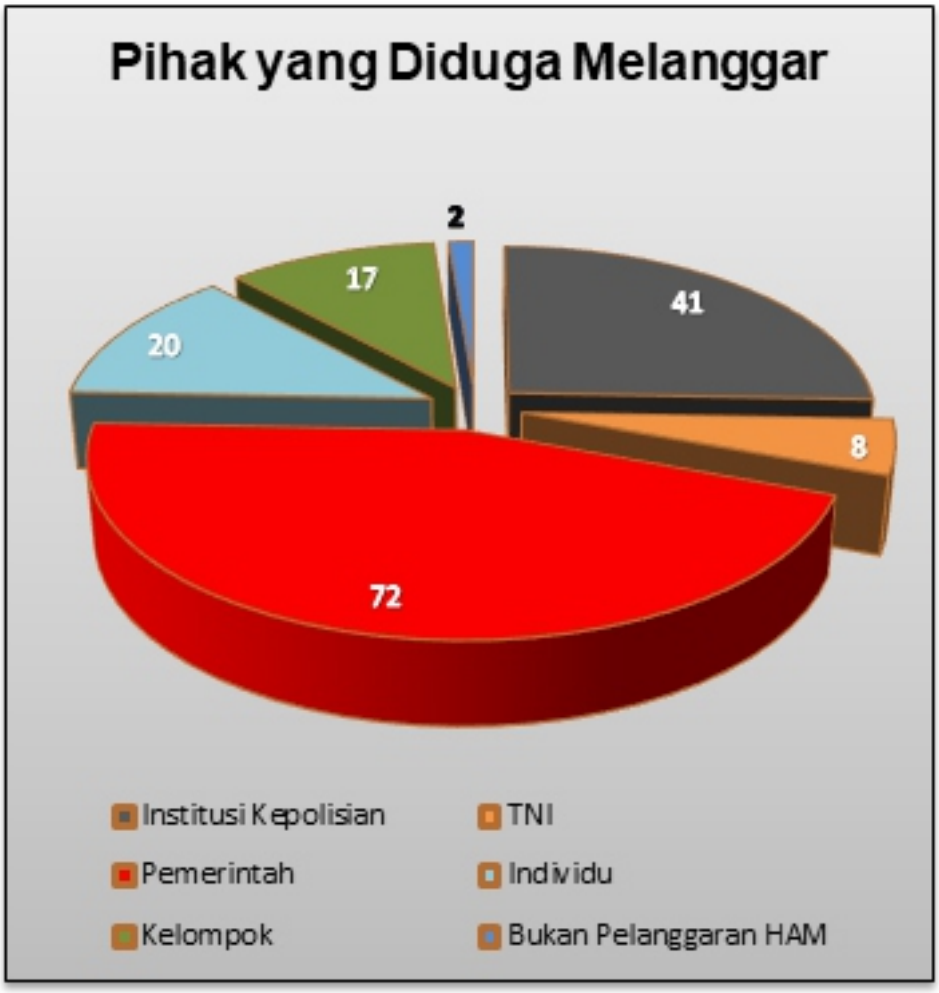
4) Berdasarkan Tema/Hak yang diadukan

Tema/Hak Yang diadukan	Jumlah
Hak Hidup	19
Hak Atas Pendidikan	3
Hak Tersangka	13
Hak Pelapor	7
Hak Tahanan & Narapida	1
Hak Warga Negara	1
Hak Atas Rasa Aman	25
Hak Milik	1
Hak Atas Ganti Rugi yang Layak	3
Hak Atas Pekerjaan Dan Syarat2 Kerja	8
Hak Dipilih dan Memilih Dalam Pemilu	3
Hak Perempuan	2
Hak Atas Kesetaraan Dengan Suami	1
Hak Anak	16
Hak Memperoleh Keadilan	12
Bukan Pelanggaran HAM	2
Hak Atas Kesejahteraan	23
Hak Atas Proses Hukum yang Berkeadilan	4
Hak Mengembangkan Diri	1
Hak Atas Kebebasan Pribadi	11
Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan	4



5) Berdasarkan Pihak yang diduga Melanggar

Pihak yg Diduga Melanggar	Jumlah
Institusi Kepolisian	36
TNI	8
Pemerintah	35
Individu	26
Kelompok	47
Bukan Pelanggaran HAM	2


Pihak yang Diduga Melanggar
2
17
41
20
8
72
Institusi Kepolisian
TNI
Pemerintah
Individu
Kelompok
Bukan Pelanggaran HAM

6) Berdasarkan Pengaduan Per-Bulan

Bulan	Jumlah
Januari	20
Februari	16
Maret	12
April	19
Mei	19
Juni	21
Juli	22
Agustus	10
September	6
Oktober	1
November	8
Desember	6



VI
PENUTUP

A. Rekomendasi

Setelah mengkaji dan menganalisis semua data, fakta, informasi dan temuan di lapangan, keterangan saksi, laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya, maka Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada sejumlah pihak guna melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penegakkan HAM di Tanah Papua.

Point-point rekomendasi dikelompokan sesuai tema yang diadukan selama 2019, sebagai berikut :

1) Penanganan Isu Rasisme

1. Meminta Presiden RI mengupayakan proses dialog di Tanah Papua dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat Sipil, dan pihak-pihak lainnya yang mewakili keseluruhan masyarakat Papua dalam kerangka perdamaian dan rekonsiliasi;
2. Meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan upaya penegakan hukum secara cepat, tepat, terukur dan transparan yang dimulai dengan penyelidikan terhadap Peristiwa di Surabaya mengenai dugaan adanya tindakan rasisme terhadap para penghuni asrama mahasiswa Papua dan semua peristiwa di Tanah Papua sehubungan dengan aksi demo menentang rasisme yang berakhir anarkis. Penegakkan hukum yang berkeadilan menjadi skala prioritas karena peristiwa ini menjadi perhatian internasional dan diharapkan dapat mengurangi ekskalasi keteganggan di Tanah Papua.
3. Berdasarkan kewenangan Komnas HAM RI yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis jo. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010, Komnas HAM RI memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan meliputi kegiatan pemantauan, pencarian fakta dan penilaian terkait dugaan

diskriminasi ras dan etnis. Oleh karena itu, Komnas HAM RI meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia agar dalam penegakan hukum terkait praktik ujaran kebencian ras dan etnis berkoordinasi dengan Komnas HAM. Komnas HAM akan memantau tindak lanjut penanganan hukum atas kasus tersebut dan mendorong pihak penegak hukum agar dalam menindaklanjuti perkara tersebut berpedoman pada ketentuan UU No. 40/2008.

4. Komnas HAM RI meminta Kepolisian Daerah Papua dan Papua Barat melakukan upaya penegakan hukum secara cepat, tepat, terukur dan transparan terhadap pelaku perusakan, pembakaran, penganiayaan, dan pembunuhan dalam sejumlah peristiwa demonstrasi yang berakhir anarkis di Tanah Papua dengan tetap mempertimbangkan dan memperhatikan serta menghormati nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia;
5. Komnas HAM mendorong adanya proses investigasi yang lebih mendalam untuk mengungkap penyebab peristiwa Wamena, pelaku yang terlibat, serta pihak-pihak yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya;
6. Komnas HAM RI meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Papua untuk mempercepat proses pemulihan secara menyeluruh di Tanah Papua terutama pemulihan kondisi masyarakat baik fisik maupun psikis melalui *trauma healing* serta pemulihan kegiatan perekonomian masyarakat termasuk pembangunan atau perbaikan bangunan maupun infrastruktur yang rusak;
7. Komnas HAM RI meminta Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Papua dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memastikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh warga negara di Tanah Papua serta memastikan atau meminimalisir tidak terulangnya peristiwa yang sama di masa yang akan datang;

2) Penanganan Masalah Nduga

1. Meminta Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Papua dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memastikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh warga

negara di Kabupaten Nduga;

2. Meminta Kepolisian Daerah Papua melakukan upaya penegakan hukum secara cepat, tepat, terukur dan transparan terhadap pelaku kriminal dan kejahatan di Nduga dengan tetap mempertimbangkan dan memperhatikan serta menghormati nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia;
3. Meminta Kementerian Dalam Negeri RI untuk memastikan peran Pemerintah Daerah secara optimal khususnya Pemerintah Kabupaten Nduga dan Pemerintah Kabupaten yang menjadi lokasi pengungsian bagi masyarakat Nduga terutama memastikan pemenuhan hak-hak dasar seperti sandang, pangan, papan termasuk kesehatan dan pendidikan termasuk distribusi bantuan secara merata;

3) Pemenuhan Hak Sipil dan Politik

Meminta Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat untuk melaksanakan amanat Otonomi Khusus secara konsekuen dengan mengupayakan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan Pengadilan HAM melalui Peraturan Presiden untuk mempercepat proses perdamaian, rekonsiliasi dan penyelesaian pelanggaran HAM di Tanah Papua;

4) Pemenuhan Hak Ekosob

Meminta Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat untuk melaksanakan amanat Otonomi Khusus secara konsekuen dengan mengupayakan pembentukan berbagai peraturan teknis pelaksanaan seperti, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), Peraturan Daerah Provinsi dalam rangka mengatur dan mengelola sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, perekonomian mikro, ketenagakerjaan dan memberdayakan potensi sosial budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.

B. Catatan Penutup

Refleksi penegakkan HAM di 2019

Prolog

"Tiba masa, tiba akal." Itulah ungkapan yang menggambarkan berbagai kebijakan negara terkait upaya penegakkan HAM di Tanah Papua. Ketika muncul konflik, negara dengan cepat bereaksi untuk mengupayakan pemulihan dan penanganan. Kehadiran negara dapat dilihat melalui aparat keamanan, lengkap dengan senjata, kendaraan anti huru hara, lapis baja. Penanganan konflik seperti ini biasa disebut dengan pola pendekatan keamanan. Namun ketika semuanya berjalan tenang, negara nyaris tidak menampakkan kehadirannya.

Hingga kini, masyarakat Papua masih menanti penegakkan HAM yang berkeadilan. Dalam berbagai kesempatan, masyarakat Papua selalu menyuarakan perjuangan ini sebagai penanda bahwa para korban masih setia menunggu keadilan sekaligus tanda peringatan bagi negara bahwa masalah ini belum diselesaikan. Penegakkan HAM yang dimaksud adalah berkaitan dengan meminta pertanggungjawaban negara terhadap setiap bentuk pelanggaran HAM maupun pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu bahkan hingga saat ini. Barangkali kita membutuhkan sebuah konflik sebagai momentum untuk memancing reaksi negara.

Kondisi ini menggambarkan bahwa penegakan HAM sangat sulit ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang melibatkan negara. Hal ini setidaknya telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan HAM beserta aparatur penegaknya. Dan jika kondisi ini terjadi berulang-ulang dalam setiap era kepemimpinan negara, maka kredibilitas negara menjadi taruhannya.

Dalam kenyataannya, jika kondisi itu benar-benar terjadi, maka benih-benih ketidakpercayaan itu bisa meruntuhkan kekuatan negara yang perkasa sekalipun. Di sisi lain, ketika menghadapi persoalan hidup yang bersentuhan dengan hukum dan HAM, masyarakat akan cenderung main hakim sendiri dan tidak memilih proses hukum sebagai wadah untuk menangani persoalan itu. Kita bisa saja kembali ke masa silam, dimana hukum rimba berlaku, kekerasan merajalela – seperti kata Thomas Hobes dalam istilah *homo homini lupus* – manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lain. Hal ini terjadi karena proses penegakkan HAM dinilai tidak menunjukan perkembangan yang signifikan bahkan nyaris tidak ada hasil. Keadilan untuk mewujudkan

perdamaian hanya slogan semata. Papua Tanah Damai – akan sulit terealisasi. Tanah Papua akan terus membara jika negara tidak memiliki *good will* untuk menyelesaikan persoalan sampai ke akar-akarnya.

Tanah Papua ada masalah apa?

Salah satu jawaban ketika seseorang (Orang Asli Papua dan orang yang pernah tinggal di Papua, termasuk orang yang mengenal kondisi Papua secara historis) ditanya: *ada masalah apa di Papua sehingga terus bergejolak sampai hari ini?* Pada umumnya pertanyaan tersebut dijawab dengan pernyataan: *pelanggaran HAM yang tidak pernah diselesaikan oleh negara*. Jawaban ini, mengindikasikan bahwa publik sesungguhnya telah memetahkan salah satu persoalan umum yang harus diselesaikan oleh negara.

Terkait ini, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan bahwa persepsi tentang akar masalah Papua versi pemerintah – bahwa semua disebabkan oleh faktor kesejahteraan yang kurang sehingga muncul keinginan Papua untuk merdeka tidak dibenarkan oleh masyarakat Papua sendiri.

Menurut kajian LIPI, setidaknya, ada 4 akar masalah di Papua. Pertama, masalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. Orang Papua memandang bahwa proses integrasi ke dalam Indonesia itu dilakukan secara benar.

Kedua, masalah operasi militer yang terjadi karena konflik tersebut di atas tidak pernah diselesaikan. Operasi militer yang berlangsung sejak 1965 hingga kini, membuat masyarakat Papua memiliki catatan panjang mengenai kekerasan negara dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal itu membuat masyarakat Papua semakin sakit hati terhadap Indonesia. Luka kolektif itu terpendam lama dan selalu disosialisasikan dari *honai* ke *honai*.

Ketiga, semua hal buruk yang terjadi di Papua menimbulkan stigma pada masyarakat Papua sebagai orang yang termarjinalisasikan. Dengan migrasi, pembangunan, dan lain-lain yang tidak melibatkan orang Papua, maka mereka merasa tersingkir. Jika sudah merasa tersingkir dengan kenyataan kondisi pendidikan, kesehatan dan kesajteraaan yang buruk, masyarakat Papua semakin merasa terdiskriminasi oleh proses modernisasi.

Keempat, kegagalan pembangunan Papua. Pemerintah gagal membangun. Ukurannya sederhana saja, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Kenyataan di Papua, mudah sekali menemukan

sekolah yang tidak berjalan proses belajar mengajar karena ketiadaan guru dan juga puskesmas yang kosong karena ketiadaan tenaga medis dan obat-obatan. Negara tidak hadir disaat orang Papua membutuhkan.

Selanjutnya, LIPI menyarankan agar dilakukan dialog sebagai pembuka jalan untuk menyepakati masalah dan menemukan jalan untuk menyelesaikan masalah itu. Merespon saran LIPI, Jaringan Damai Papua (JDP) yang dimotori Alm. Neles Tebay, Pr telah menggagas Dialog Jakarta Papua dalam suatu sistem yang memungkinkan untuk membedah dan mengobati masalah secara bersama. Hingga napas terakhirnya Neles Tebay, Dialog Jakarta Papua belum direalisasikan. Sementara pemerintah (negara) tidak menunjukkan keseriusannya untuk merespon ide dialog tersebut. Apakah kita membutuhkan konflik sebagai momentum untuk memancing reaksi negara membuka ruang dialog itu?

Carut Marut Penegakkan HAM di Tanah Papua

Sejak era reformasi hingga saat ini penegakan HAM di Papua tidak menunjukan kemajuan berarti. Tidak ada *good will* dari masing-masing rezim untuk menyelesaikan sejumlah pelanggaran HAM di Papua dalam sebuah sistem yang berkeadilan. Kita dapat merunutnya satu per satu.

1999 – 2001 era kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada masa ini isu Papua Merdeka semakin menguat. Keberadaan Theys Hiyo Eluay, Ketua Presidum Dewan Papua (PDP) sangat mempengaruhi pergerakan masyarakat sipil kala itu. Gus Dur meresponnya dengan kebijakan Otonomi Khusus. Bendera bintang kejora boleh berkibar. Namun pada, 23 Juli 2001, Gus Dur dilengserkan secara politis melalui MPR dalam Sidang Istimewah. Meskipun masyarakat Papua mengenangnya sebagai pemimpin moderat, namun di masa kepemimpinannya terjadi dua peristiwa yang cukup menghebohkan yakni peristiwa 7 Desember 2000 di Abepura yang dikenal dengan Abepura Berdarah dan di Wasior pada 13 Juni 2001 yang dikenal dengan Wasior Berdarah.

2001 – 2004 era Megawati Soekarnoputri. Pada masa ini Otsus terbentuk melalui UU No. 21/2001. Di tengah isu disintegrasi yang masih berhembus kencang, masyarakat Papua berharap bahwa kebijakan Otsus dapat menyelesaikan sejumlah persoalan, termasuk penegakkan HAM melalui KKR dan Pengadilan HAM. Situasi bertambah buruk, ketika Ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay, diculik dan dibunuh oleh anggota Kopassus pada 10 November 2001. Menghadapi beragam

persoalan ini, Megawati menetapkan kebijakan melalui Instruksi Presiden Nomor 1/ 2003 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat yang merupakan implementasi UU Nomor No. 45/1999 tentang Pemekaran Wilayah Provinsi Papua. Kebijakan ini menuai protes panjang. Masyarakat Papua memandang bahwa pemekaran wilayah Papua mutlak menjadi wewenang Pemerintah Papua sesuai amanat Otsus. Namun pemerintah tetap pada keputusannya. Dalam keadaan demikian, masyarakat Papua sekali lagi dikejutkan dengan aksi pembobolan gudang senjata di Kodim 1702 Wamena pada 4 April 2003 yang berujung pada peristiwa Wamena Berdarah.

2004 – 2014 (dua periode) era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada era SBY, ketika masalah Papua semakin hangat, pemerintah belum menunjukan keseriusannya untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM di Papua. Isu Dialog Jakarta Papua yang digagas Jaringan Damai Papua bersama LIPI tidak ditanggapi secara serius. SBY memandang bahwa masalah di Papua itu soal kesenjangan pembangunan semata. Untuk mengatasinya SBY membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) melalui Peraturan Presiden No. 66/2011.

2014 – 2019 era Joko Widodo. Pada awalnya masyarakat Papua memiliki harapan pada sosok Jokowi untuk menyelesaikan sejumlah pelanggaran HAM di Tanah Papua karena terpilih dari kalangan sipil. Namun kenyataannya, Jokowi memiliki pandangan yang berbeda, masalah Papua adalah soal ketidakadilan pembangunan. Jokowi tercatat sebagai presiden yang paling sering mengujungi Papua dan menitikberatkan pembangunan pada aspek infrastruktur. Dalam hal penegakan HAM, Jokowi belum menunjukan komitmen untuk menyelesaikannya, meskipun pernah memerintahkan bawahanya untuk mendokumentasikan sejumlah pelanggaran HAM di Tanah Papua untuk diselesaikan, tetapi tidak diikuti dengan kontrol yang efektif. Pada masanya, ketika beberapa bulan setelah dilantik, terjadi peristiwa di Paniai pada 9 Desember 2019 yang dikenal sebagai peristiwa Paniai Berdarah.

Terhadap berbagai persoalan pelanggaran HAM di Tanah Papua, sejak berlakunya UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan terhadap beberapa kasus yang berpotensi terjadi pelanggaran HAM berat. Komnas HAM telah menetapkan 4 kasus sebagai pelanggaran HAM berat, yakni, Abepura Berdarah ditetapkan pada 8 Mei 2001, Wasior dan Wamena Berdarah ditetapkan pada 31 Juli 2004 dan Paniai Berdarah baru ditetapkan pada

03 Februari 2020. Berkas hasil penyelidikan Komnas HAM tersebut, telah diserahkan pada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada.

Penegakkan HAM tidak selesai pada hasil penyelidikan Komnas HAM semata. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah (negara) pemerintah memiliki itikad baik dan komitmen yang tinggi untuk menyelesaikannya sesuai dengan mekanisme UU 26/2000? Jawabannya sudah jelas: tidak ada. Kita bisa berkaca pada pengalaman. Sampai saat ini belum ada satu presiden pun yang menyatakan komitmennya dan diikuti dengan tindakan konkrit secara sungguh-sungguh untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua. Satu-satunya kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diselesaikan melalui mekanisme pengadilan HAM adalah peristiwa Abepura Berdarah, melalui Pengadilan HAM Makasar yang diputus pada 08 September 2005.

Hingga hari ini masyarakat Papua masih menanti keseriusan pemerintah – meskipun mereka sadar bahwa perjuangan ini membutuhkan kesabaran yang panjang. Apakah kita membutuhkan konflik sebagai momentum untuk menagih negara menyelesaikan pelanggaran HAM berat?

Beberapa peristiwa yang disebut di atas belum termasuk konflik di Nduga yang menyebabkan ribuan warga sipil mengungsi. Kasus rasisme di Surabaya yang direspon masyarakat Papua dengan aksi demonstrasi berakhir anarkis. Puluhan nyawa melayang sia-sia. Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Intan Jaya menyisahkan masalah baru. Namun pemerintah masih merespon dengan pola yang sama. Pendekatan keamanan dan penegakkan hukum tanpa menyentuh sedikit pun akar masalahnya. Manajemen konflik seperti ini hanya menimbulkan psikologis kolektif masyarakat Papua semakin terusik. Jika semakin lama, akan tumbuh benih ketidakpercayaan masyarakat Papua kepada negaranya. Ketidakpercayaan ini akan menjadi lagu merdu yang selalu didendangkan setiap waktu.

Apa yang harus kita lakukan?

Memang kita tidak pernah tahu kapan pemerintah RI melakukan upaya penegakkan HAM secara menyeluruh dengan menyentuh dan membedah serta menyelesaikan setiap pelanggaran HAM sampai ke akar-akarnya.

Kendati demikian, harapan tidak boleh surut. Perjuangan harus

terus digelorakan secara bersama. Agenda penegakkan HAM tidak dapat dilakukan secara parsial dan sporadis semata. Upaya ini harus menjadi gerakan bersama secara konsisten. Perjuangan bersama dengan hati nurani dan pikiran yang jernilah yang akan menyuburkan harapan itu.

Setiap keputusan untuk menyelamatkan kemanusiaan, kebenaran, keadilan dan kedamaian adalah mulia. Manusia-manusia mulia inilah yang akan membentuk negara berbudaya. Ini tentu kerja besar yang tidak dapat dilakukan secara sektoral. Karena itu, apapun keadaannya, sesungguhnya harapan itu masih ada. Harapan itulah yang menjadi alasan mengapa Komnas HAM masih terus bekerja meskipun belum optimal seperti yang diharapkan.

Profil Komnas HAM Papua

UU Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 76 ayat (4) menyebutkan bahwa perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah. Sejalan dengan itu, UU Nomor 21 tahun 2001, Pasal 45 ayat (2) mengamanatkan Pemerintah untuk membentuk Perwakilan Komnas HAM di Provinsi Papua.

Berdasarkan amanat dua UU ini dan mempertimbangkan Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 100/14404/SET tanggal 29 Oktober 2002 tentang Usulan Pembentukan Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Papua maka dibentuklah Perwakilan Komnas HAM Papua melalui Surat Keputusan (SK) Ketua Komnas HAM Nomor 20/Komnas HAM/VII/2003 tentang Pendirian Perwakilan Komnas HAM di Papua.

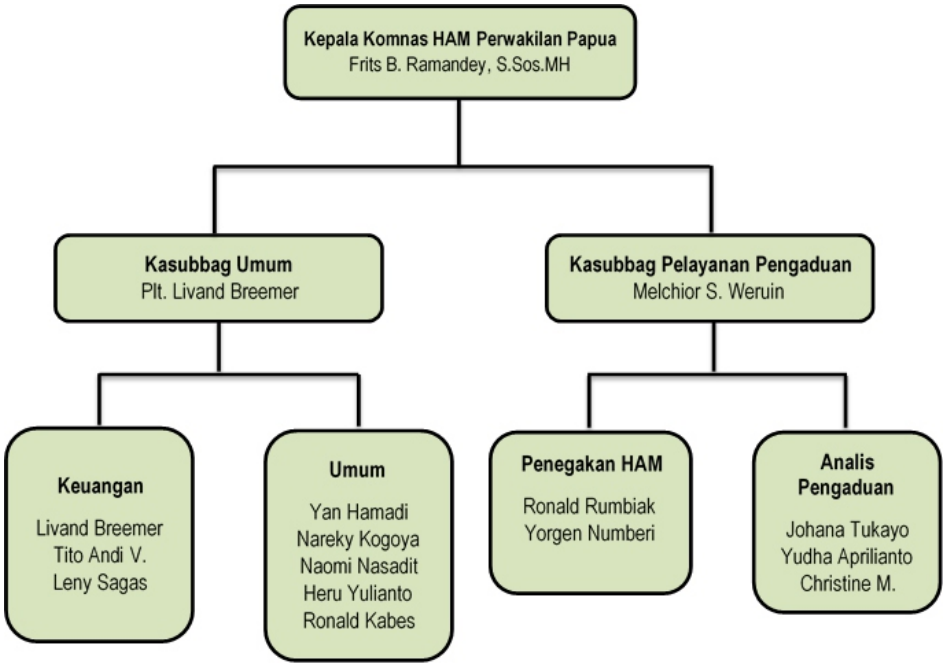
Sebagai "ujung tombak" Komnas HAM di daerah, Komnas HAM Perwakilan Papua melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999, Pasal (76) yaitu fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang HAM. Namun dalam pelaksanaanya, pelaksanaan fungsi tersebut berkoordinasi dengan Komnas HAM RI.

Untuk menunjang pelaksanaan fungsi sepanjang 2019, Komnas HAM Papua menerima anggaran yang bersumber dari APBN dan hibah APBD Provinsi Papua.

Pengelolaan APBN maupun Hibah APBD Pemerintah Provinsi Papua ditetapkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komnas HAM 2019 sebesar 1.300.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan rincian APBN sebanyak 300.000 (tiga ratus juta rupiah) dan APBD sebanyak 1.000.000.000 (satu milyar).

Sejak 2019, Komnas HAM Papua memiliki 15 orang pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 6 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 4 orang dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) 5 orang. Pada tahun sebelumnya Komnas HAM Papua hanya memiliki 11 orang pegawai.

Struktur Komnas HAM RI Perwakilan Papua



Biodata Pegawai Komnas HAM RI Perwakilan Papua



Nama : Frits B. Ramandey, S.Sos. M.H

Jabatan : Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua

TTL : Risei Sayati, 25 April 1975



Nama : Melchior Suban Weruin, S.H

Jabatan : Kasubbag Pelayanan Pengaduan

TTL : Flores Timur, 02 November 1983



Nama : Livand Breemer, S.E M.M.

Jabatan : Plt. Kasubbag Umum

TTL : Ambon, 25 Oktober 1980



Nama : Ronald Samuel Rumbiak,S.H

Jabatan : Pemantau Aktivitas HAM

TTL : Jayapura, 12 Maret 1983



Nama : Yan Christofel Habel Hamadi, S.E

Jabatan : Analis Barang Milik Negara

TTL : Jayapura, 13 Juli 1984



Nama : Johana Maryam Tukayo,S.H

Jabatan : Analis Pengaduan

TTL : Jayapura, 02 Oktober 1985



Nama : Christine Maisye Mansawan, S.E

Jabatan : Analis Pelanggaran Hak Sipol

TTL : Jayapura, 26 April 1991



Nama : Yudha Aprilianto, S.H

Jabatan : Analis Pelanggaran HAM

TTL : Jakarta, 06 April 1990



Nama : Tito Andi Verliyanto, S.E

Jabatan : Analis Perencanaan Anggaran

TTL : Bantul, 07 Agustus 1993



Nama : Heru Yulianto Nurprasetyo, A.Md

Jabatan : Analis Data

TTL : Bekasi, 27 Juli 1990



Nama : Nareki R. Kogoya, S.E

Jabatan : Analis Pengaduan Masyarakat

TTL : Kemiri, 05 Mei 1978



Nama : Yorgen Numberi, S.Sos

Jabatan : Pemantau Aktivitas HAM

TTL : Korombobi, 07 Maret 1980



Nama : Cherly Lenny Sagas, S.E

Jabatan : Pengadministrasi Keuangan

TTL : Jayapura, 19 Januari 1992



Nama : Naomi Nasadit, S.E

Jabatan : Administrasi Umum

TTL : Jayapura, 17 September 1986



Nama : Ronald Frengki Kabes

Jabatan : Administrasi Umum

TTL : Jayapura, 20 Mei 1985

KOMNAS HAM RI
Perwakilan Papua
Jl. Soa Siu Dok V Bawah – Jayapura, Papua
Telp/Faks (0967) 521 592
email: perwakilan_papua@komnasham.go.id
Kode Pos 99115